

AMIR USKARA: PPHN PERLU DIWUJUDKAN SECARA RIIL

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN



EDISI NO.03/TH.XVIII/III/2024



Pemilihan Presiden dan Legislatif 2024

PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA

Akhirnya Terpilih sebagai Presiden/Wakil Presiden 2024-2029

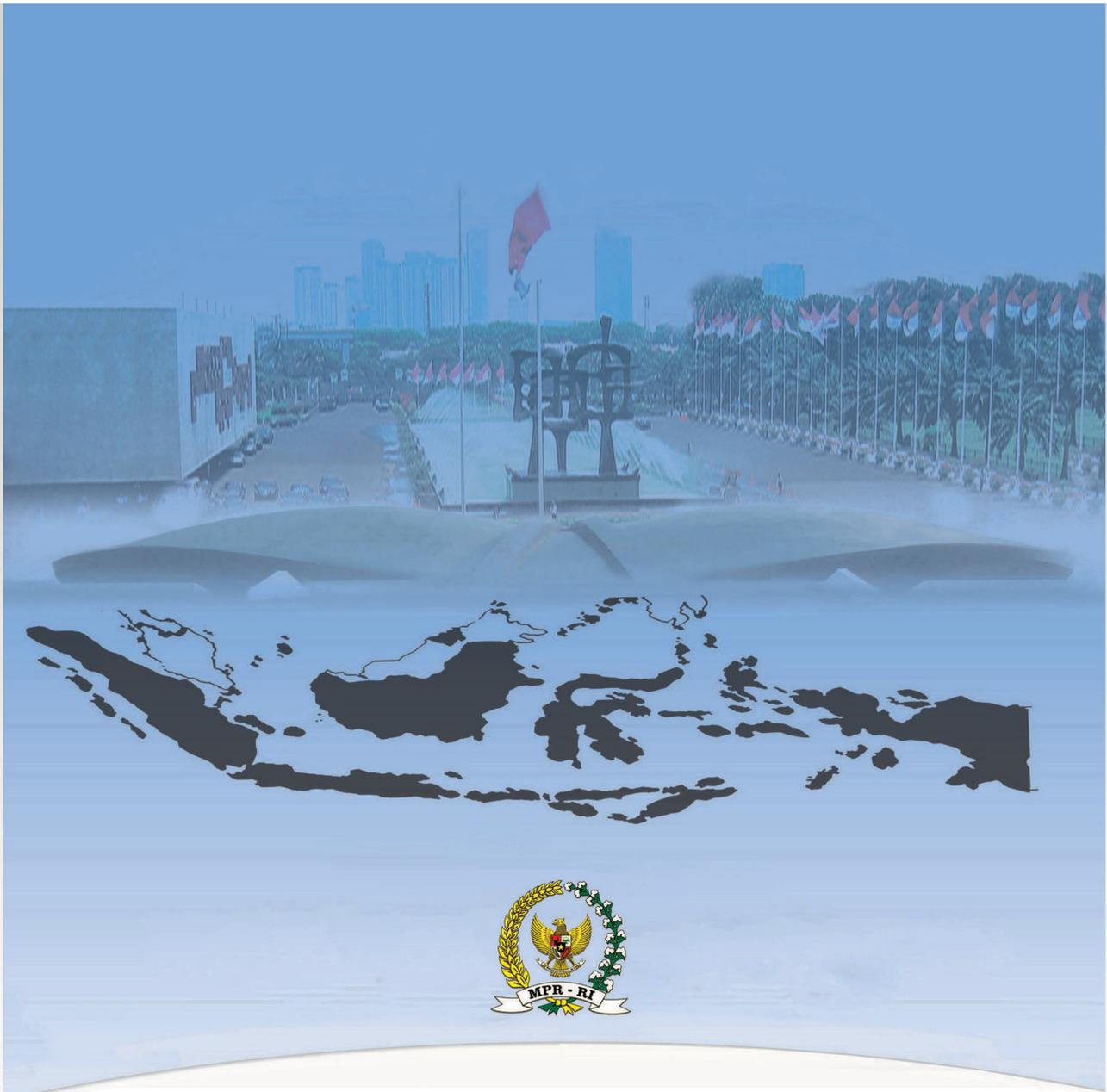
ISSN 0854-6371
9 770854 637158

16 Nasional
Bansoet: Apresiasi Ditandatanganinya
Perpres Hak Cipta Penerbit

32 Kajian MPR
Jalan Untuk
Menguatkan MPR

39 Selingan
Misi Kemanusiaan
KRI dr. Radjiman

64 Sosialisasi
Santri Harus Memperkuat
Nilai Etika



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Daftar Isi

EDISI NO.03/TH.XVIII/III/ 2024



08 BERITA UTAMA

Pemilihan Presiden & Pemilihan Legislatif 2024

KPU menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024 - 2029. Atas penetapan itu, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud Md mengajukan gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke MK.



16 Nasional

Peringatan Hari Pers Nasional 2024



64 Sosialisasi

Santri Harus Memperkuat Nilai Etika, Sambut Indonesia Emas



39 SELINGAN

Misi Kemanusiaan KRI dr. Radjiman



80 Wawancara

Andreas Hugo P

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	36
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	48
Diskusi Majelis	50
Varia MPR	66
Wawancara	74
Figur	76
Ragam	78
Dari Rumah Kebangsaan	84
Rehal	86



COVER

Edisi No.03/TH.XVIII/III/ 2024

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Pengantar Redaksi

Prabowo – Gibran Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2024 – 2029

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan penghitungan suara manual sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada 20 Maret 2024. Penghitungan manual telah dilakukan secara berjenjang sejak 15 Februari 2024, mulai dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, berlanjut pada tingkat provinsi, dan terakhir penghitungan di tingkat nasional di KPU Pusat. KPU telah menyelenggarakan pleno penghitungan suara di tingkat pusat (nasional) dihadiri seluruh KPU provinsi. KPU sendiri sudah memulai pleno rekapitulasi penghitungan suara sejak 29 Februari 2024 diawali dengan PPLN.

Berdasarkan hasil penghitungan (rekapitulasi) manual tersebut, KPU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Surat Keputusan itu telah dibacakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional di Gedung KPU pada Rabu malam, 20 Maret 2024.

Dalam Surat Keputusan itu, KPU menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024 – 2029. Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara (58,6%). Sementara pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar memperoleh 40.071.906 suara (24,9%), sedangkan pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD mendapatkan 27.040.475 suara (16,5%). Adapun total surat suara sah berjumlah 164.227.475 suara.

Surat Keputusan KPU itu juga menyebutkan, perolehan suara partai politik pada Pemilu 2024.

Hasil Pileg ini merupakan perolehan suara di 38 provinsi dan 128 PPLN. Total surat suara sah keseluruhan sebanyak 151.796.631 suara. PDI Perjuangan berada di posisi puncak mendapatkan 25.387.279 suara (16,72%), diikuti

Partai Golkar dengan 23.208.654 suara (15,28%), kemudian Partai Gerindra meraih 20.071.708 suara (13,22%).

Berikutnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 16.115.655 suara (10,61%), selanjutnya Partai NasDem sebesar 14.660.516 suara (9,65%), diikuti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 12.781.353 suara (8,42%), dan Partai Demokrat dengan 11.283.160 suara (7,43%). Partai berikutnya adalah Partai Amanat Nasional memperoleh 10.984.003 suara (7,23%).

Partai-partai politik tersebut adalah partai politik yang melaju ke parlemen karena telah melewati ambang batas *Parliamentary Threshold* sebesar 4%. Delapan partai politik yang lolos PT 4% hasil Pemilihan Legislatif 2024 ini adalah partai-partai politik yang sebelumnya sudah berada di parlemen. Hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal mempertahankan posisi di parlemen, karena tidak berhasil melewati ambang batas 4% dan hanya meraih sebesar 5.878.777 suara atau 3,87%. Pun tidak ada partai politik baru yang lolos ke Senayan.

Setelah KPU mengeluarkan Surat Keputusan berupa penetapan KPU terhadap hasil Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada Pemilu 2024 ini maka pihak-pihak yang menolak penetapan KPU bisa mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan pasangan paslon Ganjar Pranowo – Mahfud MD sudah menyatakan akan mengajukan gugatan PHPU ke MK.

Batas pengajuan gugatan PHPU ke MK adalah tiga hari setelah pengumuman penetapan KPU atas hasil Pemilu 2024. MK akan menggelar persidangan gugatan PHPU itu selama 14 hari, dan diperkirakan Keputusan MK pada 20 April 2024. Sementara, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih baru dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai kewenangan yang diatur dalam konstitusi akan menggelar Sidang Paripurna MPR dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

REDAKTUR PELAKSANA

Raichati M

KOORDINATOR REPORTASE

Djarot Widiarto

FOTOGRAFER

Tim Medvis

STAF DISTRIBUSI

Amelia Rubinta, Ikhwani Bimo F

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Suchayho,
Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238,
57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Mewaspadaai Gejala Resesi Ekonomi dengan Bijaksana

SELURUH proses mempersiapkan hadirnya pemerintah baru pada akhir Oktober 2024 dibayangi oleh gejala resesi ekonomi. Di tengah hiruk pikuk kegiatan itu, Indonesia tidak boleh lengah untuk melihat keluar (outward looking) guna mendapatkan pemahaman lebih komprehensif tentang tantangan-tantangan riil yang muncul dari gejala resesi ekonomi sekarang ini.

Perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF) layak dijadikan pijakan untuk menghadapi dan menyikapi dinamika perekonomian global dewasa ini. IMF mencatat, perlambatan ekonomi pasca pandemi Covid-19 masih akan berlanjut di sepanjang tahun ini. Jepang dan Inggris, dua negara industri maju anggota G-7, sudah masuk zona resesi. Masih menurut IMF, kecenderungan melambannya pertumbuhan ekonomi juga masih akan terjadi di beberapa negara lain, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).

Tahun ini, IMF memperkirakan ekonomi AS hanya tumbuh 1,6%, atau turun dari pertumbuhan 2023 yang dua (2) persen, sedangkan ekonomi Tiongkok per 2024 diperkirakan tumbuh 4,5%, atau turun dari pertumbuhan 2023 yang tercatat lima (5) persen.

Karena dua kuartal berturut-turut tumbuh negatif, Jepang dan Inggris masuk zona resesi. Perekonomian Jepang dilaporkan alami kontraksi (penurunan) 0,4% pada kuartal IV 2023, setelah sebelumnya mengalami kontraksi 3,3% pada kuartal III 2023. Selain inflasi yang relatif tinggi, faktor lain yang menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian Jepang adalah terus melemahnya konsumsi dalam negeri.

Perekonomian Inggris juga dilaporkan alami kontraksi pada kuartal III dan IV tahun 2023. Ekonomi Inggris mengalami kesulitan untuk pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, terutama karena naiknya harga energi. Sudah banyak laporan tentang meningkatnya jumlah warga miskin di Inggris.

Kecenderungan perekonomian global yang sedang tidak baik-baik saja saat ini hendaknya diwaspadai dengan penuh kebijaksanaan oleh pemerintah Indonesia. Melihat keluar dalam skala global sangat penting untuk memperoleh gambaran dan pemahaman lebih komprehensif tentang tantangan-tantangan riil yang muncul dari gejala resesi ekonomi sekarang ini.

Apalagi, ketika perekonomian Jepang dan Inggris sudah masuk zona resesi, masyarakat di dalam negeri gelisah menyoal kenaikan harga beras. Tentu saja, baik pemerintahan sekarang maupun pemerintahan baru yang akan hadir di penghujung Oktober 2024 harus waspada dan terus bekerja keras untuk membawa perekonomian nasional menjauh dari zona resesi.

Dapat dipastikan bahwa ketidakpastian global masih akan berlanjut, dan cepat atau lambat akan memengaruhi kinerja perekonomian nasional. Hal ini perlu diingatkan dan digarisbawahi oleh pemerintah karena melemahnya kinerja perekonomian global sudah berdampak ke Indonesia. Penyebabnya, beberapa negara yang kinerja perekonomiannya sedang melemah adalah mitra Indonesia di sektor perekonomian. Dan, jika dampak atau eksese ketidakpastian itu tidak ditanggapi dengan langkah atau pendekatan yang penuh kebijaksanaan, masyarakat kebanyakanlah yang akan menanggung segala bentuk eksesnya.

Indikator pertama yang dapat menjelaskan bahwa Indonesia sudah menerima dampak ketidakpastian ekonomi global adalah data tentang menurunnya kinerja ekspor. Per Januari 2024, neraca perdagangan Indonesia memang masih surplus 2,01 miliar dolar AS, tetapi pertumbuhan ekspor cenderung melemah. Nilai surplus neraca perdagangan itu mencerminkan penurunan karena harga komoditas andalan ekspor Indonesia juga turun. Tercatat bahwa nilai ekspor Indonesia pada Januari 2024 turun 8,06%, menjadi 20,52 miliar dolar

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI



AS. Ada surplus karena nilai impor sekitar 18,51 miliar dolar AS atau naik 0,36%.

Faktor kedua yang tidak kalah pentingnya untuk terus diwaspadai adalah tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akibat tingginya suku bunga saat ini. Belum ada kepastian kapan suku bunga acuan pada tingkat global akan turun.

Total utang luar negeri Indonesia hingga akhir November 2023, menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), adalah Rp 8.041,01 triliun, dengan rasio terhadap PDB 38,11%. Pembayaran bunga utang pemerintah dalam APBN 2023 masih cukup tinggi, yakni mencapai Rp 441,4 triliun. Tingginya suku bunga saat ini tentu akan berdampak pada volume pembayaran bunga utang luar negeri di tahun-tahun mendatang.

Berkait dengan pengelolaan APBN dan kebijakan utang luar negeri saat ini dan seterusnya hendaknya sungguh-sungguh dilandasi kehati-hatian, dan selalu berpijak pada skala prioritas, atau sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sangat penting untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat (dalam negeri) sebagai bagian dari strategi merawat pertumbuhan ekonomi.

Faktor ketiga yang juga sangat strategis adalah kerja keras dan lebih bersungguh-sungguh dalam upaya memperkecil defisit produksi tanaman pangan di dalam negeri, khususnya beras. Ketika pemerintah sudah berinisiatif untuk impor tiga (3) juta ton beras

pada tahun 2024 ini, menjadi pertanda sangat jelas bahwa produksi beras di dalam negeri defisit sehingga tidak dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan masyarakat.

Rencana impor beras itu jangan sampai mengendurkan semangat untuk mewujudkan kemandirian pangan, khususnya produksi beras. Ingat bahwa rencana atau komitmen impor itu dibuat ketika dunia sedang menghadapi ketidakpastian saat ini. Artinya, komitmen impor itu bisa berubah setiap saat, karena setiap negara produsen pada akhirnya akan memrioritaskan kebutuhan dalam negerinya sendiri.

Di tengah keluhan tentang naiknya harga beras premium, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengemukakan bahwa stok beras Bulog saat ini sekitar 1,4 ton juta dan dapat memenuhi kebutuhan nasional hingga Juni 2024. Kalau skenarionya berjalan lancar, akan ada tambahan stok beras nasional sekitar 3,5 juta ton hasil dari panen bulan Maret mendatang.

Namun, tetap relevan untuk diingatkan bahwa skenario atau target produksi beras selalui dibayangi oleh gangguan akibat perubahan iklim. Fakta historis setidaknya sudah memberi bukti. Total produksi beras tahun 2023 diperkirakan 30,90 juta ton, atau turun jika dibandingkan dengan produksi beras tahun 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Selain itu, faktor menurunnya luas areal panen padi sangat penting untuk digarisbawahi dan ditangani melalui program berkelanjutan. □

Pemilihan Presiden & Pemilihan Legislatif 2024

Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka

Akhirnya Terpilih sebagai Presiden/Wakil Presiden 2024-2029



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KPU menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024 - 2029. Atas penetapan itu, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud Md mengajukan gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke MK.

TEPAT pukul 22.19 WIB, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy'ari mencatat selesainya pembacaan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024. Keputusan bernomor 360/2024 dibacakan dalam rapat pleno pengumuman rekapitulasi nasional Pemilu 2024 di Ruang Utama Lantai II Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 20 Maret 2024. Surat Keputusan itu merupakan hasil rekapitulasi Pemilu 2024, termasuk suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

KPU mengumumkan hasil Pilpres dan Pileg 2024 setelah menyelesaikan proses rekapitulasi suara di 38 provinsi Indonesia. KPU sendiri sampai pada Rabu pagi (20/3/2024) baru menyelesaikan rekapitulasi suara di 36 provinsi Indonesia. Dengan demikian, masih tersisa 2 provinsi yang harus diselesaikan oleh KPU, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan, proses perhitungan di luar negeri juga sudah tuntas. Pada Rabu itu pun, KPU menyelesaikan rekapitulasi suara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan yang selesai sebelum Magrib. Setelah rekapitulasi dua provinsi itu, KPU menskors rapat pleno, untuk dilanjutkan dengan agenda pengumuman penetapan hasil Pemilu 2024.

Rapat pleno pengumuman hasil Pemilu 2024 dimulai sekitar pukul

21.10 WIB. Tampak hadir dalam rapat pleno KPU RI ini, antara lain Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan. Ketiganya duduk berdampingan dan berada di barisan depan. Sejumlah pimpinan partai politik juga hadir, jajaran saksi partai, dan jajaran KPU provinsi, serta awak media. Rapat pleno KPU ini juga disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi.

Rapat diawali dengan laporan dan pembacaan Berita Acara oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Rapat berlanjut dengan penandatanganan Berita Acara oleh seluruh komisioner KPU yang dilakukan di panggung. Setelah itu, Hasyim Asy'ari membacakan Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024. Pembacaan Surat Keputusan KPU ini diwarnai skorsing sidang pleno.

Di tengah pembacaan Surat Keputusan tersebut, Hasyim tiba-tiba berhenti dan memanggil salah satu petugas KPU. Hasyim tampak terlihat ngobrol dengan petugas tersebut. "Mohon izin kita koreksi sebentar," katanya di depan peserta Rapat Pleno KPU. Peristiwa ini menimbulkan tanda tanya hadirin tentang apa yang sedang terjadi.

Beberapa saat kemudian, pada pukul 21.44 WIB, Hasyim lalu mengumumkan rapat pleno diskors. "Mohon izin kita skors dulu untuk memperbaiki dokumen SK, karena ini penting. Kita skors sebentar," ujarnya.



Pada pukul 22.09 WIB, Hasyim kemudian mencabut skors rapat pleno. Hasyim lanjut membacakan Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024. Dalam Surat Keputusan itu, KPU menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024 – 2029.

Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara (58,6%). Sementara pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar memperoleh 40.071.906 suara (24,9%), sedangkan pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD mendapatkan 27.040.475 suara (16,5%). Adapun total surat suara sah berjumlah 164.227.475 suara.

Surat Keputusan KPU itu juga menyebutkan perolehan suara partai politik pada Pemilu 2024. PDI Perjuangan masih berada di puncak nomor satu, diikuti Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Berikutnya PKB, Partai NasDem, PKS, Partai Demokrat, PAN. PDI Perjuangan menjadi partai pemenang Pemilu Legislatif tiga kali berturut-turut, yaitu

pada 2014, 2019, dan 2024 (lihat boks).

Kemudian Surat Keputusan tersebut ditetapkan per 20 Maret 2024. “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2024, Ketua KPU Hasyim Asy’ari ditandatangani,” ujarnya menutup pembacaan surat keputusan KPU. Rapat pleno pun berakhir.

Di luar Gedung KPU, sejumlah orang bagian dari massa aksi masih bertahan di depan KPU RI. Massa aksi masih tampak berkerumun di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Beberapa dari mereka masih melakukan orasi meski tidak dilakukan di atas podium. Massa aksi sudah datang ke Gedung KPU sejak pukul 14.50 WIB. Massa terdiri atas beberapa kelompok. Sebagian massa mengaku datang dari Kediri, Surabaya, hingga Malang. Mereka menggelar demonstrasi dan berorasi memprotes proses Pemilu.

Sekitar pukul 15.15 WIB, datang lagi sekelompok massa di depan Gedung KPU RI. Massa ini berbeda dengan massa yang sudah datang sebelumnya. Massa yang kedua ini datang ke Jalan Imam Bonjol dari

arah Bundaran HI. Kelompok massa membawa mobil komando serta menyorongkan spanduk dukungan kepada KPU.

“Kami dukung KPU dan Bawaslu bekerja independent tanpa intervensi,” demikian bunyi tulisan di salah satu spanduk. Spanduk lainnya yang dibawa massa bertuliskan, “Rakyat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Ingat!! Pemilu harus siap menang dan siap kalah.”

Pihak kepolisian sudah berjaga di sekitar Jalan Imam Bonjol dan HOS Cokroaminoto. Jalan Imam Bonjol di depan kantor KPU dari kedua arah sudah ditutup. Mobil-mobil polisi, termasuk mobil barracuda, tampak bersiaga di dalam dan luar kantor KPU. Di pintu gerbang KPU RI, polisi melakukan pengamanan ketat. Usai rapat pleno KPU, jumlah massa aksi berangsur berkurang. Beberapa orang sudah meninggalkan Jalan Imam Bonjol. Arus lalu lintas di Jalan HOS Cokroaminoto masih tampak padat, namun tidak terlalu macet.

Terima kasih kepada Rakyat

Dari kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Rabu malam (20/

3/2024), Capres Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan setelah KPU mengumumkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia.

“Saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan Capres dan Cawapres 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dan atas nama Koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Di depan awak media dalam konferensi pers itu, Prabowo didampingi sejumlah petinggi partai politik, di antaranya Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketum PRIMA Agus Jabo. Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak tampak dalam konferensi pers itu.

Dalam pernyataannya, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI, Joko Widodo. “Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden RI Pak Joko Widodo,” ujarnya.

Prabowo memuji Jokowi. Menurutnya, Jokowi telah memberikan contoh rekonsiliasi besar. “Dengan kenegarawanan beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar, lawan beliau sekian tahun, sepuluh tahun ya. Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya, sehingga hari ini saya mendapat mandat dari rakyat,” terang Prabowo.

Prabowo menyebut, Pemilu Indonesia telah diakui oleh dunia. “Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah dan duta besar,” ujarnya. Bahkan, jalannya Pemilu 2024 di Tanah Air dipantau para pemimpin dunia.

Menurut Prabowo, para pemimpin dunia itu terkesan dengan penyelenggaraan Pemilu Indonesia yang berjalan lancar dan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tertib. “Mereka yang memantau jalannya pemilu kita menyatakan terkesan atas lancarnya pemilu kita, atas tertibnya, dan atas ketenangan, kesejukan dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilu, tanggal 14 Februari lalu,” ucap Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada seluruh penyelenggara Pemilu 2024, mulai dari KPU, Bawaslu, hingga jajaran penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Ucapan selamat kepada pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka datang dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Dalam keterangan kepada pers di NasDem Tower,

Jakarta Pusat, sesaat setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024, Surya Paloh menyatakan, partainya menerima hasil rekapitulasi Pemilu 2024. “Partai NasDem menyatakan, menerima hasil Pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 lalu, baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.

Mewakili NasDem, Surya Paloh lantas mengucapkan selamat kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Ucapan serupa juga disampaikan kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2024. “NasDem juga ucapkan



selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024,” ujarnya.

“Partai NasDem ucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 beserta ketiga paslon yang ikuti Pilpres 2024,” imbuhnya. Meskipun memiliki catatan terkait Pemilu 2024, NasDem tetap menerima hasil Pemilu 2024. Prinsipnya NasDem berkomitmen memperbaiki demokrasi di Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, juga menyatakan menerima hasil Pilpres 2024, namun disertai dengan sejumlah catatan. Catatan itu, antara lain terkait dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Dia menyebutkan, banyak persoalan yang harus menjadi perhatian terhadap Sirekap ini. “Kalau untuk menerima, kami menerima hasil Pilpres 2024. Adapun masalah hukum itu lain ceritanya,” tuturnya.

Gugatan PHPU ke MK

Sementara itu pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar menyampaikan pernyataan sikap atas pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024 melalui siaran *Youtube* milik Anies Baswedan. Anies dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dilihat dalam website MK, Gugatan itu telah diterima MK dengan nomor 01-02/AP3-PRED/Pan.MK/03/2024 tertanggal 21 Maret 2024 pukul 09.02 WIB.

Baik Anies maupun Cak Imin menilai ada ketidaknormalan terhadap proses Pemilu 2024. “Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal, kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormal, kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini,” kata Cak Imin.

Berdasarkan catatan dari KPU tadi, lanjut Cak Imin, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada pasangan Capres dan Cawapres ini. Maka, untuk memperjuangkan suara puluhan juta orang yang percaya pada perubahan itu, Anies

dan Cak Imin memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke MK. Timnas Amin akan menyampaikan sejumlah dugaan kecurangan kepada majelis hakim MK. Ketua Umum PKB ini mengklaim pihaknya menemukan banyak kecurangan.

“Dan, menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin,” ujarnya.

Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD., juga menyatakan siap mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke MK. “Kami sudah menyiapkan tim hukum untuk kita segera mendaftarkan,” ujar Ganjar Pranowo dalam konperensi pers di Jalan Teuku Umar

9, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024.

Ganjar menyebut, gugatan itu bisa menjadi momentum yang bagus untuk MK menunjukkan kredibilitasnya setelah berbagai polemik yang dihadapi MK selama proses Pilpres 2024. “Setelah ada putusan MKMK, setelah itu juga kita melihat penyelenggara mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita harus mengembalikan kredibilitas demokrasi kita menjadi jauh lebih baik,” jelasnya.

Ganjar menyebut, beberapa aduan terkait Pilpres 2024 mulai dari *money politic* hingga intimidasi pada relawannya. “Maka setelah pengumuman (KPU) tadi malam, tim Ganjar – Mahfud sudah bersepakat kalau hal semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi,” tambahnya. □

DER/MBO/BSC

Perolehan Suara Partai Politik

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan hasil Pemilihan Legislatif 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan pada Rabu, 20 Maret 2024, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak, diikuti Partai Golkar, dan Partai Gerindra. PDI Perjuangan berhasil mencatat hatr trick sebagai partai politik pemenang Pemilu. PDI Perjuangan menjadi peraih suara terbanyak pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 ini.

Hasil Pileg ini merupakan perolehan suara di 38 provinsi dan 128 PPLN. Total surat suara sah keseluruhan sebanyak 151.796.631 suara. Berikut ini urutan partai politik sesuai dengan peringkat jumlah suara yang diperoleh.

PDI Perjuangan	: 25.387.279 suara	(16,72%)
Partai Golkar	: 23.208.654 suara	(15,28%)
Partai Gerindra	: 20.071.708 suara	(13,22%)
Partai Kebangkitan Bangsa	: 16.115.655 suara	(10,61%)
Partai NasDem	: 14.660.516 suara	(9,65%)
PKS	: 12.781.353 suara	(8,42%)
Partai Demokrat	: 11.283.160 suara	(7,43%)
PAN	: 10.984.003 suara	(7,23%)
PPP	: 5.878.777 suara	(3,87%)
PSI	: 4.260.169 suara	(2,80%)
Partai Perindo	: 1.955.154 suara	(1,28%)
Partai Gelora	: 1.281.991 suara	(0,84%)
Partai Hanura	: 1.094.588 suara	(0,72%)
Partai Buruh	: 972.910 suara	(0,64%)
Partai Ummat	: 642.545 suara	(0,42%)
PBB	: 484.486 suara	(0,31%)
Partai Garuda	: 406.883 suara	(0,26%)
PKN	: 326.800 suara	(0,21%)

Anomali dalam Pemilu 2024

Pemilu 2024 diwarnai anomali, yaitu sesuatu keadaan yang tidak biasa. Suara pemenang Pilpres 2024 yaitu Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka tidak berbanding lurus dengan kenaikan suara Partai Gerindra dalam Pemilu Legislatif.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

RAKYAT sudah memberikan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Rabu, 14 Februari 2024. Sekitar 204 juta warga negara Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri memiliki hak pilih dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) para pemilih memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) dan calon anggota legislatif (Caleg) baik DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta calon anggota DPD. Pemilu 2024 disebut sebagai pemilu serentak untuk pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).

Sejak 15 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu, baik Pilpres maupun Pileg. Rekapitulasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu *real count* melalui aplikasi Sirekap (sistem informasi rekapitulasi) dan penghitungan manual secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten,

provinsi, hingga ke tingkat nasional di KPU Pusat. Rekapitulasi melalui Sirekap—sebelumnya bernama Situng—adalah penghitungan rekapitulasi berdasarkan hasil form C Plano.

Berdasarkan hasil penghitungan (rekapitulasi) manual tersebut, KPU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Surat Keputusan itu telah dibacakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional di Gedung KPU pada Rabu malam, 20 Maret 2024.

Untuk Pemilu Legislatif, rekapitulasi suara telah dilakukan di 38 provinsi Indonesia dan 128 PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri). Total surat suara sah keseluruhan sebanyak

151.796.631 suara. Dalam Surat Keputusan tersebut, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak, diikuti Partai Golkar, dan Partai Gerindra di urutan ketiga. PDI Perjuangan berhasil mencatat hatrrick sebagai partai pemenang Pemilu untuk ketiga kalinya setelah menjadi pemenang pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

Lebih rinci lagi, PDI Perjuangan berada di posisi puncak mendapatkan 25.387.279 suara (16,72%), diikuti Partai Golkar dengan 23.208.654 suara (15,28%), kemudian Partai Gerindra meraih 20.071.708 suara (13,22%). Berikutnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 16.115.655 suara (10,61%), selanjutnya Partai NasDem sebesar 14.660.516 suara (9,65%), diikuti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 12.781.353 suara (8,42%), dan Partai Demokrat dengan 11.283.160 suara (7,43%). Partai berikutnya adalah Partai Amanat Nasional memperoleh 10.984.003 suara (7,23%).

Itulah delapan partai politik yang lolos ke parlemen karena telah melewati ambang batas (*parliamentary threshold*) 4%. Ini adalah partai lama hasil Pemilu 2019 yang sebelumnya memang sudah berada di parlemen periode 2019 - 2024. Nasib tak beruntung dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang akhirnya terdepak dari Senayan karena tidak lolos ambang batas parlemen. PPP yang berdiri sejak masa awal Orde Baru itu hanya meraih sebesar 5.878.777 suara atau 3,87%. Selain itu, tidak ada partai politik baru yang lolos ke Senayan.

Selain PPP, partai lain yang meraih suara di bawah 4% adalah sebagai berikut: PSI meraih 4.260.169 suara (2,80%), Partai Perindo 1.955.154 suara (1,28%), Partai Gelora 1.281.991 suara (0,84%), Partai Hanura 1.094.588 suara (0,72%), Partai

Buruh 972.910 suara (0,64%), Partai Ummat 642.545 suara (0,42%), PBB 484.486 suara (0,31%), Partai Garuda 406.883 suara (0,26%), dan terakhir PKN 326.800 (0,21%).

Perolehan suara partai politik dalam Pemilu 2024 yang diumumkan KPU itu tidak jauh berbeda dengan *quick count* beberapa lembaga survei. Misalnya, data hasil *quick count* Poltracking Indonesia terhadap perolehan suara Pileg Pemilu 2024. Berdasarkan data hasil hitung cepat tersebut, PDI Perjuangan unggul dengan 16,64%. Posisi PDI-P diikuti oleh Partai Golkar (15,18%), Partai Gerindra (13,34%), dan Partai Kebangkitan Bangsa (10,89%), dan Partai Nasdem (9,24%) yang berada di lima besar.

Kemudian, masing-masing berada di urutan keenam, ketujuh, dan kedelapan adalah Partai Keadilan Sejahtera (8,17%), Partai Demokrat (7,41%), dan Partai Amanat Nasional (7,27%). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada di urutan kesembilan dengan 3,84% dan terancam tidak melewati ambang batas 4%.

Sementara partai-partai lainnya mendapat suara di bawah 4%, yaitu PSI (2,89%), Partai Perindo (1,33%), Partai Gelora (0,94%), Partai Hanura (0,74%), Partai Buruh (0,83%), Partai Bulan Bintang (0,41%), Partai Garuda (0,33%), dan Partai Kebangkitan



Nusantara (0,24%).

Hasil *quick count* atau hitung cepat Litbang Kompas juga tidak jauh berbeda. Dari data akhir *quick count* Litbang Kompas tercatat partai banteng meraup 16,3%, kemudian disusul Partai Golkar di posisi kedua yang meraih 14,64%, sementara posisi ketiga diisi oleh Partai Gerindra yang meraih 13,47%. Posisi berikutnya ditempati PKB yang memperoleh 10,71%. Selanjutnya berturut-turut Partai Nasdem (9,96%), PKS (8,37%),

Partai Demokrat (7,62%), PAN (7,10%), PPP (3,86%), PSI (2,80%).

Anomali

Ada anomali dari hasil perolehan suara partai politik oleh KPU dan *quick count* lembaga-lembaga survei. Anomali adalah istilah yang merujuk kepada keadaan penyimpangan atau keanehan yang terjadi, dengan kata lain tidak seperti biasanya. Pertama, keadaan tidak biasa atau keanehan di mana suara pemenang Pilpres versi *quick count*, yaitu Prabowo Subianto tidak berbanding lurus dengan suara Partai Gerindra. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka unggul telak dalam penghitungan suara Pilpres, sebesar 58,6%. Namun, Partai Gerindra yang diketuai Prabowo Subianto tidak menempati posisi puncak dalam Pileg, hanya 13,22%. Artinya, tidak terlihat efek ekor jas pada Partai Gerindra.

Pertanyaan anomali itu hanya bisa dijawab para peneliti lembaga-lembaga survei. Peneliti lembaga survei menyebut, anomali itu sebagai “split ticket voting”. Lebih jelasnya, *split ticket voting* adalah fenomena yang terjadi ketika dalam satu waktu ada beberapa pemilihan sekaligus lalu pemilih membuat pilihan yang berbeda untuk pemilihan yang berbeda itu. Misalnya, ada Pilpres dan Pileg serentak seperti Pemilu 2024, pemilih memilih Partai A atau Caleg dari Partai A tersebut, tetapi di Pilpres memilih kandidat yang diusung Partai B. Banyak pemilih yang mengaku memilih pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka tetapi mencoblos PDI Perjuangan atau Caleg partai ini untuk Pileg.

“Ini fenomena *split ticket voting*, yang unggul Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di Pilpres, tapi di Pileg yang unggul PDI Perjuangan,” ujar peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas, seperti dikutip *Kompas.com*, pada Rabu, 21 Februari 2024. Penyebabnya, karena persoalan ketiadaan pembeda ideologi antar-partai politik. Dalam hal Pemilu 2024, ketiadaan pembeda ideologi ini terutama antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. □

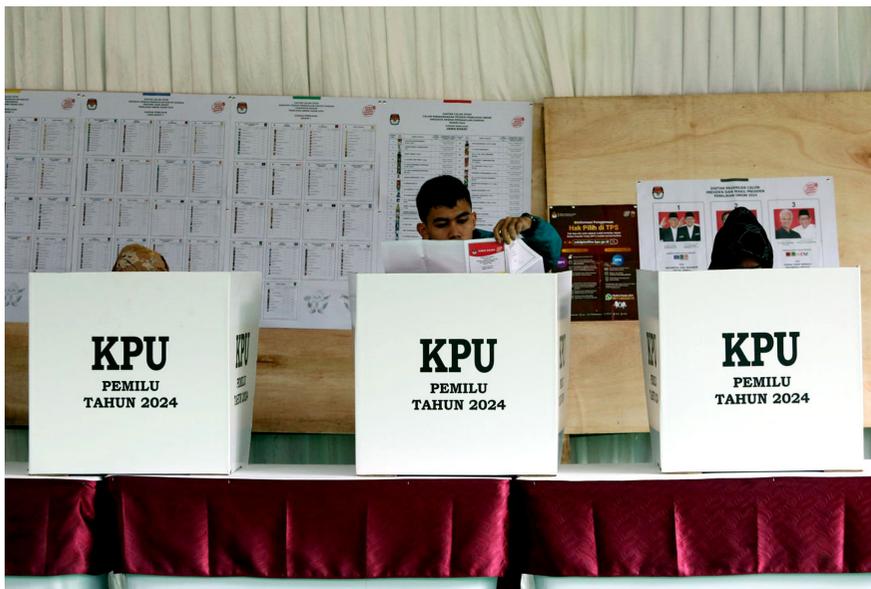


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BSC



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Prof. Dr. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR

Pihak yang Tidak Puas Bisa Ajukan Gugatan Sengketa Pemilu ke MK

PEMUNGUTAN suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. Pada Maret ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. KPU menetapkan akhir penghitungan suara nasional pada 20 Maret 2024. Dari penetapan KPU ini sudah bisa diketahui presiden dan wakil presiden terpilih, serta perolehan suara partai politik dan kursi, dan perolehan suara calon anggota legislatif. Tak berbeda jauh dari hasil quick count, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2024.

Meski KPU sudah menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, bukan berarti proses dan tahapan pemilu sudah berakhir. Sebab, pihak-pihak yang menolak hasil Pemilu 2024 bisa mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah

Konstitusi (MK). Setelah tiga hari penetapan KPU, pasangan Capres dan Cawapres yang kalah bisa mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu ke MK. MK akan menggelar sidang perselisihan hasil Pemilu tersebut.

Untuk membahas persoalan Pemilu dan pasca penetapan hasil Pemilu, Majelis berbincang dengan Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad. Berikut perbincangan dengan Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini. Petikannya.

Bagaimana Bapak melihat penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 ini hingga penetapan hasil Pemilu oleh KPU?

Secara umum, Pemilu 2024 sudah berjalan dengan baik. KPU pun telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Memang harus diakui masih ada beberapa kesalahan teknis di beberapa tempat. Tetapi, kalau dipelajari, kesalahan itu bukan terjadi pada saat ini saja. Kesalahan serupa juga pernah terjadi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Dalam Pemilu sebelumnya juga

ada kekurangan dan kesalahan. Namun, kekurangan dan kesalahan serta persoalan yang muncul dalam Pemilu menjadi pelajaran dan perlu diluruskan, bukan berarti membatalkan Pemilu dan hasil-hasilnya.

Kalau dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, apakah ada kemajuan dan perbaikan dalam Pemilu kali ini?

Dalam Pemilu 2024 ini, kita dengan cepat bisa mendapatkan formulir C1 yang dibutuhkan dan bisa difoto atau difotokopi. Itu salah satu keterbukaan informasi yang sangat luar biasa dari KPU. Kalau masih ada kekurangan hanya menyangkut hal teknis, dan bukan hanya pada Pemilu kali ini saja. Pemilu sebelumnya juga terjadi kesalahan teknis. Hanya berbeda dengan Pemilu sebelumnya, pada saat ini kekuatan media sosial cukup dahsyat, sehingga kesalahan sekecil apapun bisa terlihat. Kesalahan-kesalahan dalam Pemilu itu bisa dilihat di media sosial.

Di lain pihak, ada juga kelompok-kelompok atau pihak yang tidak puas dengan

penyelenggaraan Pemilu dan melakukan kritik terhadap KPU. Hal itu, kritik maupun ketidakpuasan, saya pikir adalah hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi, dan kritik itu bisa diterima semua pihak.

Bagaimana untuk perbaikan pelaksanaan Pemilu ke depan? Apa saja yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini?

Untuk Pemilu lima tahun yang akan datang, tentu teknologi akan semakin maju. Begitu pula dengan penyelenggaraan Pemilu kemungkinan menggunakan teknologi yang lebih maju. Bisa saja penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, seperti di Amerika. Artinya, pemungutan suara bisa dilakukan di mana saja. Kalau identitas penduduk sudah terdata dengan baik, kemungkinan lima tahun ke depan penyelenggaraan Pemilu tidak lagi melalui tempat pemungutan suara (TPS).

Banyak kalangan yang mengkritik penyelenggara Pemilu, seperti KPU maupun Bawaslu. Bagaimana tanggapan Bapak?

Saya mengikuti perkembangan Pemilu di media. Saya kira proses dan tahapan Pemilu sudah berjalan. Artinya, masing-masing institusi penyelenggara Pemilu mempunyai tugas masing-masing. Bila ada pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu bisa ditindaklanjuti dan diproses sesuai aturan yang ada. Silakan saja. Ini adalah proses politik dan ada aturan-aturannya. Kalau kemudian ada kritik-kritik maupun sorotan terhadap penyelenggara Pemilu, hal itu wajar saja.

Bila melihat hasil Pemilu, sepertinya tidak ada perubahan pada partai politik yang melewati ambang batas parlemen. Partai politik di parlemen masih seperti periode sebelumnya. Apa komentar Bapak?

Saya kira hasil Pemilu 2024 ini cukup menarik. Sebab, partai yang dahulu superior kini tidak ada lagi. Suara PDI Perjuangan turun sangat banyak. Kemudian, Partai Golkar menduduki tempat kedua menggeser Partai Gerindra. Itu semua cukup menarik untuk kita lihat. Partai Gerindra masih berada di tiga besar. Tetapi partai-partai menengah semua hampir mendekati 10%. Jadi, mulai terjadi perimbangan kekuatan yang merata. Kekuatan partai politik di parlemen pun berimbang.

Untuk pasangan nomor urut 2 yang dinyatakan terpilih dalam Pemilu 2024 ini harus mendapat dukungan parlemen yang kuat. Paling minimal mencapai 65% suara di parlemen, karena itu koalisi pemerintah yang berkuasa harus bisa menarik partai lain untuk bergabung.

Dalam Pemilu 2024 ini juga ada fenomena menarik, yaitu pemenang Pilpres tidak diikuti dengan kemenangan partai pendukung, seperti kemenangan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra tidak diikuti dengan kemenangan Partai Gerindra di Pemilihan Legislatif (Pileg). Mengapa hal ini bisa terjadi?

Banyak kalangan, terutama peneliti

Saya pikir masyarakat belum tertarik dengan partai-partai baru. Masyarakat juga belum mengenal para kader partai baru. Sebab, pada akhirnya, kemenangan partai politik ditentukan oleh para kadernya, atau para Calegnya. Saya melihat di Partai Golkar, Airlangga Hartarto berhasil memilih kader-kader yang bagus untuk menjadi Caleg. Inilah yang menentukan besarnya suara Partai Golkar dalam Pemilu ini dan mendapat kursi yang banyak di DPR.

Pasangan Capres dan Cawapres yang kalah akan mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu ke MK. Apa komentar Bapak?

Gugatan perselisihan hasil ke MK adalah hal yang wajar dan tidak apa-apa. Sebab,



lembaga survei juga mempertanyakan hal itu. Fenomena ini juga menjadi perdebatan di media-media. Mungkin Partai Gerindra salah strategi. Mereka hanya mendorong Prabowo Subianto sebagai calon presiden, tetapi dorongan terhadap Capres tidak sekuat dorongan kepada partai. Seharusnya, suara partai ikut naik. Hal ini terjadi pada saat kenaikan Partai Demokrat ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, atau ketika Jokowi terpilih, suara PDI Perjuangan juga naik pesat. Tetapi, saat ini ada yang berbeda. Suara Partai Golkar dan PAN malah mengalami kenaikan. Partai itu mendapat efek positif dari pencalonan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Fenomena lain adalah partai-partai baru tidak bisa lolos ke DPR. Bagaimana menurut Bapak?

memang begitu saluran hukum sesuai aturan perundang-undangan jika terjadi sengketa dalam Pemilu. Kanal itu sudah disediakan dalam demokrasi kita. Jika terjadi pelanggaran Pemilu bisa diajukan ke Bawaslu, dan kalau terjadi sengketa hasil Pemilu diajukan ke MK. Itulah proses dan mekanisme yang ditempuh mereka yang melihat ada pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Dan, itu konstitusional.

Hanya, perlu diingat, selisih atau perbedaan suara antara pasangan Capres dan Cawapres yang terpilih dengan pasangan lainnya cukup besar. Dan, bila terjadi kecurangan atau pelanggaran maka tidak mudah untuk dibuktikan. Tetapi, proses gugatan ke MK adalah hal yang lumrah dan normal seperti juga berlaku di negara-negara lain. □

Peringatan Hari Pers Nasional 2024

Bamsoet Apresiasi **Ditandatanganinya** Perpres Hak Cipta Penerbit



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Peraturan mengenai publisher right bisa memperkuat pers nasional, yang tidak hanya sehat secara ketentuan jurnalistik, melainkan juga sehat secara ekonomi. Dan, sekaligus mencegah terjadinya digital feudalisme.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, serta Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun, mendampingi Presiden Joko Widodo membuka Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024. Sekaligus mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani Peraturan Presiden terkait Regulasi Hak Cipta Penerbit atau Publisher Right. Serta memprioritaskan belanja iklan pemerintah kepada perusahaan pers sebagai kebijakan afirmatif dalam menumbuhkembangkan usaha pers di dalam negeri.

Peraturan Presiden terkait publisher right menjadi angin segar bagi kalangan pers. Setelah tiga tahun lamanya dibahas dan diformulasikan, akhirnya pers bisa mendapatkan keadilan ekonomi terkait berita yang mereka buat yang ditampilkan oleh berbagai platform digital.

“Sebagaimana disampaikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), bahwa problem utama pers bukanlah pada defisit kebebasan pers, mengingat hingga saat ini pers tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi. Problem utama pers saat ini adalah

pada disrupsi digital yang menurunkan daya bisnis pers, khususnya dari pemasukan iklan. Melalui Perpres tersebut, mewajibkan platform digital untuk melayani negosiasi nilai ekonomi dari kalangan pers. Tidak menutup kemungkinan, Perpres tersebut ke depannya dapat ditingkatkan menjadi Undang-Undang,” ujar Bamsoet usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di Jakarta, Selasa (20/2/24).

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, peraturan mengenai publisher right dapat menciptakan ekosistem kompetisi yang adil antara pers dengan platform digital global, seperti Google, Facebook, Youtube, Twitter dan lainnya. Sehingga bisa memperkuat pers nasional yang tidak hanya sehat secara ketentuan jurnalistik, melainkan juga sehat secara ekonomi. Sekaligus mencegah terjadinya digital feudalisme.

“Seperti halnya Indonesia, berbagai negara lain juga sudah merancang regulasi terkait publisher right. Antara lain Australia



Sukses
JAKARTA
INDONESIA!

Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024

“Mengawal transisi kepemimpinan nasional dan merawat keutuhan bangsa”

20 Februari 2024



Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pentingnya penerapan prinsip ko-eksistensi (hidup bersama) serta konsep hak pengelola media dan hak cipta jurnalistik (publisher rights). Bukan hanya untuk melindungi kepentingan pers nasional menghadapi dominasi platform digital global, ko-eksistensi dan publisher rights juga menjadi unsur penting membangun kedaulatan nasional di bidang digital.

“Penting diingat oleh kalangan pers, bahwa memutuskan hubungan sama sekali dengan platform digital global, atau sikap menolak transformasi digital, merupakan sikap yang tidak realistis. Karenanya, kebijakan publisher right bukan ditujukan untuk melawan platform digital global. Melainkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam relasi kekuasaan, menegakkan prinsip persamaan di depan hukum, serta kesetaraan level kedudukan pada area bisnis yang sebidang,” pungkas Bamsuet. □

yang telah mengesahkan News Media Bargaining Code, serta Korea Selatan yang baru saja menerapkan amandemen undang undang bisnis telekomunikasi,

Telecommunication Business Act,” jelas Bamsuet.

Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) 2012-2017 dan

Diskusi Masa Depan Perekonomian Indonesia

Lestari Moerdijat: Perlu Antisipasi Tepat Agar Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Target

Diperlukan langkah antisipasi yang tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah..



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PESTA demokrasi tentu memiliki dampak sosial, ekonomi dan politik. Pada saat yang sama kita juga tidak bisa menutup mata beberapa negara sudah mulai masuk pada masa resesi. Kita harus mampu mendeteksi sejumlah dampak dan langkah antisipasinya ke depan dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema: "Pemilu 2024 dan Masa Depan Perekonomian Indonesia" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (21/2).

Diskusi yang dimoderatori Dr. Radityo Fajar Arianto, MBA., (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Shanti Shamdasani (CEO S. ASEAN International Advocacy & Consultancy /SAIAC), Mohammad Faisal, Ph.D., (Direktur Eksekutif Core Indonesia), dan David Sumual (Kepala Ekonom PT. Bank Central Asia) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Prof. Rofikoh Rokhim, SE., SIP., DEA., Ph.D., (Guru Besar Ilmu Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) sebagai

penanggap.

Menurut Lestari, pelaksanaan Pemilu berpengaruh terhadap sejumlah aspek perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi di sejumlah negara. Pada saat yang sama, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, juga terjadi gagal panen akibat banjir di sejumlah daerah. Dampak sosial yang terjadi akibat hal itu harus segera diatasi.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, langkah antisipasi terhadap sejumlah dampak bencana tersebut harus segera dilakukan. Selain itu, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, daya tahan belanja pascapemilu harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Menyikapi kondisi tersebut, tegas Rerie, diperlukan kebijakan yang tepat dalam menjawab sejumlah tantangan itu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan target yang telah ditentukan.

CEO SAIAC, Shanti Shamdasani, mengungkapkan, dampak ekonomi global yang melemah juga sudah mengimbas ke

negara-negara ASEAN. Thailand, misalnya, sudah tidak mencapai pertumbuhan GDP yang ditargetkan. Ekonomi global, menurut Shanti, sangat dipengaruhi oleh aspek perubahan iklim dan krisis geopolitik di sejumlah kawasan.

Shanti menilai, perekonomian Indonesia harus mampu tumbuh 6%-7% untuk mengantisipasi gejolak pada ekonomi global, dampak perubahan iklim dan potensi bencana alam. Dia menyarankan, Indonesia fokus pada pengembangan domestik dalam upaya mendorong laju perekonomian, serta stabilitas harga komoditas harus mampu dijaga dengan pendekatan yang tepat.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal berharap, siapa pun yang memimpin Indonesia kelak mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan sejumlah koreksi pada kebijakan yang sudah berjalan. Karena itu, tambah Faisal, diperlukan kekuatan penyeimbang di parlemen dalam proses perbaikan kebijakan yang diperlukan.

Faisal menilai, tantangan pemerintahan mendatang adalah terkait akselerasi ekonomi, pemerataan ekonomi dan perbaikan kebijakan fiskal. Upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6%-7%, tegas dia, harus melalui kebijakan yang tidak business as usual.

Ketika kondisi ekosistem perekonomian global dan nasional saat ini kurang mendukung, tambah Faisal, menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tantangan yang tidak mudah. Mengacu pada pengalaman di masa lalu, ungkap Faisal, biasanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai Indonesia selalu dibantu oleh booming kenaikan harga komoditas.

Faisal berpendapat, perlunya kewaspadaan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, seperti Tiongkok yang melambat. Kondisi tersebut menyebabkan surplus

perdagangan yang dinikmati Indonesia saat ini terus tergerus.

Faisal menilai, kebijakan hilirisasi yang diinisiasi pemerintah saat ini akan mendorong perkembangan industri manufaktur di tanah air. Meski begitu, dia mengingatkan, penerapan hilirisasi di sejumlah sektor harus diperhatikan dengan serius aspek lingkungan, sosial dan tata kelolanya.

Kepala Ekonom PT. Bank Central Asia, David Sumual mengungkapkan, pergerakan pasar dunia saat ini menunggu The Fed menurunkan suku bunga. Bahkan, ujar David, di negara-negara yang fundamental ekonominya lemah saat ini sudah terdampak sejumlah kebijakan yang diambil oleh The Fed. Sehingga, David menilai, perlu dicermati kebijakan yang akan diambil bank sentral AS itu.

David berpendapat, nilai tukar rupiah saat

ini relatif menguat karena ada aliran dana asing yang masuk pasar modal. Para investor itu masuk, jelas dia, karena mereka menilai fundamental ekonomi dan inflasi Indonesia masih baik. David mengingatkan, potensi melemahnya nilai tukar rupiah, yang disebabkan cenderung melambatnya perekonomian di Tiongkok.

Guru Besar Ilmu Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rofikoh Rokhim, mengungkapkan, pasca pemilu di Indonesia berlangsung dengan biasa saja.

Menurut Rofikoh, salah satu peristiwa yang di luar perkiraan terjadi pada 1997-1998, ketika Pemerintahan Soeharto jatuh. Dia menilai, perubahan pada 1998 itu banyak memberi manfaat, salah satunya adalah pergantian kekuasaan di masa-masa

berikutnya berlangsung dengan damai.

Saat ini, ujar Rofikoh, yang perlu mendapat perhatian dan diwaspadai adalah perubahan iklim, perubahan aturan dan perubahan perilaku masyarakat yang dampaknya akan terlihat pada 10-20 tahun mendatang. Sejumlah risiko tersebut, tegas Rofikoh, harus diantisipasi dan diwaspadai agar tidak menghambat proses pembangunan.

Dengan mengembangkan kemampuan mengidentifikasi sejumlah risiko itu, Rofikoh yakin, Indonesia akan mampu bertahan terhadap berbagai kondisi yang terjadi. Rofikoh menegaskan, tidak perlu terlalu khawatir menghadapi kondisi pasca pemilu, tetapi harus tetap waspada dengan selalu mempersiapkan langkah antisipasi yang tepat. □

Ngobrol Bareng Legislator

Syarief Hasan: Masyarakat Jangan Sampai Berurusan dengan Pinjol

Aplikasi Pinjol menjanjikan pinjaman yang mudah dan cepat dicairkan. Tapi, awas, kemudahan itu adalah jebakan yang sengaja disediakan penyedia jasa Pinjol untuk menarik konsumennya.

WAKIL Ketua MPR RI, yang juga Anggota Komisi I DPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., yang akrab disapa Syarief Hasan mengingatkan masyarakat agar tidak berhubungan dengan Pinjaman Online (Pinjol). Masyarakat jangan tergiur dengan iming-iming kemudahan pinjaman yang ditawarkan pinjol. Dan, tidak mengotak-atik aplikasi Pinjol yang ada di gadget. Karena meminjam uang ke Pinjol berpotensi besar menimbulkan prahara, tidak memberikan kemudahan, tapi malah menghadirkan persoalan yang pelik di belakang hari.

Pernyataan itu disampaikan oleh Syarief Hasan pada saat menjadi narasumber pada acara Ngobrol Bareng Legislator, dengan tema: "Pinjaman Online : Manfaat dan Resiko bagi Pembiayaan UMKM". Acara tersebut berlangsung di GOR PGRI Desa Kademangan Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (5/2/2024).



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Tapi, bagi yang sudah terlanjur berurusan pinjol, Syarief Hasan menyarankan agar segera menyelesaikan pinjamannya, jangan

menunda-nunda. Karena Pinjol, menurut Syarief Hasan, tidak membantu menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah

baru yang lebih besar. “Apalagi jika penyelesaiannya ditunda-tunda,” katanya.

“Pokoknya, jangan sekali-kali melirik, apalagi mencoba-coba melakukan pinjaman kepada Pinjol, apapun alasan serta tujuannya. Tak terkecuali bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal. Kalau terpaksa harus meminjam untuk tambahan modal usaha, pinjam lah di tempat yang resmi dan aman, jangan sampai menyentuh pinjol,” kata Syarif Hasan mengingatkan.

Pinjol, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, ini hanya terlihat baik di depan. Aplikasi ini menjanjikan pinjaman yang mudah dan bisa cepat dicairkan. Pinjol tidak memerlukan persyaratan yang rumit, sebagaimana pinjaman di berbagai lembaga keuangan lain. Tetapi, kemudahan itu merupakan jebakan yang sengaja disediakan penyedia jasa Pinjol untuk menarik konsumennya. Karena, di kemudian hari, jenis pinjaman ini akan mencekik krediturnya dengan bunga pinjaman yang terus meningkat. Sehingga menimbulkan kerugian yang semakin besar.

“Bagi yang belum tersentuh Pinjol, jangan sekali-kali mencoba jenis pinjaman ini, apapun alasannya. Pikir masak-masak dahulu, jangan sesal kemudian. Masyarakat juga jangan terjebak pada investasi bodong,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

yang menjanjikan keuntungan besar. Karena bisnis seperti ini sudah memakan korban yang sangat banyak,” ungkapnya.

Pemerintah, kata Syarif Hasan harus turun tangan menangani maraknya Pinjol. Salah satu caranya adalah menyediakan alokasi pinjaman berbunga ringan dengan jumlah yang lebih besar, khususnya bagi para pelaku usaha menengah dan kecil.

“Pada era kepemimpinan Presiden Indonesia ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menyediakan Kredit Usaha Rakyat, dan itu sangat membantu para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal bagi usahanya. Cara-cara seperti itu harus dilakukan kembali, apabila kita ingin menyelesaikan persoalan Pinjol maupun lintah darat,” pungkasnya. □

Forum Diskusi Publik

Syarief Hasan: Kemiskinan Adalah Musuh Bersama

Pemerintah harus berani melakukan semua daya upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Negara harus memberikan perhatian ekstra, terlebih kepada seluruh warga miskin.

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., menegaskan bahwa kemiskinan adalah musuh bersama. Untuk mengatasinya, pemerintah telah dan akan terus berbuat untuk melawan kemiskinan yang ada di tengah masyarakat. Sementara masyarakat harus terus bekerja dengan giat agar tidak jatuh miskin. Masyarakat juga harus menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang tertinggi.

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, menurut politisi senior Partai Demokrat yang biasa disapa Syarif Hasan ini,





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pemerintah harus bekerja ekstra keras. Tanpa campur tangan pemerintah secara besar-besaran, jumlah penduduk miskin tidak akan berkurang dengan signifikan. Terbukti, selama pemerintahan Jokowi penurunan jumlah penduduk miskin relatif kecil, sekitar 1,5 %, dari angka 27,73 juta pada 2014 turun menjadi 26,36 juta pada 2022. Angka tersebut jauh di bawah capaian Pemerintah SBY yang berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 5 %, dari 15,97% (35,10 juta) pada 2005 menjadi 10,96% atau 27,73 juta pada 2014.

“Pemerintah sekarang beralasan karena konsentrasinya pada pembangunan infrastruktur. Sementara Pak SBY dulu melakukan segala daya upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Antara lain, pengangkatan pegawai honorer menjadi ASN, meningkatkan gaji TNI, Polri dan PNS, menekan harga BBM dan kebutuhan barang pokok, serta membuka lapangan kerja,” kata Syarif Hasan.

Pernyataan itu disampaikan Syarif Hasan saat menjadi pembicara pada Forum Diskusi Publik dengan tema: ‘Kemiskinan Ekstrem :

Potret, Strategi dan Upaya Penanggulangan.’ Acara tersebut berlangsung di Gor Futsal, Jl. Warung Bitung, Suka Jadi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (6/2/2024).

Ke depan, kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, ini pemerintah harus berani melakukan semua daya upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Negara harus memberikan perhatian ekstra terlebih kepada seluruh warga miskin.

“Kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat minim, jadi negara harus hadir membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya, hingga mereka memiliki pendapatan yang layak, adil dan merata, serta mampu memenuhi kebutuhan dari penghasilan yang dimiliki,” kata Syarif Hasan.

Agar pendapatan masyarakat meningkat, menurut Syarif Hasan, pemerintah harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan volume ekspor. Mendorong dan meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja, menambah belanja pembangunan agar pendapatan masyarakat juga turut bertambah. Imbasnya, jumlah penduduk miskin dan pengangguran pasti akan berangsur berkurang.

“Jika pendapatan masyarakat meningkat, niscaya pemasukan keuangan negara dari sektor pajak akan bertambah. Masyarakat juga bisa menabung untuk kebutuhan masa depan, atau berinvestasi,” pungkasnya. □



Sidang Pleno Istimewa Mahkamah Agung

Fadel Muhammad Apresiasi Kinerja MA dalam Penegakkan Hukum di Indonesia

Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung (MA) di bawah kepemimpinan Ketua MA Prof. Dr. Syarifuddin, SH., MH., dalam penegakkan hukum di Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung (MA) di bawah kepemimpinan Ketua MA Prof. Dr. Syarifuddin, SH., MH., dalam penegakkan hukum di Indonesia. Parameter kinerja yang diapresiasi Fadel

Muhammad, antara lain penyelesaian kasus lebih cepat, lebih terbuka dan transparan. "Itulah yang saya apresiasi. Ke depan, saya mengharapkan, kinerja MA jauh lebih baik dan lebih berkualitas dari semua sisi," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR

dari Kelompok DPD RI ini usai menghadiri Sidang Pleno Istimewa Mahkamah Agung (MA) dengan agenda penyampaian Laporan Tahunan MA Tahun 2023, di ruang Plenary Hall Jakarta Convention Centre, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Sidang Pleno Istimewa yang mengusung tema: 'Integritas Kuat Peradilan Bermartabat' ini dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Ketua MA Prof. Dr. Syarifuddin, SH., MH.; Wakil Ketua MA Bidang Yudisial; para Ketua Kamar MA; Hakim Agung; Hakim Adhoc; Serta para Ketua Mahkamah Agung dari Malaysia, Singapura, Kuwait, Wakil Ketua MA Qatar, Delegasi Sudan, Australia, China dan Rusia.

Turut hadir para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan dan anggota lembaga negara, Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., para duta besar negara sahabat, para purnabakti pimpinan MA, dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan undangan lainnya.

Lebih jauh, Fadel Muhammad mengungkapkan, satu hal yang sangat luar biasa dari kinerja MA yang didengarnya dari penjelasan Ketua MA di Sidang Pleno Istimewa tersebut, yakni MA menjadi pelopor dalam penerapan sistem berbasis IT dan digital.

Di antaranya, MA menerapkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibangun Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan melalui aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yang dikembangkan sumber daya manusia Indonesia di MA.

"Sekali lagi sebagai Pimpinan MPR, saya berharap agar MA menjaga kualitas kerjanya yang sudah dibangun saat ini, agar Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum yang





berkeadilan bukan hanya retorika semata tapi benar-benar terjadi,” tandasnya.

Usai menghadiri Sidang Pleno Istimewa MA, didampingi Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., Fadel Muhammad meninjau *booth* MPR RI, di acara Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung. Kepada mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu, Siti Fauziah menjelaskan bahwa partisipasi MPR dalam pameran Kampung Hukum MA untuk memperkenalkan kelembagaan MPR, serta program dan kegiatan-kegiatan MPR. □

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Lestari Moerdijat: Harus Konsisten Ditingkatkan

Keterwakilan perempuan di parlemen harus terus ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan lembaga legislatif dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi setiap warga negara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

UPAYA meningkatkan pendidikan politik dan sosialisasi pentingnya peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik harus konsisten dilakukan, agar perempuan Indonesia mampu menjawab sejumlah tantangan dalam proses berbangsa dan bernegara,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2).

Komisi Pemilihan Umum mencatat, bakal calon legislatif dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sebanyak 10.323. Dari total

tersebut, 37,7% (3.896 bakal calon legislatif perempuan dan 62,3% (6.427 bakal calon legislatif) laki-laki.

Pada Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 34,6% daftar calon tetap (DCT) anggota DPR adalah perempuan, kemudian meningkat menjadi 37% pada Pemilu 2014, dan pada Pemilu 2019 mencapai 40%.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI.

Lestari sangat berharap, hasil pemilihan umum 2024 menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, meski jumlah calon legislatif perempuan pada Pemilu 2024 cenderung turun bila dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong upaya pendidikan politik terhadap perempuan secara konsisten dilakukan, sehingga mampu mewujudkan peningkatan partisipasi perempuan dalam setiap pembuatan kebijakan publik.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, pendidikan politik terhadap perempuan diharapkan mampu menumbuhkan kepekaan, kesadaran dan komitmen dalam menegakkan keadilan gender.

Selain itu, tambah dia, juga meningkatkan pemahaman tentang advokasi kebijakan dan meningkatkan minat perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi/lembaga politik.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap agar pihak eksekutif dan legislatif terpilih pada Pemilu 2024 mampu mewujudkan keterwakilan 30% perempuan di parlemen, demi mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan keadilan dan kemakmuran masyarakat yang lebih merata. □

Rapat Tahun OJK

Bamsoet Optimistis Perekonomian Nasional Meningkat Pasca Pemilu 2024

Stabilitas politik merupakan modal utama bagi pembangunan ekonomi nasional sekaligus modal utama stabilnya industri jasa keuangan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, optimistis situasi perekonomian nasional akan meningkat seiring kepercayaan investor

yang berbanding lurus keamanan dan kondusifitas nasional pasca Pemilihan Umum 2024. Terlebih angka ekonomi makro Indonesia masih menunjukkan hasil yang baik. Ekonomi Indonesia masih bisa mencapai 5,05% pada 2023, dengan tingkat inflasi

sebesar 2,61 secara year on year (YoY).

“Para elite politik dan pendukungnya jangan sampai melakukan tindakan yang membuat situasi menjadi tidak stabil, sehingga dapat menyebabkan ketidakpercayaan para investor, apalagi sampai membuat investor lari. Stabilitas politik merupakan modal utama bagi pembangunan ekonomi nasional sekaligus modal utama stabilnya industri jasa keuangan,” ujar Bamsoet usai menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024, di Jakarta, Senin (20/2/24).

Turut hadir, antara lain Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pemerintahan pengganti Presiden Joko Widodo telah memiliki pondasi kuat dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Antara lain dengan positifnya kinerja industri jasa keuangan membaik. Salah satunya ditunjukkan dengan kredit perbankan yang bisa tumbuh double digit dan ekonomi Indonesia juga tumbuh masih sangat baik, yaitu 5,05%.

“Selain itu, cadangan devisa mencapai USD 145 juta, serta neraca dagang surplus Rp 570 triliun. Dengan modal ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo yang telah memenangkan Pemilu presiden berdasarkan quick count berbagai lembaga survei, nantinya bisa langsung tancap gas,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPP/ Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menambahkan, pemerintahan yang akan datang masih memiliki pekerjaan besar, yakni mewujudkan



cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Untuk dapat dikategorikan sebagai negara maju, pendapatan perkapita yang harus dicapai oleh suatu negara adalah minimal sebesar 11.906 dolar AS per tahun. Tingginya pendapatan per kapita ini juga dibarengi dengan angka kemiskinan yang

relatif rendah.

“Di negara maju, setiap warga negara yang berusia produktif memperoleh jaminan mendapatkan pekerjaan. Beberapa contoh negara maju dengan tingkat pengangguran terendah, di antaranya Singapura dan Swiss dengan tingkat pengangguran 2%,

serta Jepang dan Korea Selatan dengan tingkat pengangguran 2,5%. Sementara di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) saat ini mencapai 5,32% per Agustus 2023. Butuh kerja keras untuk menurunkannya seperti di berbagai negara maju,” pungkas Bamsuet. □

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Lestari Moerdijat: Menuntut Keseriusan Semua Pihak

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus terus ditingkatkan melalui pelaksanaan kebijakan yang menyeluruh dan terpadu di tingkat pusat dan daerah.

MASIH relatif tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak menuntut keseriusan semua pihak dalam upaya pencegahan, pelaksanaan sejumlah kebijakan dan kesiapan aparatur dan masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan yang terjadi saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/2).

Berdasarkan catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki. Dari ribuan jumlah kasus tersebut, kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak 2019 sampai 2023.

Sebagai bentuk realisasi dari amanah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mewajibkan pembentukan unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA), saat ini unit layanan itu sudah terbentuk di 34 dari 39 provinsi di Indonesia.

Menurut Lestari, sejumlah kebijakan dan aturan hukum terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, harus mampu diterapkan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dengan sebaik-baiknya. Perangkat hukum dan masyarakat, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, juga harus terus diedukasi agar mampu mengaplikasikan sejumlah kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ada.

Karena, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, anak sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan lingkungan yang menjamin tumbuh kembangnya bisa

optimal, baik dari sisi fisik maupun mentalnya, agar mampu mewujudkan anak bangsa yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat komitmennya dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan di tanah air, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang lebih baik. □

Menghadapi Potensi Lonjakan Wisatawan

Antisipasi Perkembangan Sektor Pariwisata Harus Direncanakan Secara Matang

Dorong pengembangan infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dalam upaya mengantisipasi perkembangan sektor pariwisata nasional dan dunia yang diperkirakan meningkat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

UPAYA antisipasi perkembangan sektor pariwisata nasional harus direncanakan dengan matang, jangan sampai terjadi ketidaksiapan dalam menyambut gelombang kedatangan wisatawan yang diperkirakan meningkat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Ahad (25/2).

Organisasi Pariwisata Dunia (United Nation World Tourism Organization/UNWTO) memperkirakan 2024 akan menjadi rekor kedatangan wisatawan internasional di seluruh dunia. Membludaknya jumlah wisman berdampak besar terhadap destinasi-destinasi mainstream.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan kedatangan 14 juta wisatawan mancanegara dengan devisa pada 2024 diperkirakan berkisar US\$ 7,38 miliar-US\$ 13,08 miliar. Selain itu, target nilai ekspor ekonomi kreatif tercatat US\$ 27,53 miliar.

Capaian pada rentang Januari-Juni 2023 devisa dari pariwisata Indonesia tercatat US\$ 6,08 miliar dan nilai ekspor ekonomi

kreatif pada rentang waktu yang sama tercatat US\$ 11,82 miliar.

Menurut Lestari, sejumlah target tersebut harus diikuti dengan strategi dan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan daerah-daerah tujuan wisata yang berpotensi sebagai tujuan favorit para wisatawan.

Sejumlah kawasan wisata super prioritas yang telah dicanangkan, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar mampu mengantisipasi peningkatan permintaan yang diperkirakan.

Sejumlah destinasi di tanah air, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, juga harus mampu melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan kawasan wisatanya.

Tujuan wisata Amsterdam, Belanda, dan Hawaii, Amerika Serikat misalnya, tambah Rerie, bahkan sudah mengalami overtourism, karena kedatangan wisatawan sudah melebihi daya tampung kawasan wisatanya.

Indonesia, ujar Rerie, yang memiliki banyak

pilihan kawasan wisata yang indah dan menarik harus mampu menerapkan langkah strategis yang mampu mengatasi potensi kesenjangan sosial antara warga lokal dan pendatang, hingga potensi overtourism itu, di sejumlah kawasan wisata yang ada.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kolaborasi yang kuat antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus diwujudkan agar mampu menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas SDM, melestarikan lingkungan kawasan wisata, sekaligus infrastrukturnya yang mendukung pencapaian target sektor pariwisata nasional. □

Pengembangan Desa Wisata Jangan Abaikan Kearifan Lokal

Pada kesempatan lain, dalam keterangan tertulisnya (Kamis, 22/2), Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan, rencana pembentukan desa wisata di sejumlah daerah di tanah air jangan mengabaikan kearifan lokal dalam proses pengembangannya.

"Rencana pemerintah mengembangkan desa wisata di tanah air harus mendapatkan dukungan penuh, dengan proses pengembangan pariwisata, lingkungan dan budaya yang seimbang. Jangan sampai mengabaikan kearifan lokal yang ada di setiap desa wisata tersebut," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dari 80.000 lebih desa di tanah air, sekitar 7.500 desa dinilai memiliki potensi di sektor wisata. Namun, pada tahun 2024 Kemenparekraf berencana membentuk 6.000 desa wisata. Desa wisata yang dibentuk itu diharapkan dapat menyumbang 4,5% pendapatan domestik bruto (PDB) nasional.



Dalam pengembangan desa sebagai kawasan tujuan wisata, ujar Lestari, aspek sosial dan kelestarian lingkungan desa

tersebut harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai, tegas Rerie, kedatangan para wisatawan ke desa-desa memberi

dampak negatif dalam kehidupan masyarakat desa.

Sejumlah kajian terkait sosial dan lingkungan hidup masyarakat desa, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus menjadi dasar pertimbangan dalam proses membangun desa wisata di sejumlah daerah.

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) pariwisata di setiap daerah, ujar Rerie, harus segera dipastikan agar pengembangan desa wisata dapat mewujudkan keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup, serta budaya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, kolaborasi yang solid antar-pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk merealisasikan desa wisata yang berkelanjutan dan mengedepankan kearifan lokal. □

Terima Pengurus PERPEDIN

Bamsoet Ajak Tingkatkan Perekonomian Nasional

Diperkirakan hanya 7,6 juta jiwa dari 17 juta jiwa disabilitas usai produktif yang bekerja di sektor formal dan informal. Untuk semakin menggerakkan mereka terjun ke dunia usaha perlu adanya dukungan dari pemerintah.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi keberadaan Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia (PERPEDIN) yang telah menjadi wadah bagi para penyandang

disabilitas untuk mandiri secara ekonomi serta turut membuka lapangan kerja. Membuktikan bahwa menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk turut berkontribusi menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, serta menyejahterakan

masyarakat di lingkungannya masing-masing.

“Badan Pusat Statistik mencatat, pada tahun 2022 terdapat 22,5 juta jiwa disabilitas atau sekitar 8,5% dari populasi penduduk Indonesia. Naik dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 16,5 juta jiwa. Diperkirakan hanya 7,6 juta jiwa dari 17 juta jiwa disabilitas usai produktif yang bekerja di sektor formal dan informal. Untuk semakin menggerakkan mereka terjun ke dunia usaha perlu adanya dukungan dari pemerintah. Khususnya terkait akses pemodal hingga pemasaran produk yang dihasilkan,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus PERPEDIN, di Jakarta, Rabu (28/2/24).

Pengurus PERPEDIN yang hadir, antara lain Ketua Umum Bambang Susilo, Wakil Ketua Umum Arfan, Wakil Ketua Umum Pranyoto Agung, Sekretaris Trisa, dan Bendahara Yohana.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap disabilitas tidak perlu diragukan. Salah satunya diperlihatkan dengan membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada tahun 2021, sebagai pelaksanaan amanat UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Sesuai Pasal 132 UU No. 8/2016, KND memiliki tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang hasilnya dilaporkan langsung kepada presiden. Sehingga kedudukan KND sangat kuat,” jelas Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selain UU Nomor 8/2016, keberpihakan hukum baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terhadap penyandang disabilitas juga sudah banyak sekali. Pada tahun 2019 terdapat PP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Serta PP tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlin-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pada tahun 2020 ada PP tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; PP tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan, PP tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas serta PP tentang Unit Layanan

Disabilitas Ketenagakerjaan.

“KND serta berbagai organisasi seperti PERPEDIN punya tugas berat memastikan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut tidak hanya berakhir di atas kertas saja. Melainkan juga harus diimplementasikan oleh berbagai stakeholder terkait. Sehingga para penyandang disabilitas tidak merasa terasingkan tinggal di negerinya sendiri,” pungkas Bamsuet. □

Bincang-bincang di Bukit Podomoro

Pemanfaatan Kearifan Lokal Langkah Strategis Mewujudkan Ketahanan Nasional

Pemanfaatan kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga kesehatan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan nasional.

REMPAH-REMPAH yang merupakan bagian dari kearifan lokal yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bahan baku jamu harus dilestarikan dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada acara bincang-bincang Super Drink dan Minuman Herbal untuk Kesehatan, di Bukit Podomoro, Jakarta Timur, Minggu (3/3).

Pada acara tersebut juga diperkenalkan mie instan dari sagu, kue lapis legit dengan





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bahan tepung ganyong serta teh dan minyak dari bahan sachi inchi atau kacang Inka (dari hutan tropis Amazon, Peru), yang sudah dibudidayakan di Indonesia.

Menurut Lestari, Indonesia banyak sekali memiliki alternatif sumber pangan, antara lain ganyong dan sagu yang tepungnya bisa diolah menjadi kue dan mie instan dengan kandungan gizi yang memadai.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengajak semua pihak untuk secara aktif mengambil peran dalam pemanfaatan kearifan lokal, baik berupa rempah-rempah dan bahan pangan selain beras, agar masyarakat tidak ketergantungan terhadap satu sumber bahan pokok saja.

Selain itu, ujar Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, pemanfaatan

rempah-rempah juga harus dijadikan bagian dari upaya meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat.

Rerie mendorong agar pemanfaatan bahan pangan alternatif dan jamu bisa diproduksi memenuhi skala ekonomi dan industri, sehingga manfaat dari jamu dan bahan pangan alternatif bisa dinikmati setiap anggota keluarga di Indonesia.

Bila setiap anggota keluarga terpenuhi kebutuhan pangannya, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kualitas kesehatan keluarga itu pun akan terus meningkat.

Dengan bermodal keluarga yang sehat, tegas Rerie, kita bisa membangun lingkungan dan masyarakat yang sehat. Bila seluruh masyarakat kita sehat, jelas dia, tentu saja akan memperkuat ketahanan nasional kita dalam menghadapi berbagai tantangan.

Karena itu, tegas Rerie, langkah untuk menyadarkan setiap anak bangsa agar memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya membangun ketahanan nasional merupakan upaya yang harus segera direalisasikan. □



Umroh Backpacker

HNW Kritisi Agar Regulasi Soal Umrah Mandiri Direvisi

WAKIL Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang di antaranya membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, mengusulkan agar aturan soal penyelenggaraan umrah yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, segera direvisi. Hal ini menyusul terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi yang mengizinkan pelaksanaan umrah menggunakan visa turis, sehingga masyarakat kini bisa melaksanakan umrah mandiri, yang populer disebut umrah backpacker, secara lebih mudah tapi juga tetap bertanggung jawab.

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, menambahkan, perbaikan aturan soal Penyelenggaraan Ibadah Umrah ini sejalan dengan agenda di Komisi VIII DPR-RI yang memang sudah memasukkan revisi UU 8/2019 tersebut sejak akhir tahun 2022 ke dalam Prolegnas DPR-RI.

“Secara umum, kebijakan haji dan umrah Arab Saudi semakin terbuka lebar untuk kedatangan jemaah, sehingga Pemerintah Indonesia harusnya antisipatif dengan menyiapkan aturan yang juga memudahkan jemaah. Apalagi, Pemerintah bersama DPR juga sedang merancang revisi UU Haji dan Umrah untuk memudahkan fleksibilitas penyelenggaraan haji, di mana fleksibilitas tersebut bisa turut diberikan pada pelaksanaan umrah,” ujar HNW di Jakarta, Rabu (21/2).

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menjelaskan, dalam UU 8/2019, di Pasal 86 ayat (1) dan (2), penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yakni Travel Biro yang terdaftar dan berizin di Kementerian Agama.

Namun, dengan kebijakan visa turis Arab Saudi, warga yang ingin umrah kini bisa mengakses langsung dengan cukup memesan tiket pesawat dan mendaftarkan diri di Aplikasi Nusuk yang disediakan dan disosialisasikan oleh pihak Pemerintah Arab Saudi.

“Artinya, kini sangat mudah bagi warga dunia, termasuk Indonesia, untuk menjalankan ibadah umrah. Dan, itu sudah dinikmati para calon jemaah umrah dari seluruh dunia. Itulah yang juga disampaikan/diaspirasikan oleh



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berbagai pihak calon jemaah umrah, saat saya melaksanakan reses. Sehingga saya usulkan agar Pasal 86 UU 8/2019 yang rigid itu, untuk diubah dengan memasukkan poin bolehnya penyelenggaraan ibadah umrah oleh perseorangan atau kelompok masyarakat. Agar umrah backpacker tidak dilarang lagi, karena Arab Saudi bahkan sudah membolehkan. Tentunya ketentuan baru itu juga tetap mengharuskan hadirnya negara untuk melindungi semua warga bangsa, termasuk jemaah umrah mandiri/backpacker itu,” katanya.

Dia meyakini, jika umrah mandiri dilegalisasi, tidak terlalu berdampak negatif pada pendaftaran keberangkatan umrah melalui Travel Biro. Pasalnya, masing-masing Travel Biro sudah memiliki ceruk jemaahnya sendiri dengan beragam fitur

pelayanan. Regulasi baru itu nantinya malah bisa mendorong untuk makin profesionalnya Travel Biro Umrah, sehingga tidak mengulangi masalah jemaah umrah.

Kebijakan umrah mandiri itu malah bisa mengoreksi dan menghapuskan Travel Biro Umrah bermasalah bahkan bodong, yang menjanjikan keberangkatan dengan harga murah, tapi ternyata tidak melaksanakan janji yang dikampanyekan, sehingga menimbulkan banyak masalah dan kerugian terhadap jemaah umrah. Sebab, dengan adanya regulasi yang baru nantinya, para jemaah akan memilih untuk umrah mandiri dibandingkan terpapar risiko gagal berangkat, atau gagal melaksanakan umroh dengan baik dan benar.

Selain itu, jika melihat wisata religi agama lain, tidak ada aturan wisata religi ibadah lain harus melalui travel biro, atau larangan wisata religi backpacker. Namun, faktanya, travel biro wisata religi di luar haji-umrah juga berkembang dan tetap dapat tumbuh subur di Indonesia.

“Dengan semakin panjangnya antrean haji, umrah atau biasa dianggap sebagai haji kecil adalah solusi mengatasi kerinduan jemaah Indonesia untuk ke tanah suci. Pemerintah harusnya memfasilitasi dengan membuka seluruh opsi penyelenggaraan, termasuk keberangkatan mandiri (backpacker), dengan tetap memaksimalkan kewajiban negara melindungi warganya. Apalagi opsi umrah mandiri ini dibuka lebar oleh pihak Arab Saudi,” pungkasnya. □



Kunjungi The Diplomat Tailor and Batik Gallery

Bamsoet Ajak Lestarkan Batik Indonesia

Sebagai budaya asli Indonesia, batik tidak Cuma dikagumi di Indonesia saja, tetapi juga disukai oleh orang luar negeri. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa untuk melestarikan batik sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah The Diplomat Tailor and Batik Gallery yang turut melibatkan berbagai UMKM dalam memproduksi jas, batik, dan beragam fashion yang diproduksinya. Visi The Diplomat Tailor and Batik Gallery terhadap fashion ditambah visi kewirausahaan yang kuat membuat The Diplomat Tailor and Batik Gallery menjadi bisnis yang sukses seperti sekarang ini.

“The Diplomat Tailor and Batik Gallery memiliki beragam pilihan bahan kain hingga kualitas premium Ditunjang tangan handal para pekerjanya dalam menjahit, menjadikan The Diplomat Tailor and Batik Gallery dibanjiri para konsumen dari berbagai kalangan. The Diplomat Tailor and Batik Gallery juga memiliki keunggulan dalam memberikan super fast service. Membuat jas atau kemeja batik hanya dalam waktu 1x24 jam, tanpa mengurangi kualitas jahitan,” ujar Bamsoet saat mengunjungi The Diplomat Tailor and

Batik Gallery langganannya di Jakarta, Senin (4/3/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mendukung kepedulian The Diplomat Tailor and Batik Gallery terhadap pelestarian batik dengan menggunakan bahan batik yang didapat dari para pengrajin di berbagai daerah, bukan melalui impor dari negara lain. Batik adalah kekayaan nasional. Bahkan pada 2 Oktober 2009 UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda manusia karena kaya dengan simbol dan makna filosofi kehidupan rakyat Indonesia.

“Batik merupakan budaya asli Indonesia dengan motif yang sangat banyak dan beraneka ragam. Bahkan, setiap daerah memiliki motif atau corak batik yang khas. Berbeda antardaerah. Sebagai budaya asli Indonesia, batik sangat dikagumi oleh banyak orang. Tidak cuma di Indonesia saja, tetapi juga disukai oleh orang luar negeri. Karena kewajiban seluruh elemen bangsa untuk melestarikan batik sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa,” kata Bamsoet.

Pendiri Black Stones Cargo Airlines, Black Stone Marine Batam, Black Stone Culinary Apartemen Surabaya (Black Stone Group), dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, batik khas Indonesia berbeda dengan batik printing asal Cina yang langsung dicetak mesin, tanpa proses filosofis dalam proses pengerjaannya. Batik khas Indonesia lebih memiliki nilai filosofis sejak awal proses pembuatan. Mulai dari pembuatan malam (lilin), pewarnaan, sampai pelepasan lilin dari kain.

“Potensi ekspor pasar batik masih luas sekali. Berbagai promosi terus dilakukan berbagai pihak. Mulai dari mengikuti event pariwisata dan industri kerajinan internasional, sampai dengan pemberian souvenir kain batik untuk para tamu negara. Semua dilakukan untuk lebih mengenalkan batik ke dunia internasional,” pungkas Bamsoet. □



Jalan Untuk **Menguatkan** MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sejumlah anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan dan pakar membahas bagaimana memperkuat MPR. Banyak teori hukum yang dipaparkan untuk menguatkan MPR. Ada yang menyebut MPR berwenang menerbitkan TAP MPR. Dua mantan Wakil Ketua MPR hadir dalam acara itu.

DIAKHIR tahun 2023, Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR, bertempat di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, menggelar Rapat Kelompok. Dalam rapat itu hadir puluhan anggota K3, di antaranya adalah E.E. Mangindaan, Ahmad Farhan Hamid, Wahidin Ismail, Fuad Bawazier, dan Martin Hutabarat.

Dalam kesempatan itu, ada pemaparan makalah dari Dr. Qurrata Ayuni, S.H., M.CDR., L.LM. Tema dari makalahnya adalah *Penguatan MPR*. Di awal pemaparannya, Ayuni mempertanyakan tiga hal terkait *Implied Authority* dalam Pandangan Politik dan Hukum. Ketiga hal itu adalah: Pertama, apakah konsep *implied authority* tidak bertentangan dengan prinsip konstiusionalisme (pembatasan kekuasaan oleh konstitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak bertentangan dengan sistem hukum Indonesia? Kedua, bagaimanakah implementasi konsep *implied authority* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Ketiga, bagaimanakah kajian perbandingan terkait dengan *implied authority* di negara lain?

Dijelaskan oleh Ayuni, sudah menjadi perdebatan sejak zaman

Chief Justice Marshall pada tahun 1819 yang memberikan perluasan mengenai *enumerated power* yang dimiliki oleh *Congress* untuk membentuk National Bank/ Bank Federal.

Lebih lanjut dikatakan, John Marshall dalam keputusan Mahkamah Agung dalam *McCulloch v. Maryland*, menyebut secara tegas memaksudkan kekuasaan tersirat sebagai kekuasaan tambahan (derivatif, tambahan), yang hanya ada melalui implikasinya dalam kekuasaan yang diberikan secara tegas. Beliau berfokus pada tujuan mereka dan berkata: “Jika tujuannya sah, dan dalam lingkup Konstitusi, semua cara, yang secara jelas disesuaikan dengan tujuan tersebut, dan yang tidak dilarang, secara konstitusional dapat digunakan untuk melaksanakannya.” Kalimat ini menjadi prinsip panduan Mahkamah Agung dan sering dikutip kata demi kata dalam keputusan-keputusan selanjutnya.

Ayuni mengungkapkan, beberapa teori implikasi. Pertama, doktrin implikasi didasarkan pada aksioma bahwa norma-norma konstitusional yang memberdayakan atau membatasi harus mengimplikasikan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk



merealisasikannya.

Kedua, hal ini memungkinkan untuk menetapkan “kekuasaan atau pembatasan melalui implikasi” dalam ketentuan konstitusional eksplisit yang telah berlaku sejak awal. Ketiga, hal ini membutuhkan titik acuan khusus dalam teks konstitusi, yang mungkin dalam ketentuan individu atau dalam kelompok ketentuan. Keempat, dalam situasi apa pun, hal tersebut tidak dapat membenarkan kekuasaan tambahan atau pembatasan yang tidak secara implisit terkandung dalam teks konstitusional.

Selanjutnya, ia mengutip pendapat Marshall yang menyatakan bahwa Konstitusi tidak secara eksplisit memberikan izin untuk membentuk bank federal, tetapi Konstitusi memberikan Kongres kewenangan tersirat untuk melakukannya di bawah *Clausul Necessary and Proper*, sehingga Kongres dapat merealisasikan atau memenuhi

kewenangannya untuk memungut dan membelanjakan pajak. Kasus ini menegaskan kembali pandangan Hamilton bahwa legislasi yang secara wajar terkait dengan kekuasaan yang tersurat adalah konstitusional.

Diuraikan tulisan Marshall: Kami mengakui, seperti yang harus diakui oleh semua orang bahwa kekuasaan Pemerintah terbatas, dan bahwa batas-batasnya tidak boleh dilampaui. Tetapi kami pikir konstruksi yang baik dari Konstitusi harus memberikan keleluasaan kepada badan legislatif nasional mengenai cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan kekuasaan yang diberikannya, yang akan memungkinkan badan tersebut melaksanakan tugas-tugas besar yang ditugaskan kepadanya dengan cara yang paling bermanfaat bagi rakyat. Biarlah tujuannya sah, biarlah berada dalam lingkup Konstitusi, dan semua cara yang sesuai, yang jelas disesuaikan dengan tujuan

itu yang tidak dilarang, tetapi konsisten dengan isi dan semangat Konstitusi adalah konstitusional.

Dalam kesempatan tersebut, Ayuni menyampaikan beberapa ‘cara’ menafsirkan UUD NRI Tahun 1945, dengan lewat *Regular Session, Irregular Session, Literature Empowerment, dan Regular Session*.

Diuraikan *Regular Session* sebagaimana *Constitutional Council*, seperti yang ada di Prancis, tidak semua Draft UU wajib untuk diuji ke *Constitutional Council*. Sedangkan sisa draft UU lainnya hanya perlu ditafsirkan apabila diminta oleh Perdana Menteri. Namun, sejak 2010, *Constitutional Council* juga dapat diminta oleh WNI untuk melakukan *review* terhadap UU jika dianggap melanggar hak *constitutional*.

Sementara yang *Irregular Session*, jika diminta di Mahkamah Konstitusi (Pasal 54 UU MK), Mahkamah Konstitusi dapat meminta



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. "Jika diminta oleh lembaga negara untuk memberikan penjelasan mengenai tafsir konstitusional," ujarnya.

Ayuni selanjutnya memaparkan *Literature Empowerment*. Dikatakan, anotasi terhadap penafsiran pasal-pasal UUD 1945 melalui publikasi resmi yang dilakukan oleh MPR dalam bentuk literatur yang terarah. Hal ini dapat dilakukan sebagai bagian dari kajian terhadap UUD NRI Tahun 1945. Seandainya pun ada perintah untuk mengikat kewenangan tafsiran tersebut maka perlu ada pengkajian terhadap sanksi dan eksekusinya.

Terkait Konvensi Ketatanegaraan dan Sidang Tahunan MPR, dalam makalahnya disebutkan "Unwritten constitution" (konstitusi tidak tertulis), mengacu pada sistem konstitusi di mana sebagian besar aturan dan prinsip konstitusional tidak diatur dalam satu dokumen tertulis tunggal. Seperti konstitusi tertulis, tetapi dalam norma, konvensi, putusan pengadilan, kebijakan, dan praktik yang berkembang sepanjang waktu. Konstitusi tidak tertulis ini cenderung

menjadi produk sejarah, tradisi, dan praktik politik negara tersebut.

Hubungan antara "unwritten constitution" dan "konvensi ketatanegaraan" adalah bahwa konvensi ketatanegaraan merupakan salah satu elemen utama dalam konstitusi tidak tertulis. Konvensi ketatanegaraan adalah norma atau aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan, pejabat tinggi negara, dan pemangku kepentingan politik dalam suatu negara. Ini adalah bagian penting dari konstitusi tidak tertulis dan sering kali dihormati sebagai bagian integral dari praktik politik dalam sistem politik tertentu.

Lebih lanjut dikatakan, Konvensi Ketatanegaraan dan Sidang Tahunan MPR, dalam sistem konstitusi tidak tertulis, konvensi ketatanegaraan membantu mengisi celah yang ditinggalkan oleh ketiadaan konstitusi tertulis yang rinci. Mereka juga menciptakan norma-norma politik yang mengikat dan memengaruhi cara pemerintah dan lembaga-lembaga lain beroperasi dalam praktiknya.

Sidang Tahunan MPR merupakan kreasi ketatanegaraan yang diinisiasi oleh MPR dengan harapan setiap lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang oleh

undang-undang dasar dapat menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat. Walaupun pidato disampaikan dalam forum Sidang Tahunan MPR, laporan kinerja tidak ditujukan kepada MPR, tetapi kepada rakyat.

Dalam kesempatan tersebut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sina Chandranegara, juga menyampaikan makalah. Makalahnya berjudul: *RUU MPR: Implied Authority, Tafsir UUD 1945, Konvensi Ketatanegaraan, dan Tap MPR*.

Di awal makalahnya, ada empat pertanyaan yang diajukan, yakni: Apakah RUU MPR dapat menerapkan konsep *implied authority*? Tafsir UUD NRI Tahun 1945 dimiliki MPR dan tepat mengaturnya di RUU MPR? Sidang tahunan dan Konvensi Ketatanegaraan MPR?, dan Penerbitan TAP MPR kembali oleh MPR?

Diuraikan oleh Ibnu, MPR merupakan *Constitutional Identity Indonesia*. Mengutip pendapat Gary Jeffrey Jacobsohn (2006) yang menyebutkan, sebagai *constitutional identity yang dimaknainya sebagai the specific identity of any given constitution. Representing a mix of aspirations and commitments expressive of a nation's past, constitutional identity also evolves in ongoing political and interpretive activities in courts, legislatures, and other public and private domains*.

Pendapat dari Aidul Fitriada Azhari (2014) mengaitkannya tradisi bernegara yang mungkin saja dipengaruhi oleh modernisasi, sehingga tradisi bisa saja bergeser atau justru menjadi etno-nasionalisme.

Dalam doktrin, *constitutional identity* sendiri dapat dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu: Bentuknya yang fundamental, bentuknya yang instrumental, dan bentuknya yang alamiah. "MPR dapat dilekatkan sebagai identitas konstitusi Indonesia," ujarnya.

Dalam makalahnya, Ibnu bertanya, apakah RUU MPR dapat menerapkan doktrin *implied authority*? Dijawabnya, *implied authority* atau kewenangan tersirat merupakan bentuk



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“bayangan” (*shadow*) dari *express authority* (*enumerated*). *Implied authority* ditemukan dan digunakan untuk membuat norma konstitusi menjadi elastis atas sesuatu yang sudah terang maknanya. Doktrin ini umumnya melekat pada pemegang kekuasaan asli negara yang alasan pembenarnya adalah prinsip perlu dan patut (*necessary and proper*).

Dalam konteks UU MPR maka penggunaan doktrin ini menjadi lazim dikarenakan pemenuhan pelaksanaan kewenangan yang telah jelas diatur atau kewenangan tersirat

yang melekat atas wewenang yang jelas melekat. “Salah satu kelemahan *implied power* terjadi dipraktikkan di Venezuela ketika masa pemerintahan Uribe (2002) dan Chavez di Kolombia (1999)”, tuturnya.

Terkait tafsir UUD dan RUU MPR dijelaskan, Hak tafsir UUD 1945 dimiliki oleh semua lembaga atau orang, namun hak tafsir final tidak dimiliki oleh MPR menurut UUD 1945, melainkan oleh MK. Tafsir final yang dilakukan oleh MK dijamin oleh UUD 1945 sehingga tafsir UUD 1945 yang di miliki MPR dapat diatur dan dimiliki oleh MPR, namun



tidak bersifat final, hanya mengikat.

Dijelaskan, terkait Sidang Tahunan dan Konvensi Ketatanegaraan MPR, konvensi ketatanegaraan memiliki sifat-sifat non legal rules. Tujuan konvensi dikehendaki, antara lain: (i) keinginan meneruskan tradisi pemerintahan konstitusional, (ii) keinginan untuk mempertahankan jalannya roda pemerintahan yang rumit agar tetap berjalan secara teratur, dan (iii) keinginan untuk mempertahankan kepercayaan publik dan kekuasaan. Seketika perihal sidang tahunan diatur dalam suatu UU maka itu bukan lagi dipadankan dengan Konvensi Ketatanegaraan.

Dalam makalahnya, Ibnu bertanya, apakah MPR masih dapat mengatur dan/atau membuat produk hukum yang berlaku keluar (*external regelingen*)? Dijawab oleh Ibnu, pada prinsipnya lembaga negara merupakan *regulatory body*. Penjelasan Pasal 7 UU Pembentukan UU menafsirkan Pasal 2 dan 3 dan aturan tambahan Pasal I secara restriktif. MPR masih dapat menerbitkan Ketetapan MPR lagi meski telah tersedia Tap MPR No I/ MPR/2003, namun persoalannya, apabila masih dapat menerbitkan TAP MPR diluar Tap MPR No I Tahun 2003, maka Tap MPR satu-satunya peraturan per-undang-undangan yang tidak dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman.

Di akhir makalah, dia memberi catatan akhir. Pertama, MPR merupakan *Constitutional Identity* Indonesia. Kedua, *Implied Authority* merupakan doktrin umum yang dapat diterapkan dalam menentukan dan me-“nafsirkan” kewenangan tersirat MPR. Ketiga, Tafsir UUD 1945 merupakan *Implied authority* MPR namun tidak bersifat final, hanya mengikat. Keempat, Konvensi Ketatanegaraan bersifat *non legal rules*, kesadaran padanya tidak hanya bersifat *rigid*, tapi juga *flexible*, namun apabila diatur dalam UU kaidah konvensi berubah menjadi *legal rules*. Kelima, MPR berwenang menerbitkan TAP MPR, terlepas restriksi penjelasan Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. □



Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI

Peduli pada Stunting, Anak Putus Sekolah dan Kematian Ibu-Bayi

KETIKA hampir semua komunitas bergerak cepat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, negara-bangsa mengingatkan untuk terus bekerja sungguh-sungguh menuntaskan pembangunan manusia Indonesia. Negara patut memberi perhatian lebih kepada komunitas warga yang lemah dan berkekurangan, dengan berpijak pada data-data resmi tentang kematian ibu dan bayi, data stunting, hingga data tentang anak putus sekolah.

Kewajiban negara-bangsa bagi pembangunan jiwa-raga segenap warga negara sudah ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Pasal ini menetapkan perintah kepada negara untuk peduli pada komunitas warga yang lemah dan berkekurangan, dengan kewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan dapat hidup layak seturut martabat kemanusiaan.

Kewajiban negara itu sudah dilaksanakan dari waktu ke waktu melalui aneka program pembangunan berkelanjutan. Komitmen untuk melaksanakan kewajiban itu pun terus diperbarui, antara lain dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hasil atau progresnya bisa dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Sebagaimana telah dilaporkan, sepanjang periode 2010-2022, IPM Indonesia rata-rata meningkat

sebesar 0,77% per tahun.

Kerja dan kepedulian terhadap masalah ini tentu saja patut diapresiasi. Apalagi, dilaporkan juga bahwa semua dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang, hidup sehat serta standar hidup layak. Harapan hidup bayi membaik. Begitu juga dengan peluang untuk mengenyam pendidikan atau bersekolah. Kehidupan layak berdasarkan pengeluaran ril per kapita pun dilaporkan terus membaik.

Namun, kewajiban dan pekerjaan negara membangun manusia Indonesia itu, hingga kini, belum dapat dituntaskan. Itu sebabnya, di setiap lingkungan kehidupan bersama hingga hari-hari ini masih ada bayi kurang gizi (stunting), anak usia sekolah yang putus sekolah karena beberapa alasan, hingga masalah kematian ibu dan bayi.

Masalah seperti itu umumnya dialami atau dihadapi oleh warga negara yang berkekurangan atau lemah dari aspek ekonomi. Demikian lemahnya sehingga mereka tak mampu untuk sekadar memenuhi kecukupan standar gizi atau membiayai kebutuhan sekolah. Negara harus selalu hadir – bahkan boleh melakukan intervensi— untuk mengatasi persoalan ini agar tidak ada warga negara atau komunitas yang terpaksa ditinggalkan oleh percepatan proses pembangunan yang menjadi tuntutan perubahan zaman.

Ketika peradaban sudah mencapai era digitalisasi

pada berbagai aspek kehidupan seperti sekarang ini, model persoalan seperti bayi kurang gizi, anak putus sekolah hingga persoalan yang melatarbelakangi kematian ibu dan bayi idealnya bisa diminimalisir oleh tindakan atau kebijakan intervensi negara. Bahkan, negara pun hendaknya memprioritaskan masalah ini agar tidak ada komunitas yang tertinggal – apalagi terabaikan – di tengah percepatan proses pembangunan berkelanjutan sebagai tanggapan atas perputaran roda perubahan zaman.

Model persoalan ini bisa ditangani dengan baik sejauh ada kehendak baik, kepedulian, dan kesungguhan dalam menjangkau mereka yang lemah dan berkekurangan, karena mereka ada di setiap lingkungan kehidupan bersama. Bisa tertangani dengan baik karena negara mampu serta memiliki daya dan infrastruktur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini.

Masalah kematian ibu dan bayi menjadi indikator yang menggambarkan baik-buruknya wajah kesehatan suatu negara. Di Indonesia, sebagaimana pernah diungkap oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka kematian ibu dan bayi ada di peringkat tiga besar dalam lingkungan ASEAN. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan kematian bayi tercatat mencapai 16,85 per 1.000 kelahiran hidup.

Masalah stunting tetap menuntut perhatian lebih. Langkah Kemenkes dengan 11 intervensi spesifik patut diapresiasi. Angka stunting di Indonesia dilaporkan telah mengalami penurunan, dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Tahun 2024 ini, angka stunting ditargetkan turun menjadi 14%.

Tantangan riil tentang persoalan stunting bisa dilihat dari hasil

survei oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2022. Survei itu menemukan 21 juta keluarga berisiko stunting. Masih menurut BKKBN, jumlah balita berisiko stunting di Indonesia pada 2022 sekitar 4,7 juta jiwa. Sudah barang tentu bahwa potensi masalah ini terdapat di semua daerah. Maka, semua Pemerintah daerah didorong untuk peduli dan lebih bersungguh-sungguh menangani masalah ini.

Tidak kalah pentingnya adalah memberi perhatian dan peduli pada persoalan anak putus sekolah. Penyebab utama dari kasus anak putus sekolah adalah ekonomi keluarga yang lemah dan berkekurangan. Menurut data Susenas yang diolah Bappenas tahun 2022, anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah mencapai 4.087.288 anak. Jumlah ini menggambarkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang jumlah mencapai 3.939.869 anak.

Dari rinciannya, didapatkan data bahwa sebanyak 491.311 anak usia sekolah drop out pada tahun ajaran baru. Dan, sebanyak 252.991 anak putus sekolah di tengah jenjang, serta 238.320 anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran baru. Selain itu, tercatat tak kurang dari 3.356.469 anak usia sekolah sudah drop out pada tahun-tahun ajaran sebelumnya.

Gambaran di atas, plus rangkaian data ini, patut dikedepankan untuk memberi penegasan bahwa kewajiban negara membangun segenap jiwa-raga warga negara belum tuntas. Negara harus lebih agresif melakukan intervensi guna meminimalisir masalah stunting, anak putus sekolah hingga persoalan kematian ibu dan bayi. Mereka yang lemah dan berkekurangan hendaknya tidak boleh tertinggal oleh perubahan zaman, apalagi terabaikan. □

Tantangan Sektor UMKM

Lestari Moerdijat: Harus segera Dijawab dengan Langkah yang Tepat

Tantangan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus segera dijawab dengan langkah dan strategi yang tepat, agar mampu mengakselerasi pertumbuhan di sektor ekonomi kerakyatan tersebut.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEJUMLAH tantangan di sektor UMKM nasional akan menjadi peluang untuk tumbuh bila kita serius dalam upaya mewujudkan berbagai langkah yang konsisten untuk menjawabnya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/2).

Catatan Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank

Indonesia pada Agustus tahun lalu menyebutkan, setidaknya ada empat tantangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2024.

Tantangan tersebut, yaitu mempertahankan UMKM dalam ekosistem digital, meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktivitas agar berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional,

memperluas akses keuangan karena baru 25% UMKM Indonesia yang memiliki akses keuangan, serta menerapkan proses ramah lingkungan dalam produktivitas mereka.

Menurut Lestari, pemanfaatan teknologi digital membuka peluang sektor UMKM untuk mengakselerasi pertumbuhannya lebih besar.

Sehingga upaya untuk mempertahankan sektor UMKM, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tetap dalam ekosistem digital, dan harus konsisten dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi literasi digital yang masif dan berkesinambungan.

Di samping itu, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, membuka lebih lebar akses keuangan terhadap UMKM sangat penting dalam upaya mengantisipasi akselerasi pertumbuhan yang terjadi.

Peningkatan kapasitas pengetahuan para pelaku UMKM terkait tren yang terjadi pada pasar global, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, juga diperlukan sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih ramah bagi pasar global.

Isu bahan baku yang ramah lingkungan, ujar Rerie, saat ini tengah menjadi perhatian konsumen dan masyarakat di berbagai belahan dunia.

Rerie sangat berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat terus berkolaborasi dengan baik untuk mengambil langkah yang tepat agar mampu menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi sektor UMKM di tanah air.

Terjawabnya tantangan di sektor UMKM itu, tegas dia, diharapkan mampu ikut menopang pertumbuhan perekonomian nasional yang berujung pada pemerataan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. □



Misi Kemanusiaan KRI dr. Radjiman Berlayar dalam Tugas yang Berbahaya

Tak sedikit kepedulian bangsa dan rakyat Indonesia terhadap rakyat dan bangsa Palestina. Salah satu bentuk kepedulian itu adalah diberangkatkannya KRI dr. Radjiman untuk menjalankan misi kemanusiaan ke Palestina. Muhibah kapal bantu rumah sakit KRI dr. Radjiman - kapal buatan anak bangsa Indonesia itu - menjalan tugas mulia, mendistribusikan berbagai macam bantuan kepada rakyat Palestina yang menjadi korban konflik dengan Israel. Menurut Menhan, misi yang diemban awak KRI dr. Radjiman tidak mudah. Karena rute perjalanannya harus melewati kawasan yang sedang dilanda perang. Tulisan ini dihimpun dari berbagai sumber.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MISI kemanusiaan untuk membantu rakyat dan bangsa Palestina yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia lewat muhibah KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 usai sudah. Pada tanggal 17 Februari 2024, kapal bantu rumah sakit itu meninggalkan Pelabuhan El Arish, Mesir. El Arish merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Rafah, Palestina. Mereka meninggalkan wilayah yang masuk dalam Wilayah Sinai itu setelah selama empat hari bersandar di pelabuhan itu. Mesir dipilih sebagai negara untuk berlabuh, sebab negara itu merupakan negara yang berbatasan dengan Palestina.

Selama empat hari mereka melaksanakan debarkasi dan penyaluran bantuan seberat 242 ton. Bantuan tersebut diserahkan kepada Egypt Red Crescent (ERC), Bulan Sabit Merah Mesir. Dari ERC inilah selanjut bantuan diangkut dengan menggunakan truk trailer, via jalur darat, ke perbatasan Rafah dan selanjutnya disalurkan kepada korban konflik di Gaza.

Bantuan yang disalurkan itu terdiri dari pampers (532 karung), pakaian anak-anak (600 karung), pakaian dewasa (700 karung dan 500 boks), susu (800 kardus),

biskuit (650 dus), air mineral galon (1.254 galon), air mineral kardus (1.700 kardus), obat-obatan (460 kardus), selimut (450 karung), jaket (450 karung), dan mie instan (470 kardus). Berbagai media menulis, jika bantuan itu dikelompokkan sesuai wadahnya maka jumlahnya menjadi 4.080 kardus, 2.732 karung, 500 boks, dan 1.254 galon.

Dalam web *tni.mil.id* disebutkan,

Komandan Satuan Tugas (Satgas) Port Visit Mesir, Laksamana Pertama TNI Sumarji Bimoaji, mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil atas kerja keras dan kerjasamanya dalam proses bongkar muatan bantuan kemanusiaan.

Perjalanan menuju Pelabuhan El Arish membutuhkan waktu cukup lama. Kapal produksi PT. PAL, Surabaya, Jawa Timur, itu



Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melepas keberangkatan kapal



meninggalkan Dermaga Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta, pada 18 Januari 2024.

Dalam *kemhan.go.id* diberitakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasum (Kepala Staf Umum) TNI Letnan Jenderal (Letjen) TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M., Sekjen Kemhan, Pangkogabwilhan I, Rektor Unhan, Komandan Pushidrosal, Kabaranahan Kemhan, dan Panglima Kolinlamil melepas keberangkatan kapal yang bercat putih itu.

Kapal yang membawa 214 awak itu melayari lautan luas dengan rute Jakarta - Belawan - El Arish - Jeddah - Batam dan kembali lagi ke Jakarta. Waktu tempuh yang diperlukan untuk muhibah itu sekitar 52 hari perjalanan.

Dari 214 awak itu bila dirinci, terdiri dari: 163 anak buah kapal, 10 Staf Satgas, 5 Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air, 20 Komando Pasukan Katak, 9 Detasemen Jalamangkara, dan 7 Intai Amfibi. Muhibah ke Mesir ini merupakan visi pertama KRI dr. Radjiman ke luar negeri.

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan, merasa prihatin terhadap penderitaan yang dialami oleh rakyat Gaza akibat serangan yang di luar batas kemanusiaan dan tanpa memerhatikan hukum internasional. "Saya menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada saudara-saudara. Saudara-saudara akan melewati kawasan laut yang berbahaya, dan meskipun kita bukan negara yang terlibat dalam perang, kita memiliki solidaritas dan tanggung jawab kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina," ungkapnya seperti dikutip dari *kemhan.go.id*.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, pentingnya kewaspadaan dan solidaritas dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini. "Saya yakin dan percaya, Komandan Satgas dan Komandan Kapal akan memimpin saudara-saudara dengan sebaik-baiknya. Tingkat latihan, disiplin, dan semangat saudara-saudara akan membawa kesuksesan dalam menyelesaikan tugas ini," tambahnya.

Selanjutnya, mantan Danjen Kopassus itu menegaskan bahwa yang bertugas menjalankan tugas kemanusiaan ini mewakili seluruh bangsa Indonesia. Maka jaga

kehormatan bangsa Indonesia, jaga kehormatan TNI, jaga kehormatan Angkatan Laut yang kita banggakan, dan dicintai seluruh rakyat Indonesia. Di akhir sambutannya, Prabowo mengatakan, "Semoga Allah SWT melindungi KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 dan seluruh awak kapalnya. Sampai jumpa kembali di Tanah Air."

Dalam upacara pelepasan tersebut, seperti dikutip dari *www.voaindonesia.com*, Prabowo mengatakan, pada hari ini saudara akan berangkat melaksanakan tugas kemanusiaan, yaitu menyampaikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza yang sedang mengalami musibah besar, penderitaan besar, mendapat

"Tugas ini cukup berbahaya karena mereka akan lewat kawasan perang, yaitu di sekitar Teluk Aden, Laut Merah, yang sekarang sedang berkecamuk atau bisa dikatakan perang terbuka. Tetapi, kita sebagai negara yang katakanlah mendukung Palestina, kita tidak merasa bahwa kita punya musuh dari Yaman, dan kita sebagai negara non blok juga berhubungan baik dengan beberapa negara yang ada di situ," ujarnya seperti yang ada dalam *voaindonesia.com*.

Prabowo menggarisbawahi tugas satgas sejauh ini hanya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan yang jumlahnya kurang lebih mencapai 200 ton. Izin sebagai kapal rumah sakit ataupun izin untuk mendirikan rumah sakit lapangan, sampai detik ini belum



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

serangan bertubi-tubi yang di luar batas kemanusiaan, tanpa memerhatikan hukum-hukum internasional. Karena itu, atas nama pemerintah, saya menyampaikan ucapan selamat bertugas.

Lebih lanjut ditulis dalam web itu, Prabowo mengakui bahwa misi kemanusiaan yang diemban oleh Satgas Muhibah ke Mesir ini bukanlah misi yang mudah. Pasalnya, kapal itu akan melewati perairan yang cukup berbahaya. Namun, ia menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan TNI AL secara khusus telah mempersiapkan semuanya dengan seksama.

didapatkan. Meski begitu, Prabowo menekankan hal tersebut tidak akan menyurutkan semangat Indonesia untuk tetap membantu rakyat Palestina dari waktu ke waktu.

"Kita harus mengerti bahwa di situ sedang berkecamuk perang besar, ribuan orang mati, ratusan ribu orang kehilangan rumah. Jadi kita harus paham tekanan-tekanan yang dialami oleh pemerintah-pemerintah di sekitar situ," kata Prabowo.

"Mereka khawatir bahwa nanti rakyat Gaza akan diusir dari kampung halamannya, mereka nyebrang ke Mesir dan akhirnya penduduk Palestina di usir lagi. Jadi, itu

kekhawatiran mereka, dan mereka khawatir kapal kita nanti bisa menjadi suatu tempat pelarian para pengungsi, dan kita paham itu. Sekarang kita sedang negosiasi mengirim rumah sakit lapangan dan tentunya ini harus juga negosiasi sama semua pihak yang ada di situ,” jelasnya (*voaindonesia.com*).

Di *tni.mil.id*, Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena untuk senantiasa menjaga keamanan dan keselamatan selama menjalankan tugas yang diamanahkan, serta menjelaskan bahwa TNI AL berkomitmen untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia maupun internasional, termasuk dalam misi perdamaian dan kemanusiaan.

Muhibah KRI dr. Radjiman untuk Palestina

Misi KRI dr. Radjiman disebut sebagai sikap bangsa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, sehingga apa yang dialami oleh rakyat dan bangsa Palestina maka bangsa ini harus peduli dan membantunya.

Sikap bangsa Indonesia, menurut anggota Komisi I DPR, itu sesuai dengan politik global bangsa-bangsa di dunia yang juga peduli pada Palestina. Dirinya juga mengapresiasi sikap rakyat Indonesia yang juga peduli pada Palestina.

Sikap bersama antara rakyat dan pemerintah yang peduli pada Palestina, menurut pria yang juga menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar, itu perlu dijaga dan diingkatkan.

Banyak sudah misi perdamaian yang

internasional. *Passing* dikemas secara unik, dengan menyalakan seluruh lampu penerangan geladak kapal yang kemudian diganti dengan lambaian *flash handphone* seluruh prajurit peran parade diiringi lagu “Rayuan Pulau Kelapa”.

Juru Optis terus mengobarkan semangat perjuangan melalui pengiriman isyarat optis *Jalesveva Jayamahe*. *Passing* dilaksanakan dalam jarak yang cukup dekat di tengah kondisi samudera yang gelap, sehingga membutuhkan kemampuan *shiphandling* yang mumpuni. Melalui broadcast radio komunikasi, Komandan Satgas MTF TNI dan Satgas Port Visit Mesir saling memberikan ucapan selamat dan memberikan support untuk kesuksesan tugas yang diemban masing-masing.

“Selamat datang di Indonesia, selamat kembali selesai melaksanakan penugasan, selamat berkumpul dengan keluarga, sukses selalu, salam hormat untuk seluruh prajurit KRI FKO-368 Kebanggaan, Garuda”, *Broadcast Dansatgas* Muhibah ke Mesir, Laksamana Pertama TNI Sumarji Bimoaji. “Komandan beserta seluruh prajurit KRI Frans Kaisiepo-368 mengucapkan Selamat berlayar dan bertempur kepada KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 dalam rangka melaksanakan tugas mulia negara untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina. Merupakan suatu kehormatan dapat berpapasan dengan KRI RJW-992 di Samudera Hindia sebagai wujud komitmen global TNI AL. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi langkah pengabdian kita dan semoga misi yang diemban dapat dituntaskan dengan baik, *broadcast* Komandan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL, Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh.

Passing dua Alutsista kebanggaan Indonesia dalam penugasan di luar perairan yurisdiksi nasional merupakan implementasi dari Perintah KASAL sebagai bagian tradisi keangkatanlautan sekaligus media *sharing* informasi situasi terkini di daerah operasi. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam berbagai kesempatan menyampaikan, peristiwa di lingkup global yang perlu menjadi perhatian di antaranya yang terjadi di Gaza (*pmpp.tni.mil.id*). □

AWGI dari berbagai sumber



Sjarifuddin Hasan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

diapresiasi oleh Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA. “Langkah yang bagus untuk membantu rakyat Palestina,” ujarnya usai melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kota Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Langkah pemerintah membantu rakyat Palestina akibat agresi militer Israel dengan mengirim bantuan, menurut Politisi Partai Demokrat, itu sebagai wujud dari pelaksanaan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, di mana bangsa Indonesia mempunyai amanah ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka penjajahan di atas dunia harus dihapus. “Kita hargai langkah pemerintah”, tuturnya.

dilakukan oleh Indonesia di dunia internasional. Saat KRI dr Radjiman melakukan pelayaran, di satu titik di Samudera Hindia, ia berpasapasan dengan KRI Frans Kaisiepo-368. Diceritakan dalam *pmpp.tni.mil.id*, KRI Frans Kaisiepo-368 dalam lintas laut Cochin, India, menuju Batam usai menuntaskan misi perdamaian dunia PBB di Lebanon melaksanakan *passing* dengan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 di Samudera Hindia, tepatnya 135 NM di luar Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada 29 Januari 2023 pukul 21.20 LT (GMT+5,5).

Ditulis dalam web itu, haru dan bangga mewarnai pertemuan kedua KRI yang tengah mengemban misi mulia bertaraf



Si Putih Produksi Anak Bangsa

KRI dr. Radjiman merupakan kapal laut produksi anak bangsa. Misi yang dijalankan menjadi kebanggaan pada PT PAL. Hadirnya KRI itu menambah layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan bagi semua. Di Asia Tenggara hanya Indonesia yang memiliki kapal rumah sakit. Sesuai fungsi dan misinya, KRI dr. Radjiman harus dicat warna putih.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MUHIHABAH atau *Port Visit* Mesir 2024 yang dilakukan oleh KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat selain memberi kebanggaan kepada rakyat Indonesia, juga kepada PT PAL Indonesia. Dalam web yang ada disebutkan, PT. PAL Indonesia (Persero) sebagai salah satu industri strategis milik BUMN yang memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia, khususnya untuk matra laut. Perseroan ini berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Saat KRI dr. Radjiman dipercaya menjalankan muhibah, hal itu menjadi kabar gembira bagi PT. PAL *Chief Operating Officer* (COO) PT. PAL Indonesia, Iqbal Fikri, merasa terharu. "Kita tentu merasa bangga karena tetesan keringat setiap insan PAL

dalam membuat kapal ini akan menjadi sumbangsih dalam sebuah misi kemanusiaan, untuk suatu operasi yang menegakkan nilai dasar peradaban manusia, yaitu tolong-menolong, kasih-mengasihi pada umat manusia lain yang mengalami penderitaan," ujarnya.

Lebih lanjut dituturkan, rasa bangga karena buah pikiran dan pengetahuan insan PAL dalam membangun sebuah kapal berfungsi penuh layaknya rumah sakit di darat, dapat bermanfaat pada kemanusiaan, tidak terbatas di negeri sendiri, tapi umat manusia secara keseluruhan.

PT. PAL sebagai galangan kapal yang mampu memproduksi kapal dan memiliki fasilitas, serta teknologi tinggi. Berbagai persiapan dan perbaikan juga telah dilakukan

di PT. PAL seperti pengecekan performa kapal dan pengecatan ulang kapal dengan warna putih dengan lambung *red cross* sesuai dengan peraturan Jenewa.

Diibaratkan, kalau Kemhan dan TNI itu layaknya Bapak, yang menyiapkan dana untuk kelahiran seorang anak, PAL ini ibarat Ibu, di mana anak tersebut tumbuh berkembang hingga melahirkannya. Saat ini KRI dr. Radjiman berlayar jauh, tapi memberi manfaat yang lebih pada dunia.

Sebagai produk hasil inovasi para *engineer* bangsa Indonesia melalui PT. PAL mengaku, bangga dengan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 karena membawa kehormatan bangsa Indonesia. Segenap keluarga besar PT. PAL berharap, semoga perjalanan untuk misi kemanusiaan ini lancar dan mampu mendukung segera berakhirnya konflik politik dan kemanusiaan yang tengah berlangsung, serta dapat kembali ke tanah air dengan selamat setelah menyelesaikan tugas mulia untuk rakyat Palestina.

"Kita doakan tidak ada kendala, khususnya teknis di kapal, sehingga operasi kemanusiaan ini berhasil dan RJW dapat pulang sebagai pahlawan kemanusiaan," tutup Iqbal Fikri (www.pal.co.id).

Kadepkes KRI dr. Radjiman, Mayor Laut (K) dr. Gilang Kusdinar, mengatakan, KRI itu merupakan kapal rumah sakit ketiga yang dimiliki oleh Indonesia. Di Asia Tenggara hanya Indonesia yang memiliki kapal rumah sakit.

Sebagai negara kepulauan, menjadi salah satu alasan pembuatan kapal bantu rumah sakit sehingga dapat menjangkau pulau-pulau terluar atau terpencil agar masyarakatnya bisa mendapatkan bantuan atau layanan kesehatan yang diperlukan.

"Kapal rumah sakit ini dibangun atau dibentuk dengan tujuan untuk tugas kita sebagai militer, yaitu operasi militer perang. Selain itu, kita juga memiliki tugas operasi militer selain perang yang bentuknya seperti bakti sosial, ataukah untuk bencana dan lain-lain. Karena di Indonesia ini bentuknya



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kepulauan, jadi banyak pulau kecil yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan makanya diperlukan kapal rumah sakit untuk menjangkau pulau-pulau terluar tersebut,” ungkap dr Gilang.

Fasilitas dan alat kesehatan KRI dr. Radjiman cukup lengkap atau setara dengan rumah sakit tingkat 3 atau tingkat C atau C plus. Kapal rumah sakit ini dapat digunakan untuk melakukan operasi besar dan kecil, mulai dari operasi bedah otak, saraf, mata, pemeriksaan gigi, hingga klinik kejiwaan.

Alat-alat kesehatan penunjang, seperti CT scan hingga panoramic X-ray, serta laboratorium pun tersedia. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan ruang Unit Gawat Darurat (UGD), dan ruang isolasi. Secara keseluruhan, kata Gilang, kapal ini bisa memuat kurang lebih 150 pasien.

Kapal ini juga dilengkapi dengan 16

personil yang terdiri dari dua dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya, seperti apoteker dan perawat. Namun, tim kapal ini akan disesuaikan ketika melakukan misi kemanusiaan di luar Indonesia.

“Kalau untuk tugas internasional, ini adalah kapal rumah sakit pertama yang melaksanakan tugas internasional yang cukup jauh, bukan hanya sekedar seperti pameran atau hanya kunjungan biasa. Jadi kebetulan untuk saat ini, saya belum bisa menyebutkan totalnya, tetapi yang saya harus pastikan adalah direktifnya dari pimpinan itu apa? Kalau direktifnya apakah kapal rumah sakit ini difungsikan 24 jam, 12 jam, ataupun hanya poliklinik saja, ataukah hanya rumah sakit lapangan tidak ke RS kapal, hanya di darat, itu settingannya akan berbeda. Tetapi berdasarkan buku teknis kapal yang sedang kami olah dan buat

secara resminya itu adalah tenaga kesehatannya sebanyak 88 personil,” tuturnya (www.voaindonesia.com).

Dalam *kompas.com*, 30/11/2023, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan, kapal rumah sakit milik TNI AL harus dicat putih sebelum dikirim untuk membantu korban perang di Jalur Gaza. Pengecatan putih itu agar sesuai dengan Konvensi Jenewa IV maupun aturan San Remo Manual terkait konflik bersenjata di laut. “Kapal rumah sakit sedang dilaksanakan docking, untuk pengecatan diberikan warna putih karena sesuai aturan Konvensi Jenewa maupun aturan dari San Remo Manual bahwa kapal rumah sakit itu harusnya dicat dengan warna putih. Jadi itu sudah disiapkan,” kata Ali.

Sejarah dari KRI dr. Radjiman, dalam *Wikipedia* diceritakan, pemotongan baja pertama dilakukan pada tanggal 10 September 2020. Peletakan lunas (*keel laying*) pertama kali dilakukan pada tanggal 21 Januari 2021 di Dermaga Dock Gali Semarang Divisi Kapal Niaga PT. PAL. Kemudian, penamaan dan peluncuran kapal dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022.

Upacara tersebut dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono beserta perwira TNI Angkatan Laut lainnya, pejabat pemerintah dan perusahaan terkait, serta kerabat Rajiman Wediodiningrat. Pada 16–19 Desember, kapal menjalani uji penerimaan laut di Laut Jawa. KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat ditugaskan pada 19 Januari 2023 di Dermaga Bandar Barat, PAL Indonesia di Surabaya. □

AWGI dari berbagai sumber





Tiga Kekuatan di Lautan

Sebagai negara kepulauan, kekuatan armada laut bangsa ini dari waktu ke waktu semakin mendekati angka yang dibutuhkan. Mulai dari satu, TNI AL saat ini sudah memiliki tiga kapal rumah sakit. Di masa damai, kapal-kapal tersebut melayani masyarakat dalam bidang kesehatan serta membantu korban bencana alam. Misi yang dilakukan tidak hanya di pulau-pulau kecil, terdepan, terluar, dan tertinggal, namun sudah sampai ke Mesir.



KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SELAIN KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat 992, bangsa Indonesia juga memiliki dua kapal rumah sakit lainnya. Kedua kapal rumah sakit itu adalah KRI dr. Soeharso (990), dan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (991).

Menurut ulasan di *Wikipedia*, KRI dr. Wahidin Sudirohusodo dibangun di galangan kapal PT. PAL Indonesia. Kapal ini memiliki panjang 124 meter dan lebar 21,8 meter. Berat benaman kapal mencapai 7.290 ton. Kapal ini dapat mengangkut 643 orang,

termasuk 159 pasien. Kapal ini dapat melaju hingga 18 knot, namun kecepatan berlayar yang disarankan adalah 12-14 knot. Kapal ini dapat berlayar hingga 30 hari atau 10.000 mil laut tanpa berhenti.

Di *web* itu disebut, Komandan Pertama KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 adalah Kolonel Laut (P) Anton Pratomo, M.Tr. Hanla selanjutnya saat ini dijabat oleh Kolonel Laut (P) Anang Setioko, M.Tr. Hanla. KRI dr. Wahidin Sudirohusodo bermarkas di Satban Koarmada III Katapop, Sorong.

Menurut sejarah yang tertulis, kapal itu dibuat dimulai dengan prosesi pemotongan baja pertama pada tanggal 9 Juli 2019. Lunas kapal ini kemudian diletakkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan selanjutnya diluncurkan pada tanggal 7 Januari 2021 di dok kering milik PT. PAL di Surabaya.

Diceritakan dalam *kemhan.go.id*, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengukuhkan nama KRI dr. Wahidin Sudirohusodo di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara, pada acara VIP Ship Tour dalam rangkaian kegiatan *Indo Defence 2022 Expo and Forum*. "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis tanggal 3 November 2022, pukul 09.42 WIB, dengan ini nama dokter Wahidin Sudirohusodo saya kukuhkan menjadi nama KRI dr. Wahidin Sudirohusodo dengan nomor lambung 991," kata Menhan Prabowo seperti tertulis dalam *web* itu.

Pemberian nama Wahidin Sudirohusodo dikatakan sebagai bukti bangsa dan rakyat Indonesia, khususnya jajaran TNIAL, selalu mengingat bahwa kemerdekaan didapatkan karena pengorbanan, keteladanan dan kepemimpinan dari para pahlawan.

KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 adalah satu kapal jenis Bantu Rumah Sakit (BRS) buatan industri pertahanan dalam negeri hasil karya anak bangsa PT PAL Indonesia di Surabaya. KRI itu merupakan Kapal Bantu Rumah sakit yang masuk dalam jajaran Satuan Kapal Bantu Komando Armada III, dan



KRI dr. Soeharso



KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (991)

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

memiliki fungsi asasi dalam rangka mendukung layanan kesehatan di darat, laut, dan udara, serta mendukung Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

Prabowo Subianto dalam kesempatan itu menyampaikan rasa bangganya PT. PAL Indonesia dan kepada putera-puteri bangsa yang telah mampu membangun dan memproduksi kapal-kapal yang cukup rumit. “Dan, kita berbangga bahwa putera-puteri Indonesia sekarang sudah mampu membuat kapal-kapal yang cukup rumit dan besar. Kamampuan ini harus kita teruskan dan kita ucapkan selamat kepada PT. PAL Indonesia dan seluruh jajarannya yang telah

bekerja keras,” ucap Menhan Prabowo (kemhan.go.id).

Sebelum berlayannya KRI dr Radjiman dan KRI dr Wahidin Sudirohusodo, kali pertama bangsa ini memiliki kapal rumah sakit yang bernama KRI dr. Soeharso (990). Dalam *Wikipedia.com* diceritakan, KRI dr. Soeharso sebelumnya merupakan KRI Tanjung Dalpele (972). KRI ini awalnya berfungsi sebagai Bantu Angkut Personel (BAP). Pada 17 September 2008 dilakukan perubahan fungsi oleh KASAL saat itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, menjadi kapal rumah sakit.

Diulas lebih lanjut, KRI Tanjung Dalpele (972) merupakan kapal serba guna yang berfungsi sebagai kapal bantu angkut

personel (BAP), kapal bantu rumah sakit (BRS), serta dapat mendaratkan dua heli jenis Super Puma.

Dinamakan dengan dr. Soeharso karena diambil dari nama seorang dokter orthopedi (dokter ahli bedah tulang), yakni Prof. dr. Soeharso. Ia telah banyak berjasa selama masa perjuangan kemerdekaan membantu menolong dan merehabilitasi pejuang yang mengalami cacat anggota gerak tangan dan kaki akibat peperangan.

KRI dr. Soeharso dalam *Wikipedia* disebut memiliki bobot 11.394 ton kosong dan 16.000 ton berisi penuh. Kapal sepanjang 122 meter, lebar 22 m, dan draft 4,9 m ini mempunyai geladak yang panjang dan luas sehingga mampu mengoperasikan dua buah helikopter sekelas Super puma sekaligus.

KRI dr. Soeharso juga dilengkapi sebuah hanggar untuk menampung helikopter satu lagi dan juga melakukan perawatan terhadap helikopter. Sebagai kapal rumah sakit, telah disediakan 1 ruang UGD, 1 ruang ICU, 1 ruang post operasi (RR), 3 ruang bedah (2 steril, 1 non steril), 6 ruang poliklinik, 14 ruang Penunjang Klinik, dan 2 ruang perawatan dengan kapasitas masing-masing 20 tempat tidur.

Kapal ini memiliki 75 anak buah kapal (ABK), 65 staf medis dan mampu menampung 40 pasien rawat inap. Jika dalam keadaan darurat, KRI dr. Soeharso juga dapat menampung 400 pasukan dan 3000 penumpang.

Dalam fungsinya sebagai kapal angkut, kapal ini mampu mengangkut 14 truk/tank dengan bobot per truk/tank 8 ton, 3 helikopter tipe Super Puma, 2 Landing Craft Unit (LCU) tipe 23 M, dan 1 hovercraft.

Catatan misi yang telah dilakukan oleh KRI dr. Soeharso adalah operasi bhakti sosial kesehatan setiap tahun (Surya Bhaskara Jaya dan Baksos TNI Terpadu) di pulau-pulau terdepan dan pulau terpencil, bantuan bencana gempa sumbar 2009, bantuan kesehatan di RDTL, penanggulangan bencana kabut asap Kalimantan 2015, bantuan Bencana Gempa Lombok, bantuan bencana tsunami Palu, bhakti sosial dalam rangka hari Nusantara di Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulteng, dan operasi evakuasi WNI ABK MV Diamond Princess dan MV World Dream (*Wikipedia.com*). □

AWGI dari berbagai sumber



KRI Tanjung Dalpele (972)

Uten Sairullah

Kades Desa Torosiaje

Untuk Pengembangan Desa Wisata Butuh Pendampingan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DESA kami, Desa Torosiaje, di Gorontalo memang sudah lama dan dikenal sebagai lokasi destinasi wisata warga Gorontalo dan turis domestik dari daerah lain di Indonesia. Memang hanya sampai di sana, jarang sekali turis mancanegara datang. Walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Jadi, kami berharap, ada pendampingan atau bimbingan bagaimana caranya agar bisa mengembangkan desa wisata agar wisatawan mancanegara bisa datang dan berlibur di sini.

Pendampingan dan bimbingan itu kami harapkan datang dari pemerintah daerah dan pusat. Bisa juga bekerjasama dengan pihak swasta, yang biasa mengurus wisata. Saat mengunjungi kami, Bapak Fadel Muhammad, mantan Gubernur Gorontalo juga mengungkapkan, jika Torosiaje ini berpotensi besar menjadi destinasi wisata dunia.

Jadi, kami ingin sekali pariwisata di sini bisa berkembang, seperti di Bali dan di Lombok yang menjadi tujuan wisata dunia. □

DER

Ibu Tarmi

Penjual Kaki Lima di Cianjur

Berikan Akses Pedagang Kecil untuk Berjualan

BANYAK pedagang kecil seperti saya, dan malah kebanyakan kaum ibu. Kami menjual berbagai macam kuliner atau jajanan, ada juga yang berjualan pakaian dan lainnya.

Satu hal yang kami harapkan dan juga menjadi aspirasi kami adalah permudahlah pedagang kecil seperti kami dan UMKM untuk menjajakan produknya kepada masyarakat. Berikanlah tempat yang bagus, jikapun membayar mesti terjangkau oleh kami.

Seperti saat acara car free day itu sudah sangat bagus menurut saya, karena kami menjadi punya lapak untuk berjualan dengan murah. Ke depan, kami berharap, permanen atau dibuatkan tempat atau lokasi untuk tempat kami berjualan.

Karena tidak semua pedagang kecil dan UMKM mampu membayar sewa di pasar, apalagi di mal atau pusat perbelanjaan lainnya. Kami sangat ingin hal ini menjadi perhatian semua pihak, terutama pembuat keputusan dan kebijakan. □



DER

Abdul Rohhim Hadi Suwarno

Menjadi Relawan Adalah *Panggilan Hati*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PESTA demokrasi lima tahunan, Pemilihan Umum 14 Februari 2024, telah berlalu. Masyarakat seantero Indonesia berduyun-duyun menghampiri Tempat Pemungutan Suara (TPS) menunaikan hak pilihnya kini sudah kembali ke pekerjaan rutinitasnya seperti semula. Selayaknya pesta, pemilu ini disambut seluruh warga bangsa dengan suka cita. Bahkan, banyak pemilih yang rela mudik ke kampung halaman, untuk menyalurkan pilihannya.

Tetapi, pesta demokrasi yang seharusnya diikuti seluruh rakyat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih itu ternyata tidak dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pasaunya, beberapa hari jelang pelaksanaan pencoblosan sebagian wilayah kabupaten berjudul Kota Wali itu dilanda banjir akibat meluapnya Sungai Wulan dan jebolnya tanggul anak sungai Wulan. Banjir menyebabkan di beberapa wilayah yang terdampak paling berat, terendam mencapai 2-3 meter.

Banjir mulai berangsur surut setelah satu dua hari kemudian. Tetapi, air yang menggenang terlanjur meninggalkan imbas yang tidak mudah ditangani. Banyak barang yang rusak, listrik padam, ketersediaan air bersih memprihatinkan. Tidak itu saja, lumpur

dan kotoran bertumpuk mengotori rumah-rumah penduduk, fasilitas umum seperti masjid, musola, dan sekolah.

Pemandangan tersebut salah satunya terjadi di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Cangkring Rembang merupakan salah satu desa yang terdampak cukup parah. Di wilayah tersebut nyaris tidak ada tempat yang lolos dari genangan banjir.

Beruntung, warga tidak berjuang sendiri, karena sejak hari pertama bencana banjir melanda, Lembaga Amil Zakat Infak dan

Sodaqoh (Lazis) Provinsi Jawa Tengah menerjunkan 8 relawan ke daerah bencana tersebut. Satu diantaranya relawan itu adalah Abdul Rohhim Hadi Suwarno (28). Dia termasuk salah satu staf bagian program di Lazis Jateng.

“Saat tiba, situasi sangat parah. Kami harus menyeberangi jalur pantura yang kedalaman banjirnya rata-rata seukuran paha orang dewasa. Tidak banyak yang bisa dilakukan, karena kondisi yang serba sulit. Saat itu, kami hanya bisa membagikan 300 bungkus nasi yang disiapkan saat





Likuifaksi Palu

Keikutsertaan Rohhim menangani bencana bersama Lazis Jateng relatif baru. Ia mulai bergabung dengan Lazis Provinsi Jawa Tengah sejak 2020. Bahkan, keterlibatannya dalam penanganan kebencanaan bersama Lazis terbilang baru seumur jagung. Di lembaga tersebut bapak satu anak, kelahiran Tangerang 04 April 1995, itu baru terlibat dalam satu kali kegiatan kebencanaan, yaitu pada peristiwa erupsi Semeru tahun 2021.

“Saya bertugas di divisi program. Saat tidak melakukan pertolongan kebencanaan, kegiatan saya lebih banyak terkait pemberdayaan ekonomi, kesehatan, sosial, dan juga dakwah,” ungkap suami dari perempuan bernama Mutmaninah Nur Qoiri.

Tetapi, itu bukan berarti ia tidak memiliki pengalaman dalam hal kedaruratan. Karena jauh sebelum terlibat di Lazis, Rohhim sudah kerap mengikuti aksi-aksi kemanusiaan bersama almamaternya. Bahkan pada 2018, Rohhim sudah diberangkatkan ke Palu membantu para korban gempa, tsunami, serta likuifaksi.

Bagi anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami-istri Suwarno dan Sunarti ini pengalaman dan keterlibatannya dalam pertolongan kebencanaan merupakan panggilan hati, untuk berbagi manfaat kepada orang lain. Sekaligus ungkapan rasa syukur, sebagai makhluk tuhan, dan sepatutnya memberikan peran maksimal bagi sesama.

“Saya ingin memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dan, saya beruntung, keinginan tersebut mendapat dukungan keluarga, termasuk istri saya. Mudah-mudahan, ke depan semuanya akan diberi kemudahan sehingga tugas-tugas yang harus saya kerjakan dapat selesai dengan sebaik-baiknya,” kata Rohhim penuh harap. □

MBO



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

posko pengungsian sekaligus dapur umum, di desa yang berpenduduk sebanyak 5.222 jiwa atau 1.734 KK itu.

Selama berada di posko Desa Cangkring B itu saban hari Rohhim bersama ibu-ibu penyintas bencana menyiapkan nasi bungkus hingga 1.000 bungkus. Mereka juga menerima dan menyalurkan bantuan yang asalnya dari masyarakat, maupun lembaga lainnya.

“Kami juga memberikan alat kebersihan bagi tempat ibadah dan sekolah. Kita ikut bersih-bersih, termasuk di rumah warga. Tetapi kegiatan tersebut harus dilakukan dengan ekstra hati-hati, lantaran kita tidak mengenal medan dan banyak ular yang ditemukan selama membantu warga melakukan bersih-bersih rumah,” ungkap alumni Politeknik Negeri Jember jurusan Teknik Energi Terbarukan ini.

berangkat,” kata Abdul Rohhim kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Selama dua hari, menurut pria yang genap berusia 29 tahun pada 04 April 2024 itu, pihaknya berusaha mencari tempat yang bisa dijadikan sebagai posko. Sampai akhirnya, mereka menemukan salah satu lokasi yang cukup aman dan strategis di Desa Cangkring B, Kecamatan Karanganyar, Demak.

Sejak itu Abdul Rohhim beserta anggota tim Lazis lainnya mendirikan posko induk,

Bermodal **Lucu dan Cantik** untuk Menang Pemilu

Dalam Pemilu 2024 terutama Pemilu Legislatif (Pileg), DPD, ada fenomena unik, yakni tingginya suara yang diraih oleh Alfiansyah Komeng dan Kondang Kusumaning Ayu. Komeng dikenal sebagai pelawak kondang mencalonkan (DPD) di Dapil Jawa Barat. Sedangkan Kondang memikat karena wajahnya nan cantik mencalonkan anggota DPD di Dapil Jawa Timur. Apakah karena faktor lucu atau cantik membuat pemilih tertarik mencoblos mereka? Berikut pendapat wakil rakyat dan wakil daerah mengenai fenomena itu.

Dailami Firdaus Anggota MPR Dari Kelompok DPD

Branding Boleh Selama Masih Dalam Aturan

UNTUK kriteria menjadi anggota DPD, menurut saya, tidak bisa digeneralisir, karena persyaratan untuk maju sebagai senator juga sudah diatur. Namun, idealnya para calon anggota DPD harus mengetahui kondisi di wilayahnya dan memiliki kecakapan dalam membaca suatu masalah yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakatnya, sehingga saat memperjuangkannya dapat dengan mudah melakukan penetrasi dan komunikasi untuk dapat mewujudkannya menjadi suatu produk kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan daerahnya.

Bila ditanya apa bisa calon anggota DPD maju dalam pemilu dengan bermodal wajah atau kelucuan saja? Menurut saya, semua tergantung bagaimana sudut pandang dari masyarakat dan juga bagaimana para calon legislator membranding dirinya, dan itu sah saja selama sesuai aturan. Masyarakat kita saat ini sudah cerdas dan mampu mencari informasi mengenai rekam jejak daripada para calon legislator yang akan menjadi pilihan mereka.

Faktor apakah kecantikan, ganteng, dan lucu bisa mendongkrak suara dalam pemilu bisa iya dan bisa tidak, kembali lagi bagaimana pendekatan dan cara kampanye dari si calon ketika hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi di era digital saat ini masyarakat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dengan sangat mudah dapat mengetahui rekam jejak dan informasi lainnya dari si calon legislator, sehingga pasti akan turut memengaruhi pilihannya.

Bila ada anggota DPD terpilih tidak memiliki kapasitas pasti sangat berdampak dan tentunya yang akan merasakan dampak terbesarnya adalah masyarakat di daerah pemilihannya. Karena, bisa jadi legislator yang seharusnya mampu membawa aspirasi justru malah sebaliknya tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan dan permasalahan di daerah pemilihannya.

Jumlah anggota DPD dari kalangan artis sejauh yang saya ketahui sangat minim, dan menurut saya adalah hal wajar bila para artis turut dalam pencalonan legislator, terutama DPD, karena tentunya mereka akan mewakili profesi mereka dan akan memperjuangkannya. Harus kita ingat juga bahwasannya DPD dulunya adalah lembaga yang di dalamnya terdapat utusan daerah dan golongan, bisa kita artikan golongan di sini adalah Profesi. Jadi, sangatlah wajar bila artis turut ada di dalamnya untuk menyuarakan aspirasinya. □

AWG

Zulfikar Arse Sadikin Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Banyak Faktor Memenangkan Pemilu

BERDASARKAN pengalaman saya agar seseorang terpilih menjadi wakil rakyat, dia harus memiliki prestasi atau karya lebih dahulu sehingga saat turun ke bawah, bertemu masyarakat, ada yang kita ceritakan bahwa kita sudah pernah berbuat nyata. Penting juga, kita harus rajin turun ke bawah agar bisa bertemu, bertatap muka, dan berdialog dengan masyarakat, sehingga hal demikian membuat semakin terbukanya peluang untuk menang pemilu.

Faktor apa yang dikehendaki masyarakat perlu kita dengar sehingga hal ini akan semakin mendekatkan diri pada pemilih.

Faktor cantik, ganteng, dan lucu merupakan salah satu kunci untuk memenangkan pemilu, meski demikian faktor itu bukan satu-satunya jalan untuk meraih suara. Buktinya, banyak yang terkenal, berparas cantik,

wajah ganteng, namun mereka tidak terpilih.

Untuk menjadi wakil rakyat atau wakil daerah memang banyak faktor yang harus dipenuhi, salah satunya memiliki kapasitas. Bagaimana kita bisa menjadi wakil yang mau mengurus masalah negara dan rakyat kalau tidak mempunyai kapasitas. Ke depan kapasitas harus semakin lengkap.

Kalau tidak mempunyai kapasitas akan membawa kerugian pada partai dan rakyat atau daerah yang diwakili. Di sinilah pentingnya ada kaderisasi. Di partai politik banyak sosok artis yang makin lama kinerjanya makin bagus, sebab selain mengikuti kaderisasi, ia juga *learning by doing*. Jadi, ia benar-benar mempersiapkan diri secara betul.

Untuk menjadi wakil rakyat atau wakil daerah, itu suatu perjalanan yang luar biasa. Sehingga mereka yang terpilih perlu kita

apresiasi. Juga, kita harapkan mereka yang terpilih, ke depannya semakin baik. □

AWG



Fahira Idris Anggota MPR dari Kelompok DPD

Faktor Utama Adalah Rekam Jejak dan Integritas

IDEALNYA seorang caleg DPD bisa terpilih karena memiliki elektabilitas. Elektabilitas ini dibentuk oleh rekam jejak caleg DPD, terutama kiprahnya di dalam masyarakat. Elektabilitas juga lahir dari reputasi, integritas, dan kemampuan caleg tersebut meramu visi misi dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Selain itu, caleg DPD yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus, baik dalam berbicara di depan umum, maupun dalam berkomunikasi secara efektif melalui media, cenderung menjadikan elektabilitasnya semakin baik. Bahkan, dalam beberapa kasus, elektabilitas juga bisa dibentuk dari popularitas seorang caleg biasanya karena profesinya di dunia seni dan budaya.

Syarat seorang warga negara Indonesia yang ingin berpartisipasi sebagai peserta pemilu, dalam hal ini menjadi caleg DPD RI, kan sudah diatur sangat jelas pada pasal 181, pasal 182, dan pasal 183 UU Pemilu. Salah satunya adalah harus mendapatkan



dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Dukungan tersebut harus dibuktikan dengan daftar yang ditandatangani atau cap jempol, dan dilampirkan fotokopi KTP pendukung. Jadi, itu syarat utamanya. Terkait modal wajah atau kelucuan itu lebih kepada preferensi

pemilih. Banyak kok calon wakil rakyat berlatar belakang artis, tetapi memiliki rekam jejak, reputasi, kapasitas dan integritas yang mumpuni.

Berbagai faktor bisa menjadi pendongkrak suara seorang kandidat dalam pemilu. Tetapi sekali lagi, menurut saya, faktor utama keterpilihan seorang kandidat adalah rekam jejak, reputasi, kapasitas dan integritas. Di luar faktor-faktor utama yang saya sebutkan, hanyalah faktor pendukung.

Dampak bila anggota DPD terpilih tidak memiliki kapasitas, ia tidak akan maksimal menjalankan kewenangan yang diberikan undang-undang kepadanya, baik itu kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran. Dampaknya, turunannya adalah tidak maksimal memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah yang diwakilinya.

Jumlah anggota DPD dari kalangan artis, saya rasa tidak banyak ya. Bisa dicek sendiri profil 136 orang Anggota DPD yang ada saat ini. □

AWG

Bamsoet Bersama Ilham Habibie

Matangkan Pembangunan Museum Otomotif Indonesia

Perjalanan bangsa Indonesia di dunia otomotif sangat panjang, bahkan dimulai sejak 51 tahun sebelum Indonesia merdeka, kurang lebih sekitar tahun 1894. Semua itu, kelak, dapat disaksikan di Museum Otomotif Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, bersama Anggota Kehormatan IMI Ilham Habibie mematangkan pembuatan Museum Otomotif Indonesia (MOI) by IMI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Di dalam MOI by IMI akan

terdapat Paviliun Museum Mercedes-Benz Presiden BJ Habibie, menampilkan berbagai koleksi Mercedes-Benz sekaligus science center berbagai penemuan teknologi milik Presiden RI ke-3 BJ Habibie.

“Selain sebagai intelektual yang mencintai buku, Pak Habibie juga merupakan sosok yang mencintai dunia otomotif. Koleksi

kendaraannya sangat beragam, antara lain Mercedes-Benz 300SL Gullwing, Mercedes Benz 600 Pullman, hingga Mercedes-Benz 600SEC. Pak Habibie merawat berbagai koleksi kendaraannya dengan baik. Begitupun dengan anak-anaknya, seperti Mas Ilham Habibie yang turut merawat koleksi kendaraan ayahnya dengan baik,” ujar Bamsoet usai menerima Ilham Habibie dan para pengurus IMI Pusat, di Jakarta, Jumat (1/3/23).

Turut hadir para pengurus IMI Pusat, antara lain Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola, Wakil Ketua Umum IT dan Digital Tengku Irvan Bahran, dan Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berbagai koleksi kendaraan milik Presiden ke-3 RI BJ Habibie tersebut sangat menarik, karena di baliknya juga terdapat beragam cerita yang tak kalah seru. Cerita dari setiap mobil tersebut juga akan ditampilkan di Paviliun Museum Mercedes-Benz BJ Habibie.

Seperti Mercedes Benz Gullwing yang didapat dari dalam hutan di Jambi. Mobilnya sudah jadi rongsokan dan tersangkut di atas pohon. Menurut kabar lainnya, mobil tersebut diduga memiliki anggota kerajaan di Jambi yang sengaja disembunyikan pasca kemerdekaan Indonesia.

“Bentuk kendaraannya yang unik sampai dikira para warga sebagai UFO (unidentified flying object) dari luar angkasa. Malah ada yang mengkeramatkan mobil ini dan menaruh sesajen. Kisah ini di sisi lain menunjukkan betapa hebatnya peradaban otomotif bangsa Indonesia sejak di masa lampau,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPi dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selain memberikan edukasi kepada



masyarakat dengan menampilkan berbagai kendaraan klasik, legendaris, dan bersejarah yang ada di Indonesia, di MOI by IMI juga akan menyiapkan hiburan sport entertainment dengan menghadirkan sirkuit gokart listrik hingga simulator balap yang bisa dipakai oleh para pengunjung.

“Termasuk menampilkan berbagai kendaraan klasik, legendaris, dan bersejarah Indonesia. Misalnya, mobil kepresidenan sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Serta kendaraan balap yang punya nilai sejarah karena pernah dipakai oleh para pembalap Indonesia di berbagai kejuaraan internasional dalam mengharumkan Indonesia,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPP/Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menambahkan, perjalanan bangsa Indonesia di dunia otomotif sangat panjang, bahkan dimulai sejak 51 tahun sebelum Indonesia merdeka, kurang lebih sekitar tahun 1894. Ditandai hadirnya Benz Victoria Phaeton karya Karl Benz, Jerman, yang dibeli oleh Sultan Kasunanan Surakarta Pakubuwono X. Dan, menempatkannya sebagai orang Indonesia pertama yang



membeli mobil.

“Kini kendaraan Benz Victoria Phaeton yang pernah dimiliki Sultan Kasunanan Surakarta Pakubuwono X tersebut kabarnya berada di Museum Louwman, Belanda. Kehadiran Museum Otomotif Indonesia by IMI serta didukung berbagai komunitas

otomotif klasik seperti MCCI, diharapkan bisa membangun kerjasama dengan berbagai museum dunia yang menyimpan kendaraan bersejarah dari Indonesia, agar secara berkala bisa memajang koleksinya di Museum Otomotif Indonesia by IMI di TMII,” pungkas Bamsoet. □

Seminar Transaksi Elektronik dan Transformasi Digital

Bamsoet Dorong Notaris Terapkan Cyber Notary

Sebagai pelayan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan keadilan dan kepastian hukum, notaris perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, perkembangan teknologi dan digitalisasi yang terus berlangsung membawa tantangan baru yang harus dihadapi oleh seluruh profesi, termasuk notaris. Sebagai pelayan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan keadilan dan kepastian hukum, notaris perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

Salah satu bentuk adaptasi yang sangat penting adalah melalui transformasi dengan menerapkan konsep cyber notary. Transformasi ini bukan hanya suatu keharusan, melainkan juga menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

layanan notaris kepada masyarakat.

“Dengan penerapan cyber notary, para notaris dapat memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka. Ini bukan hanya memudahkan

notaris dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan notaris tanpa harus bersusah payah mendatangi kantor notaris,” ujar Bamsoet saat menjadi pembicara secara daring dalam Seminar Nasional “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Transformasi Digital dan Cyber Notary” yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Padjadjaran dari Jakarta, Jumat (1/3/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ini menjelaskan, dari aspek regulasi, dukungan hukum untuk menerapkan

cyber notary di Indonesia sudah terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menunjukkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik. Apalagi semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Kita patut mengapresiasi langkah

progresif dalam Undang-Undang ITE 2024 yang menghapus ketentuan pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE lama; dan menggantinya dengan norma baru yang secara tegas mengatur e-evidence. Namun, melihat kompleksitas perkembangan teknologi, kita perlu mempertimbangkan penambahan regulasi yang khusus mengatur tentang Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau pembuatan Peraturan Pemerintah yang terfokus pada aspek ini, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih mendalam,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini memaparkan, cyber notary bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga meningkatkan fungsi dan peran notaris konvensional di era digital. Lebih dari itu, cyber notary juga menjadi elemen kunci dalam menjaga keamanan dan ketahanan siber nasional. Hal ini menjadi semakin penting karena dewasa ini, transaksi ekonomi digital di Indonesia tumbuh sedemikian pesat.

“Sebagai gambaran, per Januari 2024 saja, nilai transaksi digital banking di Indonesia mencapai lebih dari Rp. 5.300 triliun, atau tumbuh sekitar 17,19%. Merujuk pada proyeksi Bank Indonesia, nilai transaksi digital banking juga diproyeksikan akan terus tumbuh sebesar 23,2% pada tahun 2024, atau mencapai Rp. 71.584 triliun,” pungkas Bamsoet. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Terima Pengurus Himperra

Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

Diperkirakan, pada tahun 2035 angka urbanisasi akan meningkat menjadi sekitar 66,6%, yang tentunya akan berdampak pada kebutuhan tempat tinggal. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat dipastikan backlog perumahan akan semakin meroket.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bambang Soesatyo, dipercaya menjadi Dewan Pembina Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra). Meningkatkan sinergi dan kolaborasi Himperra dengan pemerintah untuk mengatasi tingginya backlog atau kekurangan pemenuhan kebutuhan

perumahan yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2023 saja, backlog perumahan mencapai 12,7 juta rumah.

“Sebagai gambaran, pada tahun 2020 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sendiri mencapai 80,1%. Tahun 2021 meningkat menjadi 81,08%, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 83,99%. Jika diasumsikan jumlah penduduk pada

tahun 2022 adalah 275,3 juta, maka ada sekitar 44 juta penduduk yang belum memiliki rumah sendiri,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Himperra, di Jakarta, Selasa (27/2/24).

Pengurus Himperra yang hadir, antara lain: Ketua Umum Ari Tri Piyono, Sekjen Andi Anzhar Cakra Wijaya, Ketua Bidang OKK Aviv Mustaghfirin, Ketua Bidang Kemitraan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Widodo Zumiarto, serta Ketua Bidang Kelembagaan Ester Yvonne.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, laju pertumbuhan keluarga baru yang membutuhkan rumah sekitar 700 ribu hingga 800 ribu keluarga per tahun. Artinya, upaya pemenuhan kebutuhan rumah tidak hanya untuk

memangkas backlog pada tahun sebelumnya, melainkan proyeksi kebutuhan perumahan pada tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang. Apalagi, pertumbuhan penduduk melaju menurut deret ukur, dan diperkirakan mencapai 324 juta jiwa pada tahun 2045.

“Target menihilkan backlog rumah pada usia Indonesia Emas 2045 harus dilandasi

matang, serta didukung oleh seluruh stakeholders. Banyak aspek yang harus dipersiapkan, mulai dari pengadaan tanahnya, dukungan perbankan, ketersediaan material, dan lain-lain. Untuk menihilkan backlog rumah pada tahun 2045 maka pemerintah perlu membangun sekitar 1,3 juta unit rumah per tahun,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPi dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pada tahun 2015, pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Sejak dicanangkan pada tahun 2015, baru betul-betul terealisasi pada tahun 2018 dengan capaian 1,13 juta unit. Meningkat pada tahun berikutnya dengan capaian 1,25 juta unit.

“Diperkirakan, pada tahun 2035, angka urbanisasi akan meningkat menjadi sekitar 66,6%, yang tentunya juga berdampak pada kebutuhan tempat tinggal. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat dipastikan bahwa backlog perumahan akan semakin meroket, dan tentunya akan lebih sulit diatasi,” pungkas Bamsoet. □



Rapat Pimpinan MPR RI

Bamsoet: Bahas Pergantian Wakil Ketua MPR hingga Sidang MPR di Tahun 2024

Di akhir periode masa jabatan, Pimpinan MPR akan kembali mematangkan rencana menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, Pimpinan MPR akan melakukan penggantian Pimpinan MPR dari unsur Fraksi PPP yang sebelumnya diemban Arsul Sani kepada Amir Uskara. Pelantikan pergantian antarwaktu pimpinan MPR RI untuk sisa masa jabatan 2019-2024 dilaksanakan di Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR/DPD RI,

Jumat (8/3/24).

“Wakil Ketua MPR RI dari unsur Fraksi PPP Arsul Sani saat ini telah mengembangkan amanah baru sebagai hakim konstitusi yang telah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 18 Januari 2024. Kita mendoakan Arsul Sani senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesuksesan dalam menunaikan amanah dan tanggung jawab baru yang diberikan,” ujar Bamsoet

usai Rapat Pimpinan MPR RI di Jakarta, Kamis (7/3/24).

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Sjarifuddin Hasan, Jazilul Fawaid, Fadel Muhammad, serta Lestari Moerdijat (daring).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Ketua MPR RI telah menerima tiga surat terkait dengan pergantian Pimpinan MPR dari unsur Fraksi PPP. Pertama, Surat Pengunduran Diri dari Arsul Sani, tanggal 04 Desember 2023. Kedua, Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor: 2382/EX/DPP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, perihal Permohonan Pergantian Pimpinan MPR RI. Ketiga, Surat Rekomendasi Fraksi PPP, Nomor: 01/FPPP/MPR/RI/2024, tanggal 15 Januari 2024, perihal Penyampaian Nama Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP.

“Berdasarkan surat tersebut maka Arsul Sani digantikan oleh Amir Uskara sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur Fraksi PPP untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Kita harapkan Arsul Sani dapat hadir secara langsung untuk melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Wakil Ketua MPR yang lama kepada penggantinya. Karena selama ini saat dilakukan pergantian antar waktu tidak diikuti dengan Sertijab,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, MPR akan melaksanakan empat sidang di tahun 2024. Pertama, Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024. Kedua, Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI Periode 2019-2024 tanggal 27 September 2024. Ketiga, Sidang Awal Masa Jabatan MPR RI Periode 2024-2029 tanggal 1 Oktober 2024. Keempat, Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024. Berdasarkan hasil koordinasi Sekretariat Jenderal MPR RI





dengan Kementerian Sekretariat Negara RI keempat sidang tersebut tetap dilaksanakan di Komplek MPR/DPR/DPD RI Jakarta.

“Di akhir periode masa jabatan, Pimpinan MPR akan kembali mematangkan rencana menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan

Negara (PPHN) untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Selain, mempersiapkan Rancangan Undang-Undang MPR RI, sehingga tidak lagi tergabung dalam Undang-Undang MD3. Pemisahan Undang-Undang MPR RI dari

Undang-Undang MD3 sejalan dengan amanat konstitusi yang menekankan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang masing-masing lembaga perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang,” pungkas Bamsuet. □

Dilantik Sebagai Wakil Ketua MPR

Amir Uskara: PPHN Perlu Diwujudkan Secara Riil

WAKIL Ketua MPR RI yang baru Dr. H.M. Amir Uskara, M.Kes., mengatakan bahwa sebagai negara yang luas dan besar juga kompleks, Indonesia membutuhkan patron untuk menata pembangunan nasional ke depan, yang memiliki prinsip pembangunan yang merata, terarah, adil, dan berkesinambungan.

Wacana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebelumnya bernama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diajukan MPR RI, menurut Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, sangat baik dan sudah semestinya dilanjutkan serta diwujudkan secara riil.

“Saya pribadi dan kami di PPP melihat PPHN itu sangat baik dan mendukung PPHN sebagai satu patron dalam program pembangunan nasional,” ujar Amir, usai dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW), di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/4/2024).

Lebih lanjut, Amir Uskara mengungkapkan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bahwa PPHN sebagai patron pembangunan nasional yang berkesinambungan semestinya memang harus ada. Sebab, jika perencanaan pembangunan nasional berasal dari pemikiran, visi dan misi pemimpin seorang pemimpin maka tidak akan ada prinsip

kontinuitas dan berkesinambungan.

“Yang ada nantinya, berganti pemimpin maka akan berganti pula patron pembangunan nasionalnya. Hal tersebut akan merusakkan dan merugikan keuangan negara, karena tidak maksimal dalam



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pemanfaatannya,” katanya.

Terkait pelantikan sebagai Wakil Ketua MPR, Amir Uskara menyebutkan, akan melanjutkan tugas-tugas yang selama ini telah dilakukan Pimpinan MPR dan para anggota MPR. “Sehingga tuntas sampai akhir masa jabatan pada Oktober 2024 nanti,” ujarnya.

Sementara itu, Arsul Sani yang hadir dalam pelantikan Wakil Ketua MPR RI,

merasa bangga dengan pelantikan Wakil Ketua MPR yang baru. “Ini agak berbeda dengan sebelumnya dengan adanya pelantikan ini. Ini tradisi baru dari Pimpinan MPR. Sama seperti ketika di MK, ada acara pelepasan dan penyambutan hakim yang purna tugas dan hakim yang baru. Saya kira ini tradisi yang patut diapresiasi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Arsul Sani juga

menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan MPR yang jumlahnya 10 orang karena telah saling bekerjasama dan saling mendukung, serta saling menguatkan dalam menjalankan tugas sebagai Pimpinan MPR RI. Apalagi selama beberapa tahun berada dalam masa pandemi Covid-19.

Secara khusus Arsul Sani menutup sambutan dengan permohonan maaf kepada Pimpinan MPR bila ada tindakan, perbuatan, dan kata-kata yang khilaf ketika mengemban tugas selama empat tahun tiga bulan sebagai Pimpinan MPR RI. “Mohon maaf atas segala ‘kebandelan’ dan kenakalan yang mungkin ada,” ucapnya.

Seremoni pelantikan Amir Uskara dipimpin Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan dihadiri beberapa Pimpinan MPR lainnya, antara lain Ahmad Basarah dari unsur PDI Perjuangan, Hidayat Nur Wahid dari unsur PKS, dan Fadel Muhammad dari unsur Kelompok DPD.

Bersamaan dengan pelantikan Wakil Ketua MPR, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga memandu pengucapan sumpah empat anggota MPR Pengganti Antar Waktu (PAW). Mereka adalah Durrotun Nafisah, Ali Imron Bafadal, dan H. Syamsul Bahri R, ketiganya dari Fraksi Partai Gerindra, dan Hj. Jumriah dari Fraksi PDI Perjuangan. □



Diskusi Publik Hari Perempuan Internasional

Lestari: Pelibatan Perempuan Mendesak untuk Jawab Sejumlah Tantangan

Melibatkan dan mengandalkan perempuan dalam proses pembangunan merupakan urgensi untuk menyikapi ragam krisis dan ketidakpastian dunia menuju kesejahteraan bersama.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PEREMPUAN yang sehat berpotensi melahirkan perempuan yang berdaya dan mampu membangun keluarga yang sehat. Bila keluarga di Indonesia sehat tentu saja peluang untuk mewujudkan negara yang berdaya semakin besar," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat menjadi pembicara kunci pada Diskusi Publik dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret, bertema 'Membangun Kepemimpinan Perempuan di Sektor

Kesehatan,' di Jakarta, Kamis (7/3).

Dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Kajian Jaminan Sosial Sekolah Kajian Strategik dan Global itu, lebih lanjut Lestari menegaskan, mengandalkan perempuan sebagai pemimpin pada dasarnya mampu memberi kebaruan dalam mekanisme kepemimpinan berbagai bidang kehidupan dan peran signifikan lainnya.

Menurut Lestari, kepemimpinan perempuan harus diupayakan melalui gerak bersama yang dimulai dari komitmen memberdayakan,

menyudahi diskriminasi, memastikan tiadanya kekerasan, dan menguatkan perlindungan khususnya bagi perempuan.

Pelibatan perempuan dalam kepemimpinan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sejatinya bukan merupakan hal baru dalam perkembangan peradaban Indonesia. Sejarah Nusantara mencatat, tambah dia, perempuan berperan penting dalam menjaga keterhubungan antarkesultanan, karena keutamaan moral dan intelektual yang dimiliki. Bahkan di Aceh, jelas Rerie, di masa lalu terdapat 21 sultana yang memimpin kesultanan di Negeri Serambi Mekah itu.

Berbeda dengan catatan sejarah, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dalam konteks lokal, kepemimpinan perempuan selama ini luput dari pemahaman masyarakat.

Kepemimpinan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, tegas Rerie, mesti berpijak pada prinsip altruistik, yakni kepemimpinan yang berpusat pada kesejahteraan dan mengedepankan pelayanan untuk semua.

Diakui Rerie, tantangan perempuan untuk berkarier sebagai profesional sangat besar karena melawan stigma bahwa perempuan memiliki kewajiban domestik yang harus dilakukan.

Pelibatan dan kehadiran perempuan pada setiap tingkatan kepemimpinan, ujar dia, harus dipandang sebagai subyek bukan lagi ditempatkan pada seperangkat atribusi sosial yang melanggengkan ketimpangan.

Lebih dari itu, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dunia yang terus bergerak maju membutuhkan model kepemimpinan yang berbelas-rasa (compassionate leadership). Model kepemimpinan ini ditandai dengan kemauan hadir bersama masyarakat, terlebih mereka yang terpinggirkan dan kehilangan harapan.

Perempuan, tegas Rerie, dapat diandalkan untuk mengimplementasikan paradigma kepemimpinan yang berbelas-rasa itu. □



Kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia

Bamsoet Tegaskan Pemilu Telah Selesai dan Dorong Singapura Investasi di IKN

Singapura merupakan negara mitra dagang Indonesia yang paling strategis dan terbesar di kawasan ASEAN.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi perhatian Duta Besar Singapura untuk Indonesia Mr. Kwok Fook Seng atas lancarnya penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia. Bamsoet juga memastikan kondusifitas bangsa pasca Pemilu tetap aman dan damai, sehingga Singapura maupun negara lainnya tidak perlu khawatir menanamkan investasinya di Indonesia.

Selama ini, hubungan bilateral kedua negara telah berkembang secara baik, positif, dan konstruktif. Di sektor ekonomi, misalnya, Singapura merupakan negara mitra dagang Indonesia yang paling strategis dan terbesar di kawasan ASEAN.

"Pada pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong Maret 2023 di Istana Kepresidenan Singapura, disepakati sejumlah kerja sama di berbagai bidang, meliputi 20 letter of intent milik swasta Singapura untuk investasi di IKN Nusantara, 9 MoU business to business di bidang

healthcare dan digital dan 7 MoU government to government antara lain di bidang energi, kesehatan, dan digital," ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Singapura untuk Indonesia Mr. Kwok Fook Seng, di Jakarta, Jumat (1/3/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sejak tahun 2010 hingga tahun 2023, Singapura merupakan investor terbesar bagi Indonesia, kecuali pada tahun 2013 menduduki peringkat 2. Menurut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada 2023 nilai investasi Singapura mencapai USD 15,4 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dari Tiongkok yang 'hanya' mencapai USD 7,4 miliar.

"Investasi Singapura pada umumnya bergerak di sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, tanaman pangan dan perkebunan, industri makanan, pertambangan, industri mineral non-logam. Fokus investasi di wilayah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Kalimantan

Utara, dan Kalimantan Tengah," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, peluang investasi di Indonesia bagi Singapura masih terbuka lebar. Salah satunya di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Sehingga selain memindahkan kantor kedutaannya dari Jakarta ke IKN Nusantara, Singapura juga bisa berinvestasi di berbagai program pembangunan IKN Nusantara.

"Pembiayaan pembangunan IKN Nusantara bersumber dari APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Hingga tahun 2024 nanti, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan menembus Rp 75,4 triliun atau 16,1% dari total anggaran. Hingga saat ini, total investor pelopor yang masuk ke IKN dan melakukan ground breaking sudah mencapai 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar Rp 41 triliun. Masih sangat terbuka bagi investor lain dari dalam maupun luar negeri," pungkas Bamsoet. □



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Misi Mulia KRI dr. Radjiman

Syarief Hasan Apresiasi **Muhibah** KRI dr. Radjiman Bantu Palestina



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BEBERAPA waktu lalu pemerintah Indonesia melepas Kapal Rumah Sakit KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam rangka melakukan muhibah atau port visit. Kapal dengan nomer lambung 992 yang memuat berbagai barang bantuan untuk rakyat Palestina itu dilepas dari Dermaga Markas Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jakarta.

KRI dr. Radjiman melakukan muhibah atau misi mulia itu akan menempuh perjalanan selama 52 hari menuju Mesir. Sesampai di Mesir semua bantuan berupa: bahan makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, pakaian wanita, susu, tenda lapangan, perlengkapan kebersihan, air mineral, perlengkapan ibadah, dan kebutuhan lainnya akan diteruskan kepada rakyat Palestina.

Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., atau biasa disapa Syarif Hasan, ini memberi apresiasi terhadap aksi muhibah KRI dr. Radjiman ini. "Langkah yang bagus untuk membantu rakyat Palestina," ujarnya usai melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kota Bogor, Jawa Barat, 23 Januari 2024.

Langkah pemerintah membantu rakyat Palestina, yang menjadi



korban akibat agresi militer Israel, dengan mengirim bantuan, menurut politisi Partai Demokrat itu sebagai wujud dari pelaksanaan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, di mana bangsa Indonesia mempunyai amanah ikut menciptakan perdamaian dunia dan menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi. "Kita hargai



langkah pemerintah,” tuturnya.

Syarief Hasan menilai, misi yang dilakukan KRI dr. Radjiman itu merupakan sikap bangsa Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sehingga apa yang dialami oleh rakyat dan bangsa Palestina mendapat kepedulian dari pemerintah dan warga bangsa ini.

Sikap bangsa Indonesia, menurut anggota Komisi I DPR, itu sesuai dengan politik global bangsa-bangsa di dunia yang juga peduli pada Palestina. Dia juga mengapresiasi sikap rakyat Indonesia yang juga peduli pada Palestina.

Sikap bersama antara rakyat dan pemerintah yang peduli pada Palestina, menurut Syarief Hasan yang juga Guru Besar Universitas Negeri Makassar, itu perlu dijaga dan diingkatkan. □



Wonderkind X Festival Pesantren Darul Qur'an Mulia

HNW: Santri Harus Memperkuat Nilai Etika, Sambut Indonesia Emas



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RIBUAN santri Pesantren Terpadu Darul Qur'an Mulia (DQ), pada 16 Februari 2024, memenuhi kursi yang tersedia di bawah tenda berwarna biru-putih. Kehadiran para santri di lapangan terbuka itu dalam rangka mengikuti acara pembukaan Wonderkind X Festival.

Acara yang digelar secara rutin di pondok pesantren yang berada di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu

merupakan kegiatan pentas seni dan budaya, serta dimeriahkan dengan kegiatan bazaar yang menjajakan berbagai macam makanan dan minuman.

Kehadiran Wakil Ketua MPR Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, LC., MA., (HNW) di tengah-tengah ratusan santri yang berasal dari berbagai daerah itu disambut oleh Pembina Yayasan DQ, KH. Abdul Hasib Hasan Lc.; Ketua Umum Yayasan DQ, Ustazah Aisyah Abdul Hasib; dan Donatur



DQ, Prof. Dr. Endang Dwi Amperawati dll.

Kepada wartawan. HNW mengapresiasi kegiatan Wonderkind X Festival. "Di tengah berbagai tantangan kemajuan zaman, santri tetap bisa menyelenggarakan kegiatan yang sangat future dimension," ujarnya. Menurut HNW, acara itu adalah suatu bukti santri DQ siap menyambut dan berkontribusi dalam era yang disebut Bonus Demografi atau Indonesia Emas 2045.

Menurut HNW yang juga Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu, Wonderkind X Festival amat dipentingkan, perlu didukung, dan disemangati. "Mudah-mudahan Wonderkind X Festival menjadi tren dan diikuti oleh seluruh pesantren lainnya," harapnya.

Dinamika yang positif dari para santri itulah, kata HNW, membuat pesantren semakin banyak diminati oleh para orangtua untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Di tanah air terdapat lebih dari 25 ribu pesantren, baik tradisional maupun modern, dan ada di berbagai kota dan desa. "Di pesantren saat ini berbagai bidang ilmu diberikan," ujar santri Gontor tahun 1970-an itu.

Lebih lanjut, alumni Universitas Madinah, Arab Saudi, itu mengatakan, sistem pendidikan pesantren memiliki kekhasan. Nilai-nilai etika dan moral ditekankan. "Etika amat sangat dipentingkan di pendidikan pesantren," paparnya. Bahkan, di kalangan pesantren diajarkan bahwa etika merupakan asas daripada keberadaan bangsa dan negara. Ada ungkapan yang populer di sana, kalau masih ada etika maka bangsa dan negara masih ada, namun kalau etika hilang maka bangsa dan negara ini akan hilang pula.

Lebih lanjut dikatakan, etika yang diajarkan di pesantren tidak hanya bagaimana diamalkan dalam keseharian oleh para santri, namun santri juga harus memberikan contoh sekaligus mengajarkan nilai dan amalan etika kepada masyarakat, terutama generasi muda, generasi millennial. "Bila santri dan generasi millennial menjalankan nilai-nilai etika



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

maka generasi muda akan berkontribusi positif menyelamatkan bonus demografi, menyongsong Indonesia Emas 2045,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, HNW menekankan pentingnya pengulangan peran generasi muda. Diungkap, di tahun 1924 kali pertama kata Indonesia muncul. Kata Indonesia dimunculkan oleh para pemuda pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda. Pada masa itu para pelajar Indonesia yang kuliah di Belanda dan negara-negara di Timur Tengah memiliki visi dan etika yang sangat bagus. “Baik etika pribadi maupun etika dalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara,” paparnya.

Bukti dari baiknya etika adalah mereka tidak terbawa oleh kehidupan yang bernuansa Barat yang melakukan penjajahan terhadap negara mereka Indonesia. “Dengan etika yang dimiliki, mereka justru memberikan pencerahan pada paham kebangsaan dan keumatan, dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,” tuturnya.

Di masa yang sekarang, HNW berharap agar santri lebih maju lagi, agar kekhawatiran ketidakmampuan generasi muda dalam menyambut bonus demografi bisa ditepis. “Bila generasi muda sekarang memiliki etika buruk maka ke depan kita akan memanen sesuatu yang juga buruk. Juga sebaliknya,” tambahnya. □



Implementasi Sila-sila Pancasila

-  - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
-  - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.
-  - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
-  - Berhenti saling pendapat, mulailah mencari mutakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
-  - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 NKRI Sebagai Bentuk Negara
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

MPR Berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) ikut berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum 2024 yang diselenggarakan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, SE., MM., menyebutkan, partisipasi MPR dalam Pameran Kampung Hukum 2024 ini untuk memperkenalkan kelembagaan MPR dan produk-produk yang dihasilkan MPR, serta program dan kegiatan MPR.

"Kami hadir di Pameran Kampung Hukum ini untuk memperkenalkan kelembagaan dari MPR, produk-produk yang dihasilkan MPR,

dan program serta kegiatan yang dilaksanakan MPR sampai tahun 2023 kemarin," kata Siti Fauziah, usai pembukaan Pameran Kampung Hukum yang diselenggarakan MA, di JCC, Senin (19/2/2024). Pameran ini digelar selama dua hari, 19 dan 20 Februari 2024. Pameran Kampung Hukum ini dibuka secara resmi oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH, MH.

Menurut Siti Fauziah, MPR selalu berpartisipasi dalam kegiatan Pameran Kampung Hukum yang biasanya diselenggarakan setiap tahun. Namun, pada masa pandemi Covid-19, MA tidak menggelar Pameran Kampung Hukum. Setelah tiga tahun

vakum, pada 2024 ini MA kembali menyelenggarakan Pameran Kampung Hukum. "Bagi MPR, keikutsertaan dalam Pameran Kampung Hukum ini sudah menjadi tradisi. Setiap penyelenggaraan Pameran Kampung Hukum, MPR selalu berpartisipasi," ujarnya.

Siti Fauziah mengungkapkan, Pameran Kampung Hukum ini juga diikuti lembaga-lembaga negara lain, institusi swasta, dan Mahkamah Agung sendiri. Setiap peserta Pameran Kampung Hukum memperkenalkan institusinya masing-masing dan memamerkan produk-produk dari masing-masing lembaga tersebut. Di booth MPR, diperkenalkan mengenai kelembagaan MPR, Pimpinan MPR, produk-produk MPR, kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR.

"Kami juga melengkapi dengan kuis-kuis kepada pengunjung dengan hadiah kenang-kenangan dari MPR. Kuis ini digemari para pengunjung, baik peserta umum maupun dari MA sendiri," tuturnya. Peserta umum dalam Pameran Kampung Hukum ini datang dari berbagai kalangan, termasuk dari perguruan tinggi.

Siti Fauziah berharap, kehadiran dan partisipasi MPR dalam Pameran Kampung Hukum ini membawa manfaat bagi MPR dan masyarakat pada umumnya. "Melalui partisipasi MPR dalam kegiatan Pameran Kampung Hukum ini diharapkan bisa menambah wawasan masyarakat terhadap eksistensi atau keberadaan lembaga MPR," imbuhnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Sekretariat Jenderal MPR, Indro Gutomo, menambahkan, keikutsertaan MPR dalam Pameran Kampung Hukum ini lebih kepada upaya diseminasi hukum ketatanegaraan. Artinya, produk-produk MPR telah menjadi produk hukum ketatanegaraan, misalnya Ketetapan MPR, Keputusan MPR, Peraturan MPR, juga ada risalah perubahan UUD 1945. "Semuanya adalah produk hukum ketatanegaraan," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, MPR memiliki Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Melalui Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan ini



dilakukan kajian-kajian ketatanegaraan. Hasil dari kajian ketanegaraan berupa buku dan jurnal. “Maka kita berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum ini dengan memamerkan buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan kajian hukum ketata-

negara,” katanya.

Pameran Kampung Hukum 2024 ini diantaranya diikuti MPR RI, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Tim Pembaharuan Mahkamah Agung, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lainnya. □

BSC

Hadir di Laptah Mahkamah Agung

Siti Fauziah: Kemajuan Kinerja MA Bisa Jadi Tolok Ukur MPR Bergerak Maju

Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., hadir di acara Sidang Pleno Istimewa Mahkamah Agung (MA) dengan agenda penyampaian Laporan Tahunan (Laptah) MA Tahun 2023. Sidang Pleno yang mengambil tema: ‘Integritas Kuat Peradilan Bermartabat’ ini digelar di ruang Plenary Hall Jakarta Convention Centre, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Hadir dalam acara tersebut Presiden RI Joko Widodo, Ketua MA Prof. Dr. Syarifuddin, SH., MH., Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Kamar MA, Hakim Agung, Hakim Adhoc, para Ketua Mahkamah Agung dari Malaysia, Singapura, Kuwait, Wakil Ketua MA Qatar, Delegasi Sudan, Australia, Cina, dan Rusia.

Juga turut hadir Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad dan para Pimpinan serta anggota lembaga-lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para duta besar negara sahabat, para purna bakti pimpinan MA, dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan undangan lainnya.

Usai mendengarkan dan menyimak pemaparan disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr. Syarifuddin, SH., MH., dalam Laptah MA 2023 itu, Plt. Sesjen MPR Siti Fauziah mengatakan: “Saya menyimak banyak sekali kemajuan dari kinerja MA, yang bisa menjadi tolok ukur, juga motivasi bagi MPR untuk juga bergerak maju meraih prestasi,” ujar Ibu Titi, sapaan Siti Fauziah.

Ada satu poin penting yang digarisbawahi oleh Siti Fauziah yang menjadi tolok ukur kemajuan kinerja MA, yakni kesiapan MA dalam menghadapi era globalisasi. Terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi di era digital saat ini dan ke depan. Seperti penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dan aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yang dikembangkan putera-puteri Indonesia di MA.

Hal tersebut, menurut Ibu Titi, memacu MPR untuk meningkatkan kemampuan

Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad meninjau booth MPR RI, di acara Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung yang dilaksanakan sejak tanggal 19 hingga 20 Februari 2024. “Alhamdulillah, beliau Bapak Fadel Muhammad memberi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

teknologi informasinya, yang sekarang sedang dibangun dan berproses menuju kualitas yang lebih baik. “Memang sudah menjadi tuntutan zaman, semua berbasis teknologi digital yang harus diikuti agar tak tertinggal,” paparnya.

Siti Fauziah mengungkapkan, dengan tujuan ingin membangun kinerja MPR yang lebih baik itulah ia kerap menghadiri berbagai acara yang memberikan pencerahan serta wawasan baru dan segar untuk pengembangan organisasi, seperti kegiatan Sidang Pleno Istimewa MA ini.

Usai acara, Siti Fauziah mendampingi

respon sangat baik saat meninjau. Kepada beliau, saya menjelaskan terkait partisipasi MPR di ajang Pameran Kampung Hukum ini,” tambah dia.

Siti Fauziah juga menjelaskan, respon dan ketertarikan peserta pameran yang mayoritas para hakim dan mereka yang berkecimpung di dunia hukum ini sangat besar. Mereka sangat tertarik dengan produk-produk hukum keluaran MPR. “Intinya, apa yang MPR hadirkan di pameran ini memang sangat cocok dan dibutuhkan peserta,” pungkasnya. □

DER

FKP MPR RI Bersama MGMP PPKn Kota Depok

Siti Fauziah : MPR Perlu Masukan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Depok, Jawa Barat. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, S.E., M.M., menyebutkan, penyelenggaraan FKP ini untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik MPR RI.

“FKP MPR ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal

MPR dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan FKP ini tetap mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada,” kata Siti Fauziah dalam Pembukaan FKP MPR RI Bekerjasama dengan MGMP PPKn SMP Kota Depok, di Ballroom The Margo Hotel Depok, Senin (26/2/2024).

FKP MPR dengan tema: “Evaluasi Pelayanan Publik MPR RI Melalui Penerimaan Delegasi” ini dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno, S.E., M.M.; Narasumber Dra. Titik Sugihartilawati Dewi,

M.M.; Kepala Bagian Hukum Setjen MPR Indro Gutomo, S.H., M.H.; Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR Yenita Revi, S.E.; Kepala sekolah, Pengawas, dan Guru PPKn SMP.

Siti Fauziah mengungkapkan, FKP yang diselenggarakan bersama MGMP PPKn SMP Kota Depok merupakan FKP yang pertama pada tahun 2024 ini. “Dengan melibatkan para guru yang tergabung dalam MGMP PPKn SMP Kota Depok sebagai salah satu unsur pengguna layanan, kami berharap peserta FKP ini dapat memberikan kontribusi aktif untuk pengembangan dan perbaikan pada layanan publik MPR RI, khususnya pada locus penerimaan delegasi,” katanya.

Siti Fauziah yang akrab disapa Bu Titi menambahkan, melalui kegiatan ini para peserta FKP, khususnya guru-guru PPKn dapat mengenal lebih dekat tentang kelembagaan MPR dan locus-locus pelayanan publik yang ada di MPR, serta dapat memberikan masukan dan saran melalui sesi diskusi “MPR Mendengar”.

Menurut Siti Fauziah, locus penerimaan delegasi MPR cukup penting sebagai wahana belajar empiris bagi peserta didik. “Para guru (MGMP) PPKn bisa mengajak para siswa untuk berkunjung ke MPR. Dengan berkunjung langsung ke MPR, para siswa dapat memperkuat pengetahuan yang telah diperoleh di kelas tentang MPR RI sebagai lembaga negara yang ada di Indonesia. Ketika berkunjung ke MPR, kita akan memberi penjelasan lebih jauh tentang kelembagaan dan kegiatan-kegiatan di MPR,” jelasnya.

“Kami akan menyambut dengan sangat baik delegasi, khususnya dari lembaga pendidikan maupun masyarakat umum, yang ingin datang berkunjung dan melihat langsung gedung MPR. Silakan berkunjung ke MPR. Caranya, dapat berkiriman surat terlebih dahulu kemudian akan kami tindaklanjuti dan agendakan,” sambungnya.

Dalam rangkaian penerimaan delegasi, lanjut Siti Fauziah, peserta didik mendapatkan



pemaparan materi yang disampaikan dengan cara interaktif disertai pemutaran video tentang MPR hingga kuis-kuis. Selain itu, delegasi juga dapat melihat langsung ikon yang ada di kompleks parlemen, khususnya ruang Sidang Paripurna tempat para anggota dewan bersidang.

Selain itu, delegasi juga dapat mengunjungi Perpustakaan MPR. “Kami memiliki cukup banyak koleksi buku. Bahkan, ada juga beberapa koleksi khusus yang hanya dimiliki oleh MPR RI seperti jurnal-jurnal, hasil kajian, dan risalah Sidang-Sidang MPR. Apabila belum sempat berkunjung ke Perpustakaan MPR, koleksi buku MPR RI bisa diakses melalui aplikasi MPR Digital Library dan Buku Digital MPR RI yang saat ini tersedia pada platform android playstore,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno, menyambut baik kemitraan institusi pendidikan dengan lembaga negara MPR RI. Kemitraan dengan lembaga negara, khususnya MPR RI,



diharapkan para siswa akan lebih mengenal secara langsung dan menguatkan pemahaman tentang kelembagaan MPR beserta wewenang dan tugasnya.

“Kemitraan dengan lembaga negara, khususnya MPR RI, tentu akan lebih menguatkan pemahaman siswa terhadap

lembaga negara, tentang nilai-nilai kebangsaan, dan kesadaran hukum sehingga para siswa mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dengan berkunjung secara langsung ke lembaga tersebut maka para siswa bisa belajar secara kontekstual,” katanya. □

FKP MPR Bersama MGMP PPKn SMP Kota Depok

Hasilkan Rekomendasi Perlunya Webinar dan MPR Goes To School

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bekerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Depok, Jawa Barat. Dengan tema: “Evaluasi Pelayanan Publik MPR RI Melalui Penerimaan Delegasi,” FKP ini menghasilkan beberapa masukan berupa usulan, saran, dan juga rekomendasi.

Melalui Forum Komunikasi Publik ini para anggota MGMP PPKn SMP Kota Depok menganggap perlu adanya kegiatan Webinar dan MPR Goes to School. Kedua usulan ini tertuang dalam rekomendasi yang dihasilkan oleh FKP tersebut. Dan, usulan webinar itu berkaitan dengan tema kelembagaan MPR dan ketatanegaraan untuk memperluas cakrawala dan wawasan anggota MGMP PPKn sehingga



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bisa menjadi bahan ajar untuk peserta didik.

Selain itu, MGMP PPKn SMP Kota Depok juga mengusulkan kegiatan lainnya, termasuk “Ngopi Bareng” dengan Sekretariat

Jenderal MPR. MGMP PPKn SMP Kota Depok berencana melakukan kunjungan rutin ke MPR. Maka, pihaknya menganggap perlu adanya MoU antara MGMP PPKn SMP Kota



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Depok dan Sekretariat Jenderal MPR RI. Usulan lainnya, agar MPR membuat virtual tour, dan video-video pendek (animasi) tentang kelembagaan, kewenangan, dan tugas-tugas MPR untuk menunjang pembelajaran, terutama terkait dengan ketatanegaraan.

Usulan, saran, dan masukan itu dihasilkan dalam diskusi dengan narasumber terdiri dari: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Jenderal MPR Indro Gutomo, SH., MH.; Dra. Titik Sugihartilawati Dewi, MM., dari MGMP PPKn SMP Kota Depok; Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR, Yenita Revi, SE. Acara FKP yang

berlangsung di Ballroom Margo Hotel Depok, Senin (26/2/2024), itu dihadiri oleh para pengawas sekolah, kepala sekolah, dan para guru yang tergabung dalam MGMP PPKn SMP Kota Depok.

Menanggapi usulan dan masukan, serta rekomendasi itu, Indro Gutomo menyatakan, MPR memang berharap, melalui FKP ini MGMP PPKn SMP Kota Depok bisa memberikan usulan, saran, masukan, serta rekomendasi guna peningkatan kualitas pelayanan publik MPR RI. "Usulan, saran, masukan, dan rekomendasi itu akan ditindaklanjuti oleh MPR RI," ujarnya.

Indro Gutomo mencontohkan dalam

penyelenggaraan FKP pada tahun lalu, MPR pernah mendapat rekomendasi untuk membuat *TikTok* untuk memperkenalkan lembaga MPR. Rekomendasi itu pun sudah dilaksanakan MPR. "Ternyata, pembuatan *TikTok* dengan tema kelembagaan MPR mendapat respon dari masyarakat," ujarnya.

Indro Gutomo pun menyambut baik sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari FKP bersama MGMP PPKn SMP Kota Depok ini. "Kita sudah mencatat usulan dan rekomendasi dari FKP ini. Seperti perlunya MoU antara MGMP PPKn dan Sekretariat Jenderal MPR. Untuk acara *Ngopi Bareng* bisa diikuti sekitar 20 orang sehingga diskusinya akan lebih menarik," katanya.

Dalam diskusi dengan MGMP PPKn SMP Kota Depok juga terungkap beberapa permasalahan dalam pelayanan publik MPR melalui penerimaan delegasi, seperti pemohon harus menunggu berapa lama surat pengajuan kunjungan ke MPR disetujui, perlunya informasi rundown dalam penerimaan delegasi kepada sekolah, para guru dan siswa harus berjalan jauh dari tempat parkir bus menuju gedung MPR, perlunya anggota MPR hadir dan menerima delegasi.

Penerimaan delegasi baik dari masyarakat umum maupun institusi pendidikan (SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi) yang datang ke MPR merupakan amanah dari pelayanan publik, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, penerimaan delegasi juga untuk mendukung visi MPR menjadi Rumah Bangsa, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat.

Pada tahun 2020 Sekretariat Jenderal MPR tidak menerima delegasi, karena masih dalam masa pandemi Covid-19. Baru pada akhir 2021, Setjen MPR hanya menerima dua delegasi. Pada tahun 2022, delegasi yang datang ke MPR sebanyak 29 delegasi, dan pada Januari hingga Desember 2023 Setjen MPR menerima sebanyak 71 delegasi. Sedangkan pada tahun ini, sampai Februari 2024, Setjen MPR sudah menerima sebanyak 7 delegasi. □



Penghargaan Pengguna KKP untuk MPR

Siti Fauziah: Kita Akan Terus Meminimalisir Pemakaian Uang Tunai

Plt. Sesjen MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., menyatakan, yakin ke depan kita (MPR-red) mampu membatasi pembayaran secara tunai dan menggantikannya dengan cara *cashless*.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menerima penghargaan sebagai lembaga negara yang sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam bertransaksi. Adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Jakarta VII menyerahkan penghargaan itu pada saat berlangsungnya Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan KPPN Jakarta VII Award Tahun 2023 di Aula Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Rabu (21/2/2024). Dan, penghargaan itu diterima oleh Pelaksana

Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM.

Menanggapi penghargaan yang diterimanya, Siti Fauziah mengucapkan syukur dan terima kasih atas prestasi yang didapat. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja yang selama ini sudah dilaksanakan. Dan, penghargaan ini akan memacu MPR untuk lebih meningkatkan penggunaan KKP di setiap transaksi, sebagaimana dianjurkan selama ini.

“Saat ini kita baru peringkat dua, artinya banyak yang masih bisa ditingkatkan untuk

mengejar prestasi yang diraih sekarang. Kami juga menyadari, banyak transaksi yang bisa dilakukan dengan non tunai. Intinya, kita akan terus berusaha hingga seminimal mungkin mengeluarkan uang *cash*,” ujar Bu Titi, sapaan Siti Fauziah.

Secara internal, menurut Bu Titi, MPR sangat mendukung digunakannya sistem pembayaran non tunai. Karena, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah akan meminimalisir risiko yang bisa timbul, termasuk masalah keamanan. Selain itu, pembayaran menggunakan KKP mudah untuk dilakukan pengecekan dan sampai ke sasaran yang tepat.

“Di MPR, pembayaran gaji dan tunjangan sudah tidak memakai uang tunai. Tetapi, pembayaran kegiatan yang sifatnya langsung kepada masyarakat, kita masih terkendala. Contohnya adalah pembayaran transport peserta kegiatan sosialisasi. Sulit rasanya, kita meminta nomer rekening seluruh peserta,” ungkap Bu Titi.

Ke depan, Siti Fauziah berharap, seluruh jajaran MPR bisa memperketat pemakaian uang tunai. Karena sudah terbukti, pemakaian KKP lebih aman dan efisien.

“Saya yakin, ke depan kita mampu membatasi pembayaran secara tunai, dan menggantikannya dengan cara *cashless*. Apalagi, dalam pengerjaannya, pembayaran nontunai itu lebih aman, efisien dan mudah dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. □



Evaluasi Kinerja dan Penyampaian LKIP Tahun 2023

Siti Fauziah: Pentingnya Meningkatkan Kinerja Agar Capaian Lebih Baik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PEJABAT dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR, Kamis, 29 Februari 2024, memenuhi Ruang Delegasi, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Kehadiran mereka di ruang yang berada di lantai 2 Gedung Nusantara V itu dalam rangka mengikuti acara: 'Evaluasi Kinerja dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023'.

Hadir dalam acara itu, Plt. Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR, Siti Fauziah, SE., MM.; Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi, Hentoro Cahyono, SH., MH.; Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Dra. Triyatni; dan Kepala Biro Pengkajian Konstitusi, Heri Herawan, SH.

Dalam pertemuan itu, Triyatni memaparkan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh berbagai deputi, biro, bagian, subbagian, badan, dan unit di lingkungan Setjen MPR. Disebut prosentase kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun serta berbagai hambatan yang dihadapi.

Usai menerima laporan tentang capaian dalam LKIP Tahun 2023, Siti Fauziah menyatakan apresiasinya terhadap seluruh capaian kinerja dari seluruh deputi, biro, bagian, subbagian, badan, dan unit. "Saya apresiasi kepada tim penyusun LKIP yang tepat waktu telah menyelesaikan laporan",

ujarnya. "Saya bangga atas kinerja ini", tambahnya.

Siti Fauziah mengakui, dalam melaksanakan kinerja pasti ada berbagai kendala dan tantangan sehingga membuat beberapa kinerja mengalami penurunan. "Kekurangan yang ada akan kita perbaiki di tahun 2024," tegasnya. Hambatan yang membuat kinerja menurun dikatakan bisa dimaklumi, namun permakluman itu ditegaskan tidak bisa ditoleransi.

Menurut Siti Fauziah, kinerja di tahun 2023

menurun dibanding pada tahun 2022. Pada tahun 2022 nilai RB adalah BB, namun pada tahun 2023 nilai RB-nya menjadi B. Melihat capaian yang demikian, Siti Fauziah mengajak kepada semua untuk instropeksi. "Mudah-mudahan di tahun 2024 kita bisa menaikkan kembali capaian yang ada," paparnya.

Perempuan asal Kota Bandung, Jawa Barat, mendorong kepada seluruh pegawai di MPR untuk meningkatkan kinerja agar indikator kinerja yang ideal bisa dicapai.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Indikator kinerja, RB, tingkat nasional rata-rata 76,81, sementara RB MPR pada angka 69,11. “Bagus atau tidak, itu semua merupakan hasil dari kerja kita,” tuturnya. Agar RB yang dicapai seperti yang diharapkan, Siti Fauziah mendorong agar semua pegawai meningkatkan kinerjanya. “Saya rasa kita bisa meningkatkan RB”, tuturnya.

Salah satu kiat untuk meningkatkan kinerja, jelas Siti Fauziah, maka penting adanya mutasi dan rotasi. Dengan adanya rotasi dan mutasi diharapkan muncul semangat baru. Dalam melakukan rotasi dan mutasi, dirinya menyebut melibatkan tim penilaian kinerja. Dengan melibatkan tim penilaian kinerja, di

sana ada pertimbangan-pertimbangan dalam memutasi dan merotasi pegawai.

Dalam rotasi dan mutasi digunakan metoda yang tidak memindahkan pegawai dalam satu ruangan secara keseluruhan. Masih ada pegawai lama yang dipertahankan agar bisa menularkan ilmunya kepada pegawai yang baru.

Siti Fauziah mengingatkan, di tahun ini, MPR banyak melaksanakan berbagai sidang. Disebut Sidang Tahunan MPR, Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, Sidang Pelantikan Anggota Baru MPR, Sidang Pelantikan Pimpinan MPR, dan Sidang Pelantikan Presiden. “Tahun ini kita tidak berhenti pada satu kegiatan”, ungkapnya. □





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Achmad Baidowi, Anggota MPR Fraksi PPP

Ambang Batas Parlemen 2,5% Adalah Angka Moderat

MAHKAMAH Konstitusi (MK) RI memutuskan menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional untuk pemilihan umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan MK yang menghapus ambang batas parlemen 4% ini mulai berlaku pada Pemilu 2029 dan seterusnya. Dengan kata lain, ketentuan ambang batas parlemen 4% tetap berlaku pada Pemilu 2024.

Keputusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 atas gugatan judicial review yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah

dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan," ujar Ketua MK, Suhartoyo, dalam Sidang Pengucapan Putusan MKRI yang digelar pada Kamis, 29 Februari 2024.

Pasal 414 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: "Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR". Perludem mempersoalkan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa "paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional".

MK menyatakan, ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% suara sah nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat,

keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. MK menegaskan, putusan itu tidak menghapus ambang batas parlemen, melainkan meminta kepada para pembuat undang-undang untuk mengoreksi aturan ambang batas parlemen. Besaran ambang batas parlemen diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan angka yang rasional dan masuk akal.

Putusan MK ini menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya tanggapan dari anggota MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos, M.Si. Berikut penuturannya.

MK telah memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional yang mulai berlaku pada Pemilu 2029 dan seterusnya. MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengoreksi regulasi tentang ambang batas parlemen dan

menentukan angka yang rasional. Apa komentar Bapak?

Kalau kita membaca putusan MK, jangan hanya dibaca putusannya saja, tetapi latar belakang putusan. Dalam pertimbangan hukumnya, salah satunya MK menyatakan perubahan norma ambang batas parlemen adalah tidak mengabaikan proporsionalitas pemilu dan meminimalisir suara yang terbuang. Artinya, MK menilai, ambang batas parlemen sebesar 4% dikontekstualisasikan dengan kenyataan setiap pemilu banyak suara yang terbuang.

Putusan MK ini mendapat tafsiran yang berbeda. Ada yang menafsirkan putusan MK tersebut berarti ambang batas parlemen diperkecil (kurang dari 4%), tapi ada pula yang menyebutkan ambang batas parlemen justru lebih besar dari 4%. Bagaimana soal penafsiran putusan MK ini?

Dalam putusannya, MK memang tidak menyebutkan soal angka atau besaran ambang batas parlemen tersebut. Putusan MK bukan semata-mata untuk partai politik tetapi bagaimana menyelamatkan aspirasi (suara) masyarakat yang ditujukan pada partai tetapi tidak ada perwakilan di DPR. Misalnya, suara Fahri Hamzah dari Partai Gelora atau suara TGB Zainul Majdi dari Perindo sangat besar, tetapi tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Kalau masalahnya di DPR, hal itu bukan sesuatu yang rumit. Sebab, kita pernah mengalami hal seperti itu. Pada tahun 1999 dan 2004, banyak partai yang masuk ke parlemen tetapi kursinya sedikit, semua dikumpulkan atau bergabung menjadi fraksi. Sekarang praktik seperti itu masih ada di tingkat DPRD, banyak partai yang bergabung membentuk fraksi.

Berapa besaran ambang batas parlemen yang ideal?

Angka *parliamentary threshold* yang ideal menurut kami (Partai Persatuan Pembangunan) adalah 2,5%. Angka ini berarti kembali ke aturan awal penetapan ambang batas parlemen pada tahun 2009. Pertama kali ambang batas parlemen diterapkan pada tahun 2009 adalah 2,5%. Dengan angka 2,5% itu pun penyederhanaan partai di parlemen masih bisa dilakukan. Pada waktu itu ada 9 fraksi di parlemen.

Sebelumnya diberlakukan *electoral threshold* pada tahun 1999 dan 2004.

Artinya, semua partai yang mendapat kursi lolos ke parlemen. Sehingga pada waktu itu ada fraksi yang dibentuk merupakan gabungan partai atau fraksi gabungan karena jumlah kursi partai yang tidak cukup untuk membentuk fraksi (kurang dari 11 kursi untuk membentuk fraksi dan kurang dari jumlah komisi), sehingga partai-partai itu bergabung. Itu *electoral threshold*. Ketika ingin mengikuti kembali Pemilu, partai politik itu berganti nama.

Parliamentary threshold mulai diberlakukan pada tahun 2009 (hasil Pemilu 2009). Ambang batas parlemen yang ditetapkan pada waktu itu 2,5%, dan angka itu adalah moderat. Kalau tujuan



ditetapkannya ambang batas parlemen adalah untuk penyederhanaan partai di parlemen, maka bisa dikatakan jumlah partai di parlemen pada waktu itu sama seperti DPR pada saat ini, yaitu sebanyak sembilan partai. Itulah angka yang moderat, dan tidak terlalu banyak suara yang terbuang.

Apakah angka 2,5% bisa mencerminkan proporsionalitas seperti diharapkan dalam putusan MK itu?

Tetap ada proporsional karena dengan ambang batas 2,5% bisa mencerminkan multi partai politik dan multi kultural. Sebab, dengan ambang batas itu sebarannya pun semakin luas dan representasi suara rakyat pun semakin banyak yang terakomodir di parlemen. Pada Pemilu 2014 lalu banyak

suara yang terbuang, sekitar 9% suara (suara partai-partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen). Suara yang diraih partai-partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen menjadi sia-sia. Kalau ingin tidak ada suara yang terbuang, ambang batas parlemen 0%. Itu sebabnya MK memberikan kewenangan kepada pembentuk UU untuk menghitung ulang, berapa ambang batas parlemen yang cocok.

Apakah mungkin ambang batas fraksi seperti pada tahun 1999 dan 2004 diberlakukan kembali?

Sebenarnya dengan ambang batas 2,5%, suara pemilih yang terbuang akan semakin kecil. Tetapi, kalau kita mau kembali ke Pemilu 1999 dan 2004, dipakai ketentuan *electoral threshold*. Semua partai yang mendapat suara pemilih, masuk ke DPR. Untuk membentuk fraksi, partai-partai yang memiliki suara atau kursi sedikit bisa bergabung. Pada Pemilu 1999 dan 2004 ada fraksi gabungan di DPR karena jumlah kursinya tidak mencukupi setara dengan jumlah komisi. Misalnya, jumlah komisi di DPR saat ini ada 11 komisi, sedangkan jumlah kursi partai hanya delapan, maka delapan orang ini bergabung dengan partai lain untuk membentuk satu fraksi. Praktik seperti ini masih diberlakukan di DPRD.

Apakah perubahan norma ambang batas parlemen ini bisa berlanjut pada perubahan ambang batas presiden (*presidential threshold*)?

Putusan MK ini bisa menjadi pintu masuk bagi perbaikan ke depan, bukan hanya soal ambang batas parlemen, tetapi juga hal yang lain, seperti *presidential threshold* dan keserentakan penyelenggaraan pemilu. Putusan MK yang menetapkan pemilu serentak juga menyisakan masalah. *Presidential threshold* yang diatur oleh undang-undang, untuk Pemilu 2024, berdasarkan atau memakai hasil yang diperoleh partai politik pada Pemilu 2019. Padahal kondisi masyarakat pada tahun 2024 sudah berbeda dan berubah selama lima tahun itu.

Bagaimanapun putusan MK itu setara dengan konstitusi, jadi harus diikuti. Karena sudah menjadi putusan sebuah lembaga peradilan, kita hormati apapun putusan itu. Ketika akan merivisi UU Pemilu, putusan MK ini harus menjadi rujukan. □



Tampil di New York Fashion Week Fall 2024



DUA artis cantik Indonesia, **Cinta Laura Kiehl** dan **Natasha Wilona** tampil di New York Fashion Week Fall 2024 di Amerika Serikat, 14 Februari 2024. Di acara bergensi dunia itu, mereka bersanding dengan para seleb dunia papan atas seperti Uma Thurman dan Awkwafina.

Penampilan dua artis Indonesia yang sama-sama berkarier di dunia selebriti sejak usia belia ini menuai pujian. Natasha Wilona, artis kelahiran Jakarta 15 Desember 1998, yang memulai karier aktingnya lewat film *Summer Breeze* pada 2008 ini mengungkapkan, kehadirannya bersama Cinta di acara bergensi itu untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan di dunia selebriti.

"Kami juga ada project atau pekerjaan di sini," timpal Cinta Laura. Karena waktunya bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu, keduanya mengaku ikut nyoblos di TPS yang ada di Amerika. □

DER



Cinta Laura dan Natasha Wilona

Artis Jaga TPS, Berat Loh....

BAGI warga di kawasan Jelupang, Tangerang Selatan, yang menggunakan hak pilihnya di TPS di kawasan itu, tentunya menjumpai wajah seorang artis jebolan Indonesia Idol. Dia adalah **Kunto Aji Wibisono**, artis kelahiran Yogyakarta, 4 Januari 1987. Hari itu Kunto Aji berperan sebagai anggota Linmas. Tugasnya menjaga TPS dan mencatat warga yang akan mencoblos.

Kunto Aji yang hari itu mengenakan seragam Linmas atau Hansip mengaku, memang sudah niat pengen ikut. "Sekalian pengen ngerti piye sih sisteme, kok bisa ada dugaan kecurangan. Malah ada kabarnya (sampai) meninggal. Nah, kebetulan saya dihubungi Bu RT," ungkap artis penerima Anugerah Musik Indonesia 2019 untuk kategori Artis Solo Pria Alternatif Terbaik ini.

Kunto Aji mengaku, untuk menjadi petugas pemilihan suara tak mudah. Pola kerjanya lumayan keras. "Ada gladi resik sampai malam. Tidur 2-3 jam, terus jam 6 pagi harus udah siap. Mulai coblosan sampai selesai penghitungan suara sampai jam 2 malam. Belum paginya ada yang langsung harus ngantor, kan," imbuh Aji. Eh.. honorinya berapa Aji? □

DER



Kunto Aji



Maia Estianty

Pemilu 2014 oke, Nyoblos oke

ARTIS, musisi, dan pengusaha, **Maia Estianty**, mengaku sangat antusias menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 lalu. Artis kelahiran 27 Januari 1976 ini menggunakan hak pilihnya di TPS yang berlokasi di dekat kediamannya.

Mengenakan kaos oblong putih dipadukan dengan celana jeans, pentolan grup Ratu ini bersama sang kakak, Pinky Evianty, dan anak bungsunya, Dul, mengantri di TPS tersebut. Di momen lima tahun sekali itu, Maia punya kesan tersendiri. "Geli an lucu melihat para pendukung masing-masing Capres/Cawapres yang saling adu emosi jika jagonya disinggung.

"Ya begitulah Pemilu, ada lucu dan nada pula seriusnya. Tapi, yang penting, bagi siapapun pemenangnya semoga mampu mengemban tugas negara dengan baik, dan melayani masyarakat dengan baik pula," tandasnya. □

DER

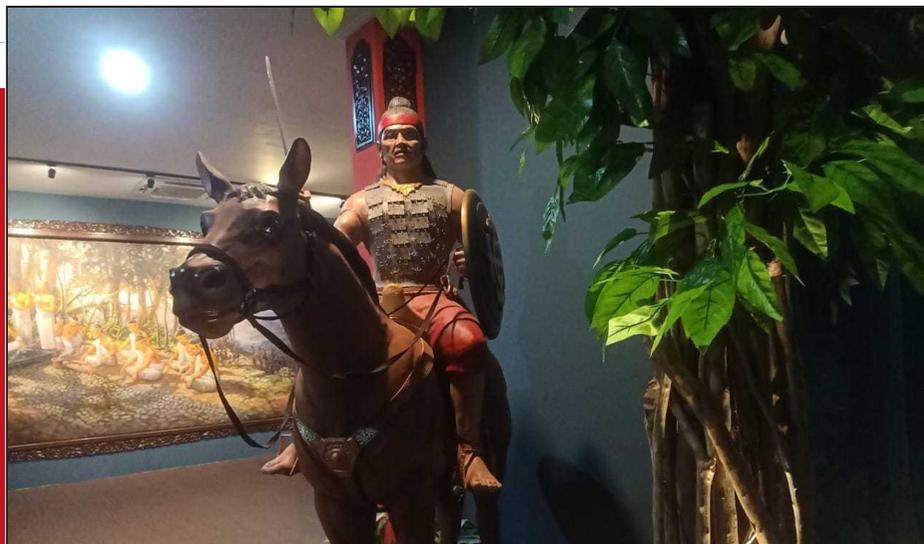


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Galeri Bumi Parawira Mengenalkan Bogor Sebagai Kota Sejak Lama

KOTA Bogor termasuk salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat. Berjudul Kota Hujan, Kota Bogor memiliki keunikan dan eksotisme tersendiri dibanding daerah-daerah lain di Jawa Barat. Demikian menariknya, sehingga praktis Kota Bogor tidak pernah sepi dari kegiatan para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Salah satu kawasan wisata yang kini tengah diperbincangkan oleh masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya adalah Museum atau Galeri Bumi Parawira. Museum ini terletak di lantai 3 Perpustakaan Kota Bogor, di Jl. Kapten Muslihat No. 21, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Letaknya sekitar 200 meter dari stasiun Bogor. Karena itu, cara paling efisien untuk menjangkau tempat ini adalah menggunakan moda kereta api Commuterline. Pengunjung turun di Stasiun Bogor, lalu berjalan kaki sembari menikmati suasana sekitarnya.

Dinamakan Bumi Parawira karena galeri ini menyajikan napak tilas perjalanan Kota Bogor, beserta para pelaku sejarahnya sejak masa kerajaan hingga masa sekarang. Bumi Parawira sendiri berarti Rumah Para Pemimpin yang berani dan berjasa. Kiranya cukup



alasan nama tersebut diberikan untuk Kota Bogoro, karena memang kota ini merupakan kotanya para pemimpin yang berani dan berjasa, serta memiliki tekad yang kuat.

Berbeda dengan galeri pada umumnya, untuk bisa masuk dan menikmati suasana di museum, pengunjung harus mendaftarkan diri dahulu sejak jauh-jauh hari. Dengan cara membuka *website* Galeri Bumi Parawira, kemudian memilih menu pendaftaran yang

ada di sana. Kalau tidak mendaftar terlebih dahulu bukan tidak mungkin Anda terpaksa pulang dengan tangan hampa. Karena setiap hari, jumlah pengunjung yang bisa masuk dan melihat isi galeri dari dekat dibatasi dengan jumlah tertentu saja.

Seperti pengalaman yang *Majalah Majelis* temui, saat berkunjung ke sana beberapa waktu lalu. Saat itu, pihak Perpustakaan, di mana Galeri ini berada, tengah mengadakan lomba dongeng bagi siswa SD. Di hadapan kami, ada beberapa tamu yang ditolak masuk, karena belum mendaftar. Apalagi, saat itu jumlah pengunjung yang mendaftar sudah memenuhi kuota yang disediakan.

Berbagai catatan sejarah ditampilkan di Galeri Bumi Parawira. Antara lain, sejarah Kota Bogor sebagai kota yang selalu dipilih menjadi tempat bertahta dan ibu kota Kerajaan. Mulai dari ibu kota Kerajaan Pajajaran, kemudian Kolonial Belanda memilih Bogor sebagai residen para gubernur jenderal hingga loncatan pertama pergerakan non blok. Semua peristiwa bersejarah yang terjadi di Kota Bogor, dan dikisahkan dalam museum tersebut.

Untuk melihat isi galeri, semua pengunjung harus melalui tangga dua lantai. Di lantai dua,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pengunjung akan diperiksa untuk mengetahui jadwal kunjungan, sesuai pendaftaran yang sudah dilakukan. Dan, ketika di lantai 3 atau sesaat setelah memasuki ruang museum, pengunjung langsung dihadapkan pemandangan yang juga menjadi ikon Kota Bogor, yaitu miniatur kebun raya, yang sarat dengan pohon serta kayu-kayu besar. Suasananya pun sejuk seperti yang bisa didapat di Kebun Raya.

Pasukan Balamati

Sejengkal kemudian, cerita pun dimulai. Para tamu langsung disambut oleh seorang anggota pasukan Balamati, yang dengan gagahnya duduk di atas punggung kuda. Tampak gagah, mengenakan ikat kepala, baju perang dan tanpa alas kaki.

Balamati adalah pasukan khusus kerajaan Pajajaran. Pasukan ini dibentuk untuk mempertahankan kedaulatan dan

pertahanan negara dari ancaman serangan lawan. Balamati merupakan Pasukan elit yang berisi perwira dan ksatria terbaik. Mereka siap menemani sang prabu bertempur di lini paling depan medan peperangan.

Perjalanan selanjutnya menceritakan tentang kejayaan Pajajaran, hingga akhirnya mereka membuat perjanjian dengan Portugis untuk menciptakan koloni dagang, meski risikonya harus menghadapi ancaman gabungan kerajaan Demak-Cirebon. Kedua kerajaan itu merasa urusan dagang mereka terusik sejak lahirnya kongsi dagang antara Pajajaran dan Portugis

Pada bagian ini ditampilkan beberapa lukisan tentang pelantikan Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Aji Di Pakuan Pajajaran Sri sang ratu Dewata, pada 1482. Pada masa ini Pajajaran berkembang menjadi

kerajaan yang sangat besar dengan bala tentara yang sangat kuat. Dan, menjadi kerajaan yang disegani baik kawan maupun lawan.

Di akhir kisah di ceritakan, Pajajaran lambat laun menjadi kerajaan yang lemah. Mereka menderita banyak kekalahan di berbagai medan peperangan. Sementara di dalam kerajaan, Pajajaran makin tak berdaya, akibat politik VOC yang memecah belah. Sedangkan VOC sendiri dalam ancaman besar penyerangan kerajaan Banten.

Setelah penyerangan kerajaan Banten atas VOC di Bogor, cerita dilanjutkan oleh penguasaan Hindia Belanda. Di sana ditemukan kisah pembangunan jalan Deandels selama tiga tahun yang menyebabkan banyak korban jiwa. Pembangunan tersebut menginspirasi lahirnya kebijakan tanam paksa. Yaitu, melaksanakan pekerjaan dengan paksaan tanpa upah. Kebijakan itu muncul meniru pelaksanaan pembuatan jalan Deandels yang saat pembuatannya seluruh upah buruh di korupsi, sehingga para pekerja tidak mendapatkan haknya.

Selain peristiwa-peristiwa tersebut, di galeri juga terdapat kisah-kisah masa perjuangan hingga kemerdekaan. Juga era Orde Lama dan Orde Baru. Di tempat tersebut juga terpampang para foto walikota yang pernah memimpin Kota Bogor. Sebelum keluar dari galeri, pengunjung akan diingatkan peristiwa yang nyaris melululantakkan eksistensi umat manusia. Yaitu, pandemi Covid-19 yang telah memakan banyak korban jiwa. Praktis, tempat tersebut sangat cocok sebagai tujuan wisata pendidikan bagi semua kalangan. □

MBO



Dr. Andreas Hugo Pereira, MA.

Urung Jadi Pesepakbola Profesional

Kini Menjadi Politisi Ulung



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEWAKTU masih kecil dia memiliki cita-cita yang sangat sederhana. Cita-citanya ingin pergi ke luar negeri. Agar cita-cita ke luar negeri bisa tercapai maka dia harus menajarnya lewat profesi sebagai pemain sepakbola profesional. Itulah cita-cita anak kelahiran Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, 31 Mei 1964, bernama Andreas Hugo Pereira, ketika masih belia.

Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Andreas berjuang keras dengan menekuni olahraga sepakbola. Ketika kuliah di jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Andreas aktif di klub Persatuan Sepakbola Mahasiswa. Selain itu, dia juga aktif di organisasi kemahasiswaan — yang kemudian menempa jiwa nasionalismenya—yaitu di Senat Mahasiswa dan organisasi Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI).

Pokoknya, semasa mahasiswa, setiap ada kegiatan olahraga sepakbola, Andreas berusaha selalu tampil. Maklum sepakbola memang cabang olahraga yang digemarinya sejak kecil. Namun, malang tak dapat ditolak, dalam sebuah kegiatan sepakbola di lingkungan kampus Universitas Katolik Parahyangan, Andreas mengalami cedera kaki. Agak berat, yang membuat dia harus mengurungkan niatnya menjadi pemain sepakbola profesional.

Tapi, peristiwa nahas itu tidak membuat Andreas patah semangat. Keinginannya untuk bisa luar negeri, tidak harus dengan cara menjadi pemain sepakbola profesional. Maka, dengan terjadinya peristiwa itu, Andreas kemudian lebih memokuskan perhatiannya di bidang pendidikan organisasi. Dan, ternyata kedua bidang inilah kemudian melambungkan nama Andres menjadi seorang akademisi, dan

seorang politisi yang menuntunnya menjadi anggota DPR RI/MPR RI.

Untuk menjadi orang sukses seperti sekarang ini, Andreas memang harus menapak dari bawah. Andreas Hugo Pereira lahir dan dibesarkan dari keluarga pendidik. Ayahnya, Jeremias Pareira (alm), seorang guru dan juga kepala sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan ibunya, Maria Pricilla da Silva, seorang ibu rumah tangga. Jadi, sinergitas didikan dari ayahnya dan kebersahajaan sang ibu membuat karakteristik dan jiwanya menjadi begitu kuat.

Karakter dan kuatnya nasionalisme Andreas tertempa sejak kecil, karena kegemarannya membaca sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Jangan dikira, era dulu sama dengan sekarang. Dulu, tidak mudah bagi Andreas kecil untuk memuaskan dahaga membacanya, karena dihadapkan pada kenyataan pahit. Kala itu desa tempat tinggalnya, termasuk di sekolahnya, belum tersentuh pembangunan. Buku-buku sangat sulit didapat. Ini kondisi yang sangat menyiksa dirinya bagi anak-anak yang gemar membaca buku.

Beruntung, ayahnya seorang guru. Beliau memiliki beberapa koleksi buku. Tapi, kebanyakan buku yang menjadi koleksi ayahnya tentang Bung Karno. Maklum, ayahnya adalah pengagum berat sang Proklamator. Buku koleksi ayahnya, antara lain: Di Bawah Bendera Revolusi, Manipol USDEK, Tujuh Bahan Indoktrinasi, dan Surat-Surat dari Ende. “Itu buku berat semua,” kata Andreas. Tapi, katanya, karena buku yang tersedia cuma itu maka terpaksa dibaca, meski usianya masih kecil, masih kelas 4 SD. Kondisi itulah yang membentuk Andreas menjadi seorang pengagum Bung Karno, mengikuti jejak ayahnya. Dan, sebagai pengagum Bung Karno, tak salah kiranya kalau dia menyalurkan seluruh hasrat dan kepiawaian berpoltiknya



dengan masuk dan aktif di partai politik, yaitu PDI Perjuangan, partai bentukan puteri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri.

Andreas lahir di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, 31 Mei 1964. Pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama diselesaikan di tanah kelahirannya, NTT. Lalu, pendidikan Menengah Atas (SMA) dirampungkan di Jakarta, dan program sarjana (S1) diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, jurusan Hubungan Internasional FISIP (1982-1986).

Selain sarjana strata 1 (S1), Andreas juga menyandang gelar S2 dan S3. Program S2 diraih pada Program Studi Kawasan Asia Tenggara Fakultas Politik dan Sosiologi, Universitas Passau, Jerman (1992-1996), dan program doktor (S3) diperoleh pada jurusan Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Giessen, Jerman (2000-2003).

Perjalanan karier suami dari Chatarina V. Dwi Indarwati Pareira dan ayah seorang putera, Christian Satriadamai Pareira, ini dimulai sejak meraih sarjana (S1) pada tahun 1986. Andreas sempat aktif sebagai kolumnis lepas di harian Pikiran Rakyat, dari tahun 1987 hingga 1988. Kemudian, mulai tahun 1988 ia banting stir, menekuni profesi sebagai tenaga pendidik atau dosen S1 Jurusan Hubungan Internasional di almamaternya sendiri.

Di era itulah titik balik yang mengubah seluruh kehidupan Andreas. Saat itu, ada seorang profesor menyatakan kekagumannya pada saat ia mengajukan proposal tesis. Profesor ini kemudian bersedia mensponsori Andreas untuk tugas belajar di Universitas Passau di Jerman, pada tahun 1992-1996. Di Universitas Passau ini Andreas mengambil Program Studi Kawasan Asia Tenggara Fakultas Politik dan Sosiologi.

“Banyak sudah pengalaman menarik yang saya alami dan tidak akan pernah dilupakan saat menempuh studi di sekolah tinggi yang posisinya persis di perbatasan Austria itu,” ujar Andreas mengenang masa lalunya. Contohnya, dia pernah mengalami beberapa kali ditangkap polisi Jerman karena dikira pengungsi Bosnia. Dia juga sempat bekerja sebagai penjaga mesin cuci piring di dapur rumah sakit pemerintah Jerman.

Tahun 1998, Andreas memutuskan kembali ke tanah air, dan pada tahun 2003 mengajar di program S2 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Di tahun itu juga Andreas bertekad bulat untuk mempraktikkan ilmu politik dan organisasi yang diperolehnya di bangku kuliah dan organisasi kemahasiswaan. Ia lalu memilih bergabung dengan salah satu partai politik. Dan, pilihannya yang pasti hanya satu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jawa Barat.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kegiatan di kepartaian dimulai dari awal. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, Andreas membuat sebuah kantor sekretariat PDI Perjuangan yang sangat sederhana. Di kantor itu hanya ada sebuah mesin ketik, dengan peralatan kantor lain seadanya. Jadi, dia berkibrah di partai politik di tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Parahyangan. Bahkan, dia kemudian dipercaya menjabat posisi Wakil Ketua Balitbangda PDI Perjuangan Jawa Barat, 1999-2005.

Kemudian, pada tahun 2005 hingga 2010, dia menjabat Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai Wakil Ketua Pengurus Alumni GMNI Jawa Barat, 2001-2006. Dan, di sela kesibukannya membangun PDI Perjuangan di Jawa Barat, Andreas melanjutkan studi S3 Jurusan Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Giessen, Jerman (2000-2003).

Usai merampungkan program S3, ia kembali ke tanah air, dan meneruskan profesi sebagai dosen pada Program Magister (S2) Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran tahun 2004. Kiprah politik yang dijalannya di PDI Perjuangan mengharuskan dirinya (sempat) meninggalkan profesi mengajarnya untuk maju sebagai caleg, yang kemudian terpilih menjadi Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu

(PAW) Dapil Jawa Barat IV Tahun 2005-2009, dan aktif di Komisi I Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Di Parlemen, sosok Adreas memang dikenal karena kepakaran dan profesionalitasnya dalam bidang hubungan internasional dan pertahanan, yang kemudian diimplementasikannya dengan mengabdikan diri pada pelayanan publik dan pengelolaan kebijakan negara melalui partai politik.

Sebagai Wakil Rakyat di DPR RI, Andreas Pareira juga dikenal sangat vokal. Saking vokalnya, ia dijuluki oleh kalangan wartawan sebagai Bapak Alutsista. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pun memberi kepercayaan pada Andreas untuk sejumlah bidang tugas. Pada tahun 2010, ia dipercaya oleh Ketum untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Pertahanan DPP PDI Perjuangan. Di samping itu, dia juga aktif sebagai Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Pertahanan Pengurus Pusat Alumni GMNI (2011- sekarang).

Andreas mengawali karirnya pada tahun 2005 sebagai anggota DPR RI melalui jalur Pengganti Antar Waktu (PAW) pada periode 2004-2009. Pada tahun 2016, Andreas kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dari Dapil NTT I, juga melalui jalur PAW. Tapi,





FOTO-FOTO: STIMEWA

pada periode berikutnya (periode 2019-2024), dia mencalonkan diri kembali dari Dapil NTT I dan terpilih langsung menjadi anggota DPR RI dan ditugaskan di Komisi X bidang Pendidikan, Riset, Olahraga dan Kepariwisata.

Sebagai wakil rakyat di Komisi X DPR RI, Andreas juga sangat vokal menyuarakan aspirasi rakyat dalam pemenuhan kualitas pendidikan di Indonesia. Di antaranya, Andreas menyoroti permasalahan guru honorer. Dia dengan tegas mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia, khususnya guru honorer.

“Dari laporan yang saya terima, sebagian besar guru honorer hingga kini nasibnya masih menggantung dalam proses pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” katanya. Banyak guru, lanjut Andreas, tengah menanti nasib mereka untuk pengangkatan PPPK guru. Menurut Andreas, pemerintah wajib menyelesaikan semua hal ini, mulai dari penyerapan formasi, penempatan guru, hingga jaminan memperoleh kesejahteraan.

Lalu, soal pendidikan nasional. Dia menyebut, pendidikan Indonesia secara umum belum berhasil membentuk peserta didik yang memiliki daya nalar, literasi, dan numerik yang baik. “Ke depan penting bagi negara untuk memerhatikan aspek literasi ini, karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dan tumbuh berkembangnya suatu peradaban masyarakat,” ujarnya.

Di Pemilu 2024 yang hingar bingar ini, Andreas Hugo juga ikut

dalam kompetisi lima tahunan itu. Dia kembali maju sebagai caleg DPR RI PDI Perjuangan dari Dapil NTT I, meliputi wilayah Pulau Flores dan sekitarnya, yang terdiri atas 10 Kabupaten, meliputi Alor, Lembata, Flores hingga Manggarai Barat. □

DER

Biodata

Nama Lengkap : **Dr. Andreas Hugo Pareira, MA.**
 Tempat/Tgl. Lahir : Maumere, NTT, 31 Mei 1964
 Istri : Chatarina V. Dwi Indarwati

Pendidikan:

- S1 Jurusan Hubungan Internasional FISIP, Universitas Katolik Parahyangan (1982-1986)
- S2 Program Studi Kawasan Asia Tenggara Fakultas Politik dan Sosiologi, Universitas Passau, Jerman (1992-1996)
- S3 Jurusan Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Giessen, Jerman (2000-2003)

Riwayat Pekerjaan

- Dosen S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Katolik Parahyangan (1988-2017)
- Dosen S2 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Katolik Parahyangan (2003-2017)
- Dosen S2 pada Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran (2004-2017)
- Peneliti Parahyangan Centre for International Studies Universitas Katolik Parahyangan (1996)
- Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FISIP Universitas Katolik Parahyangan (1998-2000)
- Dosen non aktif FISIP Universitas Katolik Parahyangan (2005-2009)
- Anggota DPR RI (2005-2009)
- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2005-2009)
- Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Katolik Parahyangan (2010-2013)
- Anggota DPR RI (2016-sekarang)
- Anggota Komisi I (2016-2019)
- Anggota Komisi X (2019-sekarang)



Prioritas Pembangunan Desa Adalah Keniscayaan

DEWASA ini, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional, mengingat desa adalah wilayah mandiri yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, dan menopang penguatan fondasi perekonomian negara. Keberpihakan terhadap pembangunan desa dimaksudkan untuk memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pembangunan desa juga menjadi stimulan bagi perubahan sosial yang bermuara pada pemberdayaan masyarakat desa. Dan, yang tidak kalah pentingnya pembangunan desa memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu: Upaya pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta antara desa dan kota.

Desa menjadi titik tumpu dalam upaya pengentasan angka kemiskinan, karena tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan, baik dari aspek persentase angka kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Demikian pula dalam perspektif pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial, pembangunan desa menjadi penyeimbang untuk memangkas jurang perbedaan antara kehidupan di perkotaan dan pedesaan. Tidak dipungkiri bahwa salah satu alasan masih tingginya angka urbanisasi adalah karena adanya ketimpangan pembangunan di kota dan di desa. Kota masih

menjadi magnet yang menggiurkan bagi penduduk desa.

Di sisi lain, kita menyadari bahwa desa adalah tumpuan dalam mewujudkan ketahanan pangan, yang saat ini juga menjadi prioritas, mengingat masih tingginya angka ketergantungan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Tercatat, untuk pemenuhan kebutuhan enam dari sembilan barang kebutuhan pokok kita masih harus mengimpor dari negara lain. Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, kita telah membelanjakan uang sekitar Rp 1.272 triliun untuk berbelanja beras, susu, bawang, garam, daging, dan gula dari pasar internasional.

Ini sebuah ironi, mengingat Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana pertanian merupakan sektor yang masih sangat potensial untuk dikembangkan, tetapi justru mengalami defisit perdagangan buah dan sayuran, yang rata-rata mencapai Rp 19 triliun per tahun. Bahkan, secara peringkat, merujuk data *The Global Food Security Index 2022*, Indonesia menempati posisi ke-10 di Asia dan Pasifik, dan ke-60 di dunia dalam hal ketahanan pangan.

Di sisi lain, kita pun harus memaknai pembangunan desa secara lebih komprehensif. Artinya, seiring dengan perkembangan zaman, di samping potensi sebagai sumber ketahanan pangan, berbagai potensi lain dari desa juga harus digali dan dikembangkan.

Tidak kita pungkiri bahwa salah satu faktor penghambat dalam pembangunan desa adalah tingginya angka urbanisasi. Banyak masyarakat desa, khususnya generasi muda, yang tidak tertarik untuk tinggal di desa karena menganggap tidak ada yang bisa diharapkan dari kehidupan di desa, khususnya dari sisi ekonomi. Kehidupan di desa "kalah pamor" dengan kehidupan kota.

Oleh:
Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.
Ketua MPR RI



Oleh karena itu, pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa, sedemikian rupa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa seharusnya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran, sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. Salah satunya adalah dengan mengembangkan program DEWA (Desa Wisata Agro), DEWI (Desa Wisata Industri), dan DEDI (Desa Digital).

Gambaran yang saya kemukakan di atas menunjukkan bawa kebijakan untuk memprioritaskan pembangunan desa adalah sebuah keniscayaan. Kita bersyukur bahwa kehadiran dana desa telah mendorong percepatan pembangunan desa. Namun, penting dicatat bahwa alokasi dana desa ini harus disertai dengan monitoring dan supervisi yang memadai, agar penggunaannya benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Dalam konteks pembangunan desa, khususnya program dana desa, potensi terjadinya praktik korupsi juga menjadi persoalan yang patut diwaspadai. Besarnya potensi ini berbanding lurus dengan besarnya dana desa yang cukup signifikan.

Merujuk pada data statistik, kita patut prihatin bahwa penyalahgunaan dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara akumulatif, selama periode 2015 hingga 2022, KPK telah mencatat 851 kasus korupsi dana desa, yang melibatkan 973 orang pelaku sebagai tersangka. Jumlah Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi juga terus meningkat. Selama periode 2019 hingga 2022, sudah 510 Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi

dana desa.

Yang tidak boleh kita lupakan, bahwa pembangunan desa tidak semata-mata berdimensi materiil, yang hanya mengejar pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur fisik. Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, yang ditopang oleh derasnya arus globalisasi, desa telah menjadi wilayah yang rentan terhadap berbagai pengaruh negatif, mulai dari ancaman masuknya paham radikalisme dan ekstrimisme, bahaya penyalahgunaan narkoba, hingga penggerusan nilai-nilai kearifan lokal oleh budaya asing.

Inilah pentingnya acara yang kita selenggarakan pada hari ini, yaitu dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen kolektif kita, untuk bersama-sama memperkuat kesadaran dan wawasan kebangsaan kita, melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Empat Pilar MPR RI tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus kebangsaan bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu dalam kemajemukan bangsa. □

Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan sambutan saat Sosialisasi Empat Pilar MPR pada Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI), di Kecamatan Bobotsari, Purbalingga, Februari 2024.

Tantangan Menegakkan Hukum dan Konstitusi

Hukum ditulis agar tata kehidupan menjadi adil dan tidak memihak, namun dalam realita, banyak tantangan yang menjebak hukum itu sendiri, seperti aparat hukum, lemahnya budaya hukum, serta perilaku feodal dan paternalisme. Akibatnya, masalah hukum tak kunjung selesai meski banyak kebijakan untuk menegakkan hukum.

KARUT marutnya masalah bangsa, terutama di tahun-tahun politik, semua tak terlepas dari lemahnya penegakan hukum dan tak tegaknya pelaksanaan konstitusi. Bila kehidupan semua berlandaskan pada hukum maka berbagai permasalahan yang membuat terjadinya perselisihan, konflik, dan perpecahan, bisa dihindari.

Untuk tetap berada dalam bingkai kehidupan, ada buku yang bisa dijadikan acuan untuk menuju ke harapan itu. Buku yang dimaksud adalah buku yang berjudul: *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*.

Buku karya Prof. Dr. H. Moh Mahfud MD, SH., MH., ini dicetak oleh *Rajawali Pers* dengan ketebalan ix + 303 halaman. Buku ini terbagi dalam empat bab, dan di masing-masing bab terbagi dalam puluhan sub-bab.

Sebagai bangsa Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara maka dalam buku yang cover-nya didominasi warna merah itu juga menjadikan Pancasila sebagai bahasan khusus. Dalam salah satu subbab yang ada tertulis judul: *Pancasila Dasar dan Ideologi yang Kuat*. Juga ada subbab yang berjudul: *Pancasila Sebagai Paradigma Hukum*.

Di awal Bab I, pembaca lebih dahulu dipahami tentang konstruksi politik hukum nasional. Dijelaskan di halaman 13. politik hukum nasional harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan kaidah penuntun hukum di Negara Republik Indonesia sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Lebih lanjut diungkap, dalam mengawal materi hukum agar sesuai dengan pijakan-pijakan tersebut, politik hukum Indonesia sudah memiliki kerangka dan rambu-rambu yang cukup jelas, mulai dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sampai pada *judicial review*, tapi masalah serius yang harus dihadapi adalah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Menarik pada halaman 27 dikatakan, hal yang juga harus dipadukan di dalam pembangunan hukum Indonesia adalah hubungan antara hukum dan masyarakat, yakni pemaduan antara hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin keadaan masyarakat.

Diceritakan di halaman yang sama, pada awal tahun 1970-an, saat program pembangunan nasional mulai lebih terencana dan pembangunan hukum harus juga dimasukkan dalam GBHN, wacana tentang hukum sebagai alat atau hukum sebagai cermin ini cukup meluas.

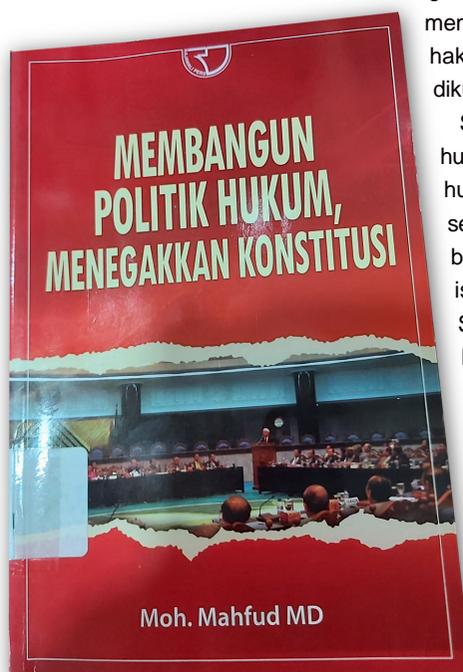
Sebagai negara yang penduduknya menganut berbagai agama, buku ini juga mengurai negara dan agama. Dipaparkan, jika dilihat dari hubungan antara negara dan agama, negara Indonesia dengan sistem hukum Pancasila yang prismatic bukanlah negara agama (*teokras*) yang menjadikan satu agama sebagai agama resmi negara dan bukan negara sekuler yang mengabaikan sepenuhnya agama-agama yang dianut oleh rakyat. Menyakini dan memeluk agama, dalam buku itu disebut adalah hak asasi yang mutlak, tak boleh dilanggar atau dikurangi oleh siapapun termasuk oleh negara.

Seperti diutarakan di atas, soal penegakan hukum yang muncul justru dari aparat penegak hukum. Dalam buku dijelaskan, sampai saat ini selalu saja ada kekecewaan sehubungan dengan berita tentang *judicial corruption*, yang dalam istilah lebih populer disebut mafia peradilan. Selama era reformasi telah dikeluarkan berbagai kebijakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk membangun peradilan yang merdeka, bersih, dan berwibawa.

Di ceritakan, di masa Orde Baru, salah satu persoalan yang sering dikemukakan adalah tidak bebasnya lembaga peradilan dari intervensi pemerintah, karena pembinaan administrasi, kepegawaian, dan finansial hakim berada di bawah eksekutif. Meski dalam era reformasi dalam buku itu dikatakan persoalan tidak

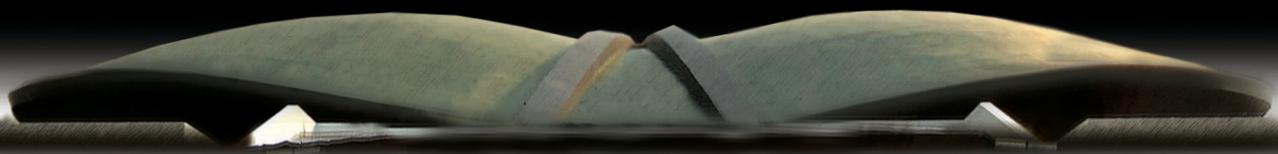
sama sekali selesai.

Dari semua masalah hukum, apakah karena kita lemah dalam budaya hukum? Itu salah satunya. Faktor lain dijelaskan, budaya feodalisme dan *paternalisme* yang hidup di dalam masyarakat telah menyebabkan hukum menjadi elitis, bersumber dan ditentukan dari atas. Budaya seperti 'ucapan' pejabat dianggap sebagai sumber hukum dan keputusan hukum. Budaya pemberian upeti dari bawahan terhadap atasan yang terwariskan secara turun temurun juga memberi sumbangan bagi lemahnya penegakan hukum. □



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT





Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI